PANEL PENASEHAT INDEPENDEN TANGGUH

LAPORAN KETUJUH MENGENAI PROYEK LNG TANGGUH

dan

TINJAUAN PENGALAMAN PANEL (2002 – 2009)

MARET 2009

Table of Contents

		Page
I.	Kata Pengantar	1
II.	Pengamatan Terkini (2008 – 2009)	3
III.	Rekomendasi Utama	5
IV.	Perkembangan Politik dan Keamanan	.11
V.	Aliran Pendapatan dan Transparansi	.19
VI.	Program untuk Desa-desa yang Terkena Dampak Langsung	.22
VII.	Program Sosial Terpadu	
VIII.	Informasi Publik	45
IX.	Lingkungan Hidup	.47
X.	Tinjauan Retrospektif	50
XI.	Isu Utama Di Masa Depan	.60
XII.	TIAP 2	.81

AKRONIM DAN ISTILAH BAHASA INDONESIA

Adat Kebiasaan, hukum dan sistem penyelesaian pertikaian secara lokal dan

tradisional yang banyak digunakan di Indonesia

ADB Bank Pembangunan Asia

AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

ASP Anak Sehat Papua– LSM yang bergerak dalam bidang kesehatan di Indonesia

BHBEP Program Pemberdayaan Usaha di Kawasan Kepala Burung

BPMigas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas-- lembaga pemerintah

Indonesia yang merupakan regulator dalam Proyek Tangguh

BRI Bank Rakyat Indonesia –Bank di Indonesia yang berfokus pada pembiayaan

mikro

Brimob Brigade Mobil

Bupati Kepala kabupaten

CAP Rencana Aksi Masyarakat-- pendekatan program bantuan untuk memfasilitasi

proyek pembangunan yang dijalankan masyarakat dalam desa yang terkena

dampak langsung

CDM Mekanisme Pembangunan Bersih– ketentuan dalam Protokol Kyoto yang

memungkinkan negara-negara untuk memperoleh kredit pengurangan emisi yang

bersertifikasi dan dapat dijual untuk proyek pengurangan emisi di negara berkembang; kredit ini dapat dihitung untuk memenuhi target yang ditentukan

dalam pertemuan di Kyoto

CLGI/YIPD Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah

CO₂ Karbon dioksida

ComRel Hubungan masyarakat

ComDev Pengembangan masyarakat

CTRC Pusat Pelatihan dan Sumber Daya Konservasi

DAK Dana Alokasi Khusus- dana khusus otonomi daerah untuk pendidikan, kesehatan,

air, dan infrastruktur jalan, perikanan, pertanian, infrastruktur pemerintahan

daerah, dan lingkungan hidup

DAU Dana Alokasi Umum – dana otonomi daerah untuk keperluan umum dari

pemerintah pusat ke provinsi

DAV Desa yang sejak semula diidentifikasi sebagai daerah yang secara langsung

terkena dampak Proyek Tangguh

DCRI Injeksi Ulang Limbah Pengeboran

DP Dewan Pendidikan

DGS Strategi Pemerataan dan Penyebaran Pertumbuhan

DPR Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD Dewan Perkwakilan Rakyat Daerah

EITI Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif

EMS Sistem Pengelolaan Lingkungan

GDP Produk Domestik Bruto

GOI Pemerintah Indonesia

HSE Kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup

IBCA Koalisi Pengusaha Indonesia untuk AIDS

ICBS Program Pengamanan Terpadu Berbasis Masyarakat

ICG Kelompok Krisis Internasional

IFC Korporasi Keuangan Internasional

IPB Institut Pertanian Bogor

IPWP Parlemen Internasional Papua Barat – organisasi separatis

ISO Organisasi Internasional untuk Standardisasi

ISP Program Sosial Terpadu – unit pelaksana dalam Proyek Tangguh dan program

pengembangan ekonomi dikelola oleh unit ini

JBIC Bank Jepang bagi Kerja Sama Internasional

JUKLAP Petunjuk Lapangan

Kabupaten Distrik atau Regency

KJP Kontraktor yang memenangkan tender pembangunan proyek LNG Tangguh

Kota Kota

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LARAP Rencana Aksi Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali -- Rencana Aksi

Pemukiman Kembali Proyek Tangguh yang menggambarkan dampak

pemukiman kembali diluar kemauan sendiri

LEMHANAS Lembaga Pertahanan Nasional

LGSP Program Dukungan Pemerintah Daerah – sebuah kegiatan USAID di Indonesia

LNG Gas Alam Cair

MOE Kementerian Negara Lingkungan Hidup

MOF Departemen Keuangan

MRP Majelis Rakyat Papua – badan perwakilan yang terdiri dari pimpinan agama,

adat, dan perempuan, yang dibuat berdasarkan UU Otonomi Khusus

NGO Lembaga Swadaya Masyarakat

OECD Organisasi bagi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan

OPM Organisasi Papua Merdeka – organisasi separatis

Pangdam Panglima Daerah Militer

PBM Perencanaan Bersama Masyarakat

PERT Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga – pelatihan yang diberikan Yayasan

SatuNama

POLDA Polisi daerah

PSC Kontrak bagi hasil

PSCM Manajemen Rantai Pengadaan dan Pemasokan- Tim pengadaan BP

RAV Desa yang terkena dampak pemukiman kembali yang memang teridentifikasi

oleh Proyek Tangguh- Tanah Merah Baru, Saengga, and Onar

SBY Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

SOP Prosedur Operasional Standar

TCHU Unit Kesehatan Masyarakat Tangguh

TIAP Panel Penasehat Independen Tangguh

TNI Tentara Nasional Indonesia

UNCEN Universitas Cenderawasih

UNIPA Universitas Papua

USAID Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional

USTJ Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Yayasan Badan hukum sosial

YPK Yayasan Pendidikan Kristen

YPPK Yayasan Pendikan dan Persekolahan Katolik – yayasan pendidikan

yang berafiliasi dengan Gereja Katolik

I. <u>Kata Pengantar</u>

Panel Penasehat Independen Proyek Tangguh (TIAP) dibentuk oleh BP untuk memberikan saran eksternal bagi para pengambil keputusan papan atas berkenaan dengan aspek nonkomersial Proyek LNG Tangguh (Tangguh" atau "Proyek"). Panel ini diketuai oleh mantan senator Amerika Serikat George Mitchell dan termasuk di dalamnya adalah Lord Hannay of Chiswick dari Kerajaan Inggris, Duta Besar Sabam Siagian dari Jakarta dan Pendeta Herman Saud dari Jayapura. Panel ini bertugas sebagai penasehat BP mengenai bagaimana Tangguh dapat mencapai potensinya sebagai model pembangunan kelas dunia dengan memperhitungkan dampak Proyek terhadap masyarakat setempat dan lingkungan, dampaknya atas kondisi politik, ekonomi dan sosial di Indonesia pada umumnya dan Papua² khususnya, serta evaluasi "resiko" di Indonesia dan Papua.

Ini adalah laporan Panel yang ketujuh dan yang terakhir. Semua laporan terdahulu, berikut tanggapan BP, dapat diperoleh dari Panel atau di situs web BP. Pada bulan Desember 2008, Panel melakukan perjalanan ke Indonesia, mengunjungi lokasi LNG, kota Babo dan Bintuni, dan kota Jayapura, Manokwari, dan Jakarta. Panel kembali bertemu dengan masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, termasuk pimpinan desa-desa yang secara langsung terkena dampak proyek (DAV) dan kota-kota serta desa-desa di pesisir utara dan selatan Teluk Bintuni; pejabat dari Kabupaten Teluk Bintuni; pejabat pemerintahan dan pimpinan LSM di Jayapura dan Manokwari; menteri dan pejabat pemerintah serta LSM di Jakarta; pimpinan Universitas Papua

iii

¹ Senator Mitchell, yang turut serta mempersiapkan laporan ini, mengundurkan diri dari Panel setelah ditunjuk menjadi Utusan Khusus A.S. untuk Perdamaian di Timur Tengah.

² Arti sesungguhnya dari nama Papua dan Papua Barat telah berubah dalam beberapa tahun ini. Untuk tujuan laporan ini, istilah "Papua" mengacu pada kawasan yang mencakup baik provinsi Papua maupun provinsi Papua Barat. Istilah "provinsi Papua" mengacu pada provinsi Papua setelah pemekaran provinsi Papua Barat. Istilah "Papua Barat" mengacu pada provinsi Papua Barat (sebelumnya disebut Irian Jaya Barat) setelah dibentuk pada tahun 2004. Peta Papua yang menunjukkan lokasi-lokasi penting terkait dengan Proyek Tangguh ada dalam Apendiks 1.

³ Situs web BP adalah www.bp.com/indonesia. Komunikasi langsung dengan Panel dapat dilakukan melalui email: tiap@tangguh.net.

di Manokwari (UNIPA); Duta Besar AS dan Inggris untuk Indonesia; perwakilan badan donor, termasuk Bank Dunia dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID); Bank Pembangunan Asia (ADB); dan kontraktor utama BP untuk proyek itu (KJP).⁴ Panel dibantu oleh penasehat hukum independen, dan memperoleh akses lengkap akan seluruh informasi yang diminta serta kebebasan penuh dalam melakukan penyelidikan dan menyampaikan temuannya. Kesimpulan dan rekomendasi dalam laporan ini semuanya murni berasal dari Panel.

Panel meninjau kegiatan BP dalam kaitannya dengan norma-norma global yang paling dihormati dan berlaku saat ini yang menghasilkan praktik-praktik terbaik di negara-negara berkembang. Hal ini mencakup Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia; Norma PBB Tentang Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya Terhadap HAM; Panduan OECD Bagi Perusahaan Multinasional; Konvensi Organisasi Buruh Internasional Mengenai Penduduk Asli dan Suku-Suku di Negara Merdeka; Petunjuk Operasional Bank Dunia berkenaan dengan penduduk asli; dan Prinsip-Prinsip Sukarela Keamanan dan HAM AS-Inggris (Prinsip-Prinsip Sukarela Keamanan); dan standar lingkungan hidup ISO.

Panel tidak melakukan penilaian mengenai kepatuhan BP atas Undang-Undang nasional dan lokal di Indonesia, tetapi mengkaji kewajiban BP terhadap AMDAL (yang mengatur kewajiban sosial dan lingkungan), Program Sosial Terpadu (ISP), serta Rencana Aksi Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP).⁵

¹¹¹¹¹

⁴ Daftar semua individu dan entitas yang diajak berkonsultasi oleh Panel selama setahun terakhir dan semasa tugasnya sejak 2002 termuat dalam Apendiks 2.

⁵ Kewajiban BP seperti yang tertuang dalam LARAP, AMDAL, dan ISP juga dikaji oleh Panel Pemberi Pinjaman Eksternal (Panel Pemberi Pinjaman). Tinjauan ISP dan pemukiman kembali dari Panel Pemberi Pinjaman akan dibuat dua tahun sekali hingga 2009; pemantauan lingkungan hidup akan berlangsung setiap tahun untuk jangka waktu masa pinjam (15 tahun) untuk meyakinkan kepatuhan atas persyaratan Bank Pembangunan Asia dan Bank Jepang bagi Korporasi Internasional.

II. Pengamatan Terkini (2008 – 2009)

Ini adalah kunjungan Panel ke Papua dan Teluk Bintuni yang ketujuh. Karena ini adalah laporan Panel yang terakhir, maka laporan ini juga berisi tinjauan retrospektif yang komprehensif yang memberikan perspektif lebih luas mengenai perubahan yang sudah ada sejak 2002 baik di Papua maupun wilayah Teluk Bintuni serta pandangan atas isu-isu penting jangka panjang yang kemungkinan besar akan dihadapi BP di masa mendatang. Pembahasan ini terdapat dalam laporan 2009 pada bagian X dan XI di bawah ini.

Fasilitas LNG hampir selesai dan akan beroperasi pada kwartal ke dua tahun 2009. Tanki penyimpanan dan menara pencairan gas dari fasilitas ini menjulang setinggi 130 kaki dan jelas tampak dari berbagai tempat di Teluk Bintuni. Tetapi bagian dari fasilitas yang terletak di pantai dan tetap dikelilingi oleh hutan asli dan bahkan berada dalam perimeternya itu, dan tak tampak dari tempat-tempat yang dekat di Teluk Bintuni, kecuali dari Tanah Merah baru dan Saengga yang merupakan desa di dekatnya yang terkena dampak pemukiman kembali (RAV).

Proyek ini mendapat dukungan kuat dari para pemimpin Papua dan daerah. Meskipun ada keluhan, tetapi hampir semuanya menunjukkan penghargaan atas konsultasi dengan warga Papua yang telah dilibatkan oleh BP dan atas manfaat spesifik yang nyata dari proyek Tangguh bagi daerah itu. Program di desa-desa yang paling dekat dengan lokasi LNG – RAV and DAV – telah meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan pembangunan ekonomi bagi masyarakat desa. Ketegangan antara warga desa di daerah utara dan selatan pantai tampaknya sudah berakhir, demikian juga pertentangan dari warga di daerah utara pantai, dengan adanya infrastruktur dan manfaat lain yang lebih baik di daerah pesisir utara.

Populasi di wilayah Teluk Bintuni terus meningkat akibat migrasi masuk (*in-migration*), khususnya ibukota kabupaten, Bintuni, di mana pemerintah kabupaten tengah membangun

kawasan yang sama sekali baru bagi perkantoran pemerintah serta rumah penduduk. Selama ini pertumbuhan itu belum menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di Bintuni, meskipun migrasi masuk yang begitu besar dalam RAV telah mengakibatkan adanya ketegangan antara penduduk asli dan pendatang. Ketegangan ini diatasi dengan peraturan setempat tentang kegiatan migrasi masuk. Tingkat migrasi masuk yang terkait dengan proyek Tangguh ini tampaknya akan menyusut dengan berakhirnya konstruksi proyek serta pekerjaan di dalamnya.

Demobilisasi pekerja konstruksi tengah berlangsung dan akan berakhir pada pertengahan tahun. Sebagian besar karyawan yang merupakan warga Papua telah kembali ke rumah mereka masing-masing dan sebagian besar, tapi tidak semua, karyawan non-Papua telah meninggalkan Papua. Banyak karyawan dari DAV yang telah didemobilisasi kini tengah mendapat bantuan untuk kembali ke profesi mereka sebagai nelayan tradisional; ada juga yang tengah dilatih untuk menjadi karyawan dalam tahap operasi dan ada juga yang ikut dalam balai latihan kerja untuk mendapatkan ketrampilan baru.

Proyek tetap mendapatkan dukungan besar dari Jakarta pada tingkat pejabat senior pemerintahan. Pemerintah Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya atas Otonomi Khusus bagi Papua dan atas transparansi yang lebih besar. Tetapi, pihak keamanan dan sistem peradilan terkadang bereaksi keras dalam menanggapi apa yang mereka anggap sebagai kegiatan separatis dan simbol-simbol dukungan untuk kemerdekaan Papua. Tindakan mereka ini terus meningkatkan masalah HAM. Tetapi baik TNI maupun polisi di Papua Barat menyambut baik pelatihan HAM yang masih berlangsung dan menunjukkan komitmen terhadap pengamanan terpadu berbasis masyarakat di Tangguh.

Dengan selesainya tugas TIAP, Panel merasa optimis bahwa Tangguh dapat terus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Papua, terutama mereka yang berada di daerah Teluk Bintuni. Tetapi untuk dapat mencapai tujuan ini, dan untuk menghindari dampak yang akan mengganggu struktur sosial, budaya, lingkungan hidup dan ekonomi dari wilayah ini, BP haruslah tetap waspada, fleksibel dan sabar selama berlangsungnya tahap operasi serta melaksanakan program-program sosial dan ekonomi proyek LNG Tangguh.

III. Rekomendasi Utama

Keamanan dan HAM

- 1. BP harus berpartisipasi semaksimal mungkin untuk mendorong dukungan Pemerintah Indonesia yang berkesinambungan bagi Pengamanan Terpadu Berbasis Masyarakat (ICBS), dalam setiap tinjauan Pemerintah Indonesia terhadap keamanan di Tangguh, yang dilakukan oleh LEMHANAS atau badan lain.
- 2. BP harus bekerja sama secara erat dengan bupati dan pejabat keamanan Papua dalam setiap penyelenggaraan terkait dengan kunjungan ke Tangguh oleh setiap pejabat pemerintah Indonesia atau tamu kehormatan lainnya.
- 3. BP harus waspada terhadap ketegangan agama yang mendasar dan berhati-hati untuk tidak mengambil tindakan yang dapat diartikan sebagai keberpihakan terhadap agama tertentu.
- 4. Dalam hal adanya ancaman baru yang dapat dihadapi Tangguh sebagai pabrik LNG yang sudah beroperasi, BP harus meninjau program ICBS, sejalan dengan tinjauan seluruh program ISP, untuk menentukan apakah diperlukan adanya perubahan. Tinjauan keamanan ini harus melibatkan konsultasi dengan personel keamanan BP Group yang senior atau pakar dari luar yang memiliki pengalaman di lokasi terpencil dan sulit dijangkau. Tinjauan itu harus mempertimbangkan kemungkinan tak terduga yang dapat terjadi di daerah terpencil seperti pembajakan tanker LNG atau serangan teroris terhadap fasilitas LNG.
- 5. BP harus terus mendorong semua personel keamanan yang terlibat dalam perlindungan proyek Tangguh, termasuk personel TNI, untuk mengikuti pelatihan HAM.
- 6. BP harus berkoordinasi lebih erat dengan TNI, dan mendorong TNI untuk berpartisipasi dalam latihan gabungan tahunan sesuai dengan JUKLAP. Latihan tahunan ini harus dikembangkan agar mencakup simulasi situasi keamanan darurat yang mungkin terjadi dalam proyek Tangguh.

Program bagi desa-desa yang terkena dampak langsung (DAV)

LARAP (Rencana Aksi Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali)

- 7. Berakhirnya LARAP secara resmi tidak boleh berarti berakhirnya komitmen yang ada saat ini terhadap pertumbuhan ekonomi yang beragam di RAV. Selama tahap operasi, BP secara berkala harus melakukan survei untuk mengukur perubahan ekonomi dan sosial di desa-desa itu dan mengumumkannya.
- 8. Jika proyek Tangguh ingin menjadi model pembangunan kelas dunia, bangunan dan fasilitas yang dibangun dalam RAV harus tetap berada dalam kondisi baik. BP harus tetap memberikan perhatian terhadap kondisi fasilitas yang telah dibangun dalam RAV dan bekerja sama dengan pemerintah setempat selama proyek beroperasi untuk membantu memastikan bahwa bangunan dan fasilitas umum itu terpelihara dan dapat berfungsi dengan baik.
- 9. Untuk memperluas keberhasilan kontrak pertamanan dengan koperasi RAV, BP harus mempertimbangkan koperasi untuk menanam dan memanen pohon buah-buahan asli sebagai bagian dari pekerjaan pertamanan dan penghijauan masyarakat.

Jalan setapak Manggosa

10. BP harus segera menyelesaikan jalan setapak Manggosa. Untuk mencegah pelanggaran zona eksklusi keselamatan, BP harus terus melakukan sosialisasi mengenai resiko pelanggaran itu dan bekerja bersama polisi perairan agar pelaksanaannya lebih efektif. Jika usaha itu tidak berhasil, BP harus melihat kemungkinan modifikasi fisik yang akan mempersulit pelanggaran, atau bahkan kemungkinan untuk mendorong adanya layanan angkutan pada jalan setapak Manggosa guna mempromosikan penggunaan jalan itu. BP juga harus berusaha mengidentifikasi pelaku pelanggaran dan bekerja sama dengan para pimpinan RAV untuk mencegah pelanggaran tersebut.

Perikanan yang berkelanjutan

11. Karena pentingnya persediaan ikan di Teluk Bintuni, BP harus melakukan survei ketiga setelah operasi dimulai untuk menilai setiap dampak pengoperasian proyek Tangguh terhadap perikanan. BP juga harus terus bekerja sama dengan bupati untuk mendorong pemerintah Bintuni agar mengembangkan dan menerapkan peraturan yang ketat untuk membatasi kegiatan pukat harimau yang berasal dari luar di masa mendatang. BP juga harus mempertimbangkan apakah dapat mendukung pelaksanaan peraturan seperti itu dengan cara apapun juga.

Pengembangan industri mikro dan mata pencaharian

12. Untuk mempertahankan balai latihan kerja di Aranday dan memastikan keberhasilannya, BP harus mendorong bupati agar menyetujui rencana bertahap untuk mengambil alih tanggung jawab atas fasilitas itu dan pengoperasiannya.

13. Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni, yang akhirnya telah berfungsi, harus terus mengembangkan infrastruktur di pesisir utara. BP harus mendukung bupati dan yayasan itu untuk memastikan keberhasilan jangka panjangnya.

Program Sosial Terpadu

14. Sebagai bagian dari tinjauan internal terhadap ISP yang saat ini sedang berjalan, BP harus memutuskan penyesuaian apa yang diperlukan agar sesuai dengan kondisi yang berubah dalam lingkungan proyek yang beroperasi dan bukan lagi dalam tahap konstruksi.

Pemerintahan

- 15. BP harus mempertahankan usaha jangka panjang yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat madani di tingkat desa, kabupaten dan provinsi.
- 16. Mengingat pentingnya pembangunan kapasitas di tingkat kabupaten, BP harus menegaskan kembali dukungannya bagi pemerintah kabupaten, termasuk, dalam waktu secepat mungkin, DPRD dan masyarakat madani.
- 17. BP harus terus menyokong program atau kegiatan KPK yang mendorong transparansi dan pemerintahan yang etis dan kompeten.

Pendidikan

- 18. Pembangunan budaya pendidikan, kapasitas, dan infrastrukturnya di Teluk Bintuni akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, untuk mencapai hasil yang berkelanjutan, BP harus meneruskan usahanya yang berkesinambungan dalam pendidikan dasar dan menengah, dengan fokus pada tingkat kabupaten. BP harus mempertahankan fleksibilitasnya, melakukan penilaian dan evaluasi ulang terhadap rincian program setiap beberapa tahun sekali.
- 19. BP harus meningkatkan jumlah beasiswa bagi siswa Papua yang layak mendapatkannya, menyelenggarakan program ini selama masa operasi, dan program harus mencakup beasiswa untuk lembaga pendidikan tinggi yang bermutu di luar Papua, khususnya dalam program teknik. Jika mungkin, maka ini harus disebut sebagai beasiswa Tangguh.
- 20. Selain dukungan jangka panjang untuk pendidikan dasar dan menengah di Teluk Bintuni, BP juga harus mendukung UNIPA di Manokwari melalui kesempatan pelatihan, beasiswa dan kemitraan. Dukungan untuk UNIPA ini akan banyak meningkatkan kapasitas teknis dan pendidikan di wilayah itu.

Kesehatan

- 21. Transisi program layanan kesehatan dari TCHU ke pihak yayasan setempat sangatlah penting, dan BP harus terus melakukan pemantauan secara aktif dan berperan sebagai penasehat untuk memastikan bahwa apa yang telah dicapai dalam DAV tidak hilang begitu saja dan organisasi baru yang menangani layanan kesehatan itu memperoleh manfaat dari pengalaman dan keahlian TCHU.
- 22. Sementara BP memperluas program kesehatannya ke daerah sekitar Teluk Bintuni dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada suatu yayasan lokal, fokus utamanya haruslah tetap dalam DAV dan perolehan yang telah dicapai di sana harus dipertahankan. Karena itu, BP harus mengkaji alasan meningkatnya kematian anak akibat diare tahun 2008 dan mengambil langkah untuk kembali mencapai apa yang sebelumnya telah diperoleh dan kemudian terus melakukan perbaikan.
- 23. BP harus mengambil peran utama dalam pendirian Koalisi Pengusaha Indonesia untuk AIDS (IBCA) cabang Papua. Begitu cabang itu telah berdiri, BP harus memastikan bahwa koalisi menyediakan sumber daya yang memadai bagi Papua. Jika perlu, BP harus menambahkan sumber daya itu.

Mata pencaharian dan pengadaan

- 24. Program pembangunan yang berkelanjutan menjadi kian penting mengingat adanya keterbatasan kesempatan kerja dalam tahap operasi. Diperlukan banyak waktu untuk mencapai hasil yang berarti, karena itu BP harus mempertahankan usaha berkesinambungan yang fleksibel untuk jangka panjang.
- 25. BP harus melanjutkan Program Pemberdayaan Usaha di Kawasan Kepala Burung (BHBEP), yang dirancang untuk mendorong perekonomian sektor swasta yang beragam dan lebih maju di kawasan itu untuk jangka panjang.
- 26. Apabila mungkin, BP harus memasukkan persyaratan pengadaan lokal dalam kontrak dengan kontraktor-kontraktornya dan memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pengadaan lokal itu. Pelaksanaan ini harus ditangani oleh Komite Pengarah Tenaga Kerja Papua atau komite serupa yang didirikan untuk pengadaan. Meskipun hasilnya pasti tak akan sama, BP harus terus mempertahankan usaha ini selama berlangsungnya program ISP.

Hubungan masyarakat

27. Untuk membantu mengelola ekspektasi, BP harus terus berdiskusi dengan pimpinan pemerintah kabupaten dan provinsi serta masyarakat setempat tentang rincian dan waktu penerimaan pendapatan dan manfaat selama tahap operasi.

- 28. BP setiap tahun harus mengumpulkan rangkuman keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan juga tanggapan BP serta hasil dari upaya penanganan halhal yang menjadi perhatian warga desa serta mengumumkannya.
- 29. Selama diberlakukannya Rencana Aksi Masyarakat (CAP), BP harus mendukung proses pengambilan keputusan desa untuk memastikan bahwa pendanaan CAP sepenuhnya digunakan untuk kepentingan penduduk asli.
- 30. BP harus bekerja untuk memperkuat masyarakat madani di wilayah Teluk Bintuni dan menjadi sponsor dalam pertemuan tahunan pemangku kepentingan Papua dalam usahanya untuk terlibat bersama dengan LSM dan pihak-pihak lokal lainnya.
- 31. BP harus terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kesempatan yang tersedia bagi perempuan, misalnya, dengan memastikan bahwa anak-anak perempuan menerima 50% dari beasiswa seperti yang disyaratkan dalam ISP.

Informasi Publik

- 32. BP perlu mempertahankan program komunikasi aktif selama beroperasinya proyek. Dilanjutkannya keterlibatan aktif dengan media Papua dan pelatihan bagi mereka merupakan hal yang teramat penting untuk memastikan liputan yang akurat mengenai pencapaian proyek Tangguh dan menghindari kesalahpahaman dan hal yang tidak benar.
- 33. BP harus terus mempertahankan selama tahap operasi ini sarana-sarana yang bermanfaat yang telah dibangun untuk penyebaran informasi dan komunikasi di Teluk Bintuni.
- 34. BP harus memanfaatkan periode awal dari tahap operasi untuk menarik perhatian umum pada manfaat keuangan, energi dan sosial dari proyek Tangguh bagi Indonesia melalui kegiatan komunikasinya. Untuk jangka panjang, BP harus melanjutkan keterlibatannya dengan media nasional dan internasional di Jakarta, memberikan *briefing* secara teratur, dan sedapat mungkin, berbagi informasi tentang program dan transfer pendapatan.

Lingkungan hidup

- 35. BP harus memantau dan mengawasi kegiatan perbaikan atau pembersihan yang mungkin diperlukan untuk mengatasi pelanggaran kepatuhan terkait dengan pembuangan limbah padat di lokasi LNG untuk memastikan bahwa kepatuhan telah dipenuhi sedini mungkin.
- 36. BP harus melanjutkan pemantauan dan pengambilan sampel air laut dan kualitas endapan secara berkala di Teluk Bintuni. BP harus melaporkan semua hasilnya dalam AMDAL yang disampaikan ke Menteri Negara Lingkungan

Hidup, dan sedapat mungkin, ke masyarakat. Pemantauan ini akan mencakup tingkat kandungan logam berat yang, meskipun kemungkinan besar tak terkait dengan proyek Tangguh, harus diperiksa dengan seksama.

- 37. BP harus terus bekerja bersama dengan pemerintah Indonesia dalam hal peraturan penangkapan dan penyimpanan karbon dan mendorong persetujuan kajian lapangan atas injeksi ulang karbon dioksida (CO₂) dalam waktu secepat mungkin.
- 38. Selama tahap operasi, BP harus secara teratur mengkaji prosedur lingkungan hidup dan berusaha meningkatkan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa BP mengikuti praktik terbaik. BP juga harus memelihara proses yang transparan, terbuka dan inklusif dalam pemenuhan dan pelaporannya di bidang lingkungan hidup.
- 39. Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati sempat tertunda karena proyek masih dalam transisi untuk beroperasi. Mengingat pentingnya dukungan BP atas rencana ini bagi mitra-mitra lingkungan hidupnya, dan perolehan penting yang sudah dicapai dapat hilang jika terdapat kekosongan yang berlarut-larut, maka BP harus mengaktifkannya kembali secepat mungkin.

Isu-isu utama di masa depan

Ketegangan antara penduduk desa pesisir utara dan selatan

40. BP harus bekerja aktif dengan bupati dan pemerintah Indonesia dalam usaha untuk mempercepat bantuan dari pemerintah Indonesia yang akan membantu menangani tuntutan adat dari warga desa pesisir utara.

Migrasi masuk

- 41. Untuk mencegah migrasi masuk lebih jauh, BP harus meneruskan praktiknya dalam tahap operasi dengan hanya mencari pekerja baru di pusat rekrutmen yang terletak di luar lokasi. Selain itu, BP jangan mengambil pegawai dari DAV, atau, berdasarkan kewajiban AMDAL, mencari pegawai yang memenuhi syarat dari warga DAV yang bukan merupakan orang dari keluarga yang dulu terdaftar dalam sensus DAV tahun 2002. BP juga harus mensyaratkan kontraktornya untuk memenuhi praktik ini.
- 42. Selama masa berlakunya ISP, BP harus memantau program-programnya dengan teratur untuk memastikan bahwa penggunaan dana CAP, dan prakarsa ISP lainnya terus memberikan manfaat bagi penduduk asli dan mendukung mereka secara ekonomi.

Keselamatan

43. Keselamatan haruslah tetap menjadi prioritas utama. BP harus terus menerus mempertahankan kewaspadaan akan prosedur keselamatan, pelatihan dan

disiplin untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama berjalannya proyek Tangguh ini.

Pengembangan SDM Papua

44. Salah satu hal yang terpenting dari kewajiban AMDAL BP adalah bahwa proyek Tangguh harus dijalankan hampir semuanya oleh masyarakat Papua dalam waktu 20 tahun. Untuk memastikan bahwa komitmen ini dipenuhi seluruhnya, manajemen BP harus mengadakan kajian tahunan untuk menentukan tindakan tambahan apa, jika ada, yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan target ketenagakerjaan sesuai dengan AMDAL. Agar manajemen berfokus pada pencapaian tujuan ini, penilaian kinerja tahunan dari para manajer BP harus mencakup insentif atau penalti apabila mereka berhasil atau gagal dalam memenuhi target ini.

Tenaga kerja dan demobilisasi

- 45. BP harus terus menyediakan pekerjaan sebanyak mungkin dalam tahap operasi atau melalui kontraktornya bagi pekerja yang dimobilisasi. Dukungan harus diberikan bagi para pekerja itu melalui program pengembangan mata pencaharian lainnya.
- 46. BP harus menyediakan dukungan manajemen bagi kegiatan Komite Pengarah Komitmen Papua untuk memastikan bahwa semua target tenaga kerja Papua dan tenaga kerja setempat bagi tahap operasi terpenuhi. BP harus mengeluarkan laporan publik tahunan mengenai tenaga kerja Papua dalam proyek ini.

Informasi publik

47. BP harus mengembangkan program informasi publik yang mantap yang mencakup baik media cetak maupun elektronik dan juga memperluas sarana media, khususnya radio, yang sekarang ini digunakan oleh proyek. Program ini harus ditargetkan bagi berbagai pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah di Teluk Bintuni dan Papua serta harus menekankan kontribusi proyek bagi pembangunan di wilayah Teluk Bintuni, Papua Barat dan Indonesia.

IV. Perkembangan Politik dan Keamanan

A. Perkembangan Politik

Perkembangan politik di Papua cukup stabil dari waktu ke waktu sejak Panel memulai kegiatannya. Untuk pertama kalinya sejak 2003, tak ada perselisihan yang berarti terkait dengan pemekaran provinsi atau penerapan Otonomi Khusus. Sesuai dengan janji Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono (SBY), DPR pada tahun 2008 memberlakukan undang-undang yang mengakui Papua Barat sebagai provinsi yang berhak menyandang Otonomi Khusus dengan status setara dengan provinsi Papua, dan pemerintahannya mulai menerapkan apa yang digambarkannya sebagai Kebijakan Baru untuk Papua. Majelis Rakyat Papua (MRP) telah mengambil langkah penting dengan menyetujui pembentukan provinsi Papua Barat, yang mendapatkan pengesahan sesuai dengan undang-undang Otonomi Daerah. Meskipun terdapat kekuatan politik yang menginginkan adanya pemekaran provinsi, dan tak dapat dipungkiri bahwa hal ini akan terjadi (beberapa pemimpin berpendapat bahwa pada akhirnya akan ada empat provinsi di Papua), tetapi pemerintahan SBY menyampaikan kepada Panel bahwa mereka telah menghentikan pembentukan provinsi baru di Papua. Tindakan Pemerintah Indonesia ini selanjutnya membuat situasi politik menjadi stabil.

Keluhan di Papua tentang Otonomi Khusus tetaplah ada, khususnya rasa skeptis mengenai penggunaan dana, dan pertanyaan mengapa PDB provinsi serta indikator sosial tetap rendah. Tetapi, ada pembicaraan kecil di antara para pemimpin mengenai penolakan total Otonomi Khusus, seperti yang pernah ada sebelumnya. Ini antara lain karena SBY telah melakukan upaya konkrit, melalui Kebijakan Baru untuk Papua, perluasan Otonomi Khusus ke Papua Barat, dan kunjungannya ke Manokwari pada bulan Januari 2009 untuk menyampaikan dana pembangunan kembali daerah yang terkena gempa bumi dan untuk meresmikan sepuluh

xiixiixii-

⁶ Lihat Laporan Keenam Panel (2008), hal. 15 dan Apendiks 3.

⁷ SBY belum lama ini meminta adanya moratorium pemekaran provinsi mengingat adanya protes yang bernuansa kekerasan dengan tuntutan pembentukan provinsi baru di bagian tenggara provinsi Sumatra Utara. Ketua DPRD Sumut meninggal karena protes itu. *Lihat* Sally Piri, *SBY Calls for Halt on New Regions*, THE JAKARTA GLOBE, 7 Feb., 2009.

⁸ Tantangan terbesar terkait dengan Otonomi Khusus tampaknya akan muncul tahun 2026, saat undang-undang itu secara resmi berakhir.

proyek infrastruktur baru,⁹ untuk menunjukkan bahwa Jakarta peduli terhadap Papua dan bermaksud meningkatkan taraf ekonominya dan menghargai sejarah budayanya yang unik.

Panel bertemu dengan gubernur dari kedua provinsi, Papua dan Papua Barat. Meskipun prioritas mereka berbeda, kedua gubernur itu saling menghargai program dan tanggung jawab masing-masing. Untuk menunjukkan solidaritas, mereka meninggalkan acara dengar pendapat dengan DPR mengenai pendanaan, untuk memprotes apa yang mereka anggap sebagai alokasi dana infrastruktur yang tidak proporsional bagi Papua Barat. Prioritas gubernur Bram untuk Papua Barat tampaknya lebih terfokus pada infrastruktur, termasuk jalan-jalan yang baru atau diperbaiki dari Manokwari ke Bintuni dan Sorong. Gubernur Suebu, meskipun juga berminat untuk meningkatkan infrastruktur transportasi provinsi Papua, berfokus pada restrukturisasi pengeluaran untuk membatasi biaya "pemerintahan" dan meningkatkan pengeluaran sosial setempat. Ia terus menerapkan Program Pembangunan Strategis Desa, atau RESPEK, dengan menyediakan sekitar \$10.000 per tahun untuk setiap desa di provinsi Papua, dengan jumlah total Rp 320 milyar¹⁰.

B. Isu Keamanan

Kebijakan pemerintah Indonesia terus mencerminkan keprihatinan akan ancaman keamanan dari separatisme di Papua. Tetapi, organisasi separatis yang utama, Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang mengaku telah melakukan sejumlah penyerangan setahun terakhir ini, tidaklah tampak di wilayah Teluk Bintuni. Ada berita di media terkemuka yang mengatakan bahwa OPM yang tak penah menjadi besar itu telah semakin lemah, tak lagi memiliki amunisi dan tergantung pada busur dan anak panah. Meskipun demikian, aparat keamanan percaya

xiiixiiixiii———

⁹ Nethy Dharma Somba, *Billions Pour into Papua*, THE JAKARTA POST, 23 Jan., 2009.

¹⁰ Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar berubah setiap hari, Panel menggunakan perkiraan Rp 10.000/\$1 untuk setiap konversi mata uang dalam laporan ini.

¹¹ Flagging Support, TEMPO, 29 Dec. 2008, hal. 102-03.

bahwa kelompok separatis merupakan ancaman nyata dan telah melakukan penangkapan atas beberapa individu di tempat lain di Papua atas tuduhan mendukung OPM atau terkait dengan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) yang bermarkas di London, ¹² kelompok yang diluncurkan pada bulan Oktober 2008 dan memberikan advokasi bagi separatisme.

Keprihatinan tentang praktik-praktik HAM dan aparat keamanan di Papua berlanjut tahun 2008. Pada bulan Januari 2009, Human Rights Watch dalam Laporan Dunia tahunannya mengecam apa yang disebutnya sebagai tak adanya kemajuan HAM di Indonesia pada tahun 2008.¹³ Laporan itu secara khusus mengatakan bahwa aparat keamanan, khususnya Brimob (brigade mobil polisi), terlibat dalam pelanggaran HAM di daerah-daerah dataran tinggi yang terpencil, dan laporan ini juga menyajikan banyak kejadian di mana polisi menangkap, menyiksa, dan paling tidak dalam satu kasus, membunuh warga Papua yang melakukan protes serta aktivis yang turut serta dalam demonstrasi itu. Penangkapan dan pemidanaan yang kejam juga terus dilakukan terhadap mereka yang menginginkan kedaulatan Papua dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua. Pengadilan di Manokwari belum lama ini menghukum paling sedikit tiga tahun penjara bagi sebelas orang yang menaikkan bendera Papua. Dikatakan bahwa mereka merupakan ancaman bagi integritas negara Indonesia melalui usaha pemisahan diri dari Papua, dan telah ada peningkatan kegiatan separatisme akhir-akhir ini di seluruh Papua, yang diorganisir dari luar negeri. Jadi tampaknya ketegangan ini akan tetap ada dalam suatu waktu.

Meskipun Tangguh akan segera beroperasi, belakangan ini tak ada peningkatan pengerahan pasukan atau tenaga pengamanan di wilayah Teluk Bintuni. Menurut beberapa pejabat senior, tak ada rencana untuk meningkatkannya dalam masa mendatang. TNI percaya

xivxivxiv

¹² Papua Barat di sini mengacu pada seluruh Irian Jaya.

Human Rights Watch, Human Rights Watch World Report 2009 (Jan. 2009), hal. 262.

bahwa pasukannya sejumlah 130 orang di Bintuni/Babo sudah cukup untuk menangani ancaman keamanan apapun. Belum ada gerakan lebih lanjut dari kemungkinan dibangunnya pangkalan Angkatan Laut kecil di Teluk Bintuni. Tetapi, TNI di Papua merasa bahwa daya mobilitas mereka kurang, dan bahwa kemampuan untuk menanggapi dengan cepat dan lebih efektif akan diperlukan untuk menangani ancaman kamanan di Tangguh karena lokasinya yang terpencil. Yang penting, belum ada permintaan dari pihak TNI ke BP untuk penggunaan sumber daya atau pembayaran untuk apapun juga dan tak ada permintaan luar biasa untuk pembayaran langsung apapun juga atau penggantian biaya bagi polisi selama tahun itu. Semua penggantian biasa untuk kegiatan polisi terkait dengan proyek Tangguh, yang sebagian besar berkenaan dengan latihanlatihan dan patroli bersama untuk mengamankan zona eksklusi keselamatan, termuat dalam situs web BP.

Ada peningkatan dalam jumlah polisi di Papua. Sebagian besar karena adanya penerimaan polisi baru yang berasal dari masyarakat Papua, suatu perubahan yang secara khusus diadopsi dari Kebijakan Baru untuk Papua. Baru-baru ini, 1.500 masyarakat Papua yang baru direkrut telah menyelesaikan latihan dan akan menjadi anggota angkatan kepolisian Papua. Rencana untuk mendirikan kantor polisi yang terpisah (POLDA) di Papua Barat masih tetap ada, tetapi belum tampak kegiatan untuk melaksanakannya dalam waktu dekat dan jadwalnya juga belum ada.

Setahun yang lalu, Panel mendapat informasi tentang maksud LEMHANAS untuk mengadakan asesmen terhadap kesiapan pengamanan di Tangguh.¹⁵ Tetapi kelihatannya hal ini belum terjadi dan tak ada rencana dalam waktu dekat untuk merealisasikannya. Kenyataannya, belum ada usulan dari pejabat pengamanan tentang peningkatan dalam komando kepolisian atau

XVXVX

¹⁴ Pangkalan udara baru telah dibuka di Meruake, di tenggara pantai Papua.

¹⁵ Lihat Laporan Keenam Panel (2008), hal. 20-21.

TNI di daerah Teluk Bintuni sebagai akibat dari beroperasinya proyek Tangguh. Tetapi, seperti yang telah dinyatakan oleh Panel tahun lalu, apabila LEMHANAS betul-betul melaksanakan kajian pengamanan seperti itu, maka BP perlu menyadarinya dan sedapat mungkin berpartisipasi untuk mendorong dukungan Pemerintah Indonesia yang berkesinambungan bagi ICBS.

Pemerintah Indonesia mempertahankan kebijakannya yang membatasi akses ke Papua dan tetap menolak masuknya warga asing yang bekerja untuk LSM, media, atau yang tidak memiliki kepentingan khusus di sana. Panel tidak setuju dengan kebijakan itu dan menyampaikannya kepada pejabat pemerintah Indonesia, yang memiliki kesulitan untuk menjelaskan alasannya.

Kongres A.S, meneruskan pembatasan dana bagi "Pendanaan Militer Asing" Indonesia. Kondisi ini dipertahankan sebagai bentuk protes atas praktik HAM Indonesia, dan kini juga sebagai kritik atas pembatasan akses ke Papua. Keseluruhan dana yang telah disetujui, sejumlah \$15,7 juta, hanya akan diberikan apabila Menteri Luar Negeri A.S. telah mengeluarkan laporan yang menggambarkan langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia mengenai reformasi militer, akuntabilitas dan akses ke Papua. 16 Selain itu, Kementerian Luar Negeri A.S., dalam laporan tahunannya tentang praktik HAM di Indonesia 2008 (Country Report on Human Rights *Practices*), kembali menggaris-bawahi sejumlah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan di Indonesia, yang sebagian terjadi di kawasan Kepala Burung. Termasuk di dalamnya adalah kemungkinan pembunuhan; penyiksaan dan penahanan warga Papua karena menaikkan bendera Bintang Kejora; pemantauan, ancaman, dan intimidasi NGO Papua oleh tenaga intelijen Indonesia; dan pembatasan untuk bepergian ke Papua.¹⁷

¹⁶ H.R. 1105, 111th Cong. 1st. Sess. (2009), Division A, Title IV; Title VI, Sec. 7071(c).

¹⁷ Departemen Luar Negeri A.S., Country Reports on Human Rights Practices – 2008 (Maret 2009).

Pemilu Indonesia akan berlangsung tahun 2009. Pemilihan anggota DPR akan berlangsung tanggal April 9, 2009; sedangkan putaran pertama pemilihan presiden akan dilangsungkan pada tanggal 8 Juli, sedangkan putaran kedua, jika diperlukan, akan berlangsung pada bulan September. Dalam kampanye pemilu ini kemungkinan pejabat senior pemerintah Indonesia akan ke Papua, dan mungkin ke Tangguh. Kunjungan oleh pejabat tingkat tinggi sulit diatur dan memerlukan koordinasi yang erat dengan pemerintah regional, polisi dan TNI. BP tidak memiliki peran untuk mengurus logistik dan keamanan untuk kunjungan seperti itu, kecuali kunjungan dalam lokasi LNG itu sendiri. Tetapi, BP perlu terus mempertahankan komunikasi dan bekerja erat dengan bupati dan pejabat pengamanan Papua mengenai semua urusan terkait dengan setiap kunjungan oleh pejabat pemerintah Indonesia atau tamu kehormatan lainnya.

C. Ketegangan Keagamaan

Keamanan dan ketertiban sosial bisa jadi terkena dampak akibat pertikaian antara warga Muslim dan Kristen di Papua yang memiliki potensi untuk meningkat. Ada ketegangan keagamaan yang cukup besar di Manokwari, dan bagian lain dari provinsi Papua Barat. Pada tahun-tahun pertama ketika Panel mulai bekerja, ada laporan tentang ketegangan keagamaan yang melibatkan milisi Islam. Dalam tahun-tahun belakangan ini, hal itu tampaknya sudah mulai mereda. Tetapi, ada laporan oleh Kelompok Krisis International (ICG) Juni 2008 yang mengatakan bahwa ketegangan keagamaan tetap ada, bahwa kekerasan tahun lalu di Manokwari dan Kaimana hanya sedikit berkurang, dan kegetiran masih terasa di kedua belah pihak. ¹⁸

Masalah di Manokwari meningkat ketika pimpinan setempat mencegah pembangunan mesjid agung di Pulau Mansinam, tempat di mana Kristen mulai disebarkan masuk ke Papua tahun 1855. Para pimpinan itu berusaha memberlakukan peraturan yang akan menanamkan

xviixvii————

¹⁸ Kelompok Krisis Internasional, *Indonesia: Communal Tensions in Papua*, Asia Report N° 154 (Juni 2008). Forum Konsultasi Para Pimpinan Agama di Papua adalah LSM yang dibentuk untuk mengurangi ketegangan ini.

nilai-nilai Kristen dalam kehidupan publik dan menyatakan sebagai "Kota Injil." Hal ini jelas ditentang oleh pimpinan Muslim setempat. Meskipun para pimpinan setempat bersikeras di hadapan Panel bahwa ketegangan itu sudah berlalu, tetapi ketegangan itu bisa muncul kembali sewaktu-waktu. Ketegangan itu baru-baru ini muncul di Manokwari dalam hubungannya dengan peraturan pemerintah Indonesia yang menentukan bahwa hari Minggu adalah hari kerja untuk pegawai negeri tertentu, sehingga menimbulkan kemarahan dalam komunitas Kristen.

Meskipun masalah yang mengakar itu mungkin ada di seluruh Papua, tapi saat ini titiktitik api tampaknya hanya ada di daerah yang lebih bersifat perkotaan di Papua Barat, di mana jumlah warga Kristen dan Muslim lebih berimbang, ketimbang di daerah pedalaman yang penduduknya sebagian besar adalah Kristen. Warga Kristen khawatir dengan Islamisasi budaya mereka. Dalam hal ini, ketegangan di Teluk Bintuni tampaknya tidaklah terlalu berarti, meskipun arus migrasi masuk memiliki potensi untuk menimbulkan pertikaian semacam itu di wilayah ini. BP harus waspada akan ketegangan yang mengakar ini dan berhati-hati untuk tidak mengambil tindakan yang dapat diartikan sebagai keberpihakan terhadap agama tertentu.

Rekomendasi

- 1. BP harus berpartisipasi semaksimal mungkin untuk mendorong dukungan Pemerintah Indonesia yang berkesinambungan bagi Pengamanan Terpadu Berbasis Masyarakat (ICBS), dalam setiap tinjauan Pemerintah Indonesia terhadap keamanan di Tangguh, yang dilakukan oleh LEMHANAS atau badan lain.
- 2. BP harus bekerja erat dengan bupati dan pejabat keamanan Papua dalam setiap penyelenggaraan terkait dengan kunjungan ke Tangguh oleh setiap pejabat pemerintah Indonesia atau tamu kehormatan lainnya.
- 3. BP harus waspada terhadap ketegangan agama yang mendasar dan berhati-hati untuk tidak mengambil tindakan yang dapat diartikan sebagai keberpihakan terhadap agama tertentu.
- 4. Dalam hal adanya ancaman baru yang dapat dihadapi Tangguh sebagai pabrik LNG yang sudah beroperasi, BP harus meninjau program ICBS, sejalan dengan

tinjauan seluruh program ISP, untuk menentukan apakah diperlukan adanya perubahan. Tinjauan keamanan ini harus melibatkan konsultasi dengan personel keamanan BP Group yang senior atau pakar dari luar yang memiliki pengalaman di lokasi terpencil dan sulit dijangkau. Tinjauan itu harus mempertimbangkan kemungkinan tak terduga yang dapat terjadi di daerah terpencil seperti pembajakan tanker LNG atau serangan teroris terhadap fasilitas LNG.

- 5. BP harus terus mendorong semua personel keamanan yang terlibat dalam perlindungan Tangguh, termasuk personel TNI, untuk mengikuti pelatihan HAM.
- 6. BP harus berkoordinasi lebih erat dengan TNI, dan mendorong TNI untuk berpartisipasi dalam latihan gabungan tahunan sesuai dengan JUKLAP. Latihan tahunan ini harus dikembangkan agar mencakup simulasi situasi keamanan darurat yang mungkin terjadi dalam proyek Tangguh.

V. Aliran Pendapatan dan Transparansi

Transfer dana dari pemerintah pusat ke Papua telah meningkat drastis dalam dekade terakhir ini. Seperti yang terinci dalam laporan tahun lalu, pemasukan yang diserahkan dari Pemerintah Indonesia ke pemerintah provinsi dan daerah di Papua telah meningkat dari Rp 3,85 triliun tahun 2001 menjadi sekitar Rp 24 triliun (\$2.4 milyar) dalam tahun fiskal 2009, suatu peningkatan lebih dari 600%. Peningkatan terbesar terkait dengan Dana Alokasi Umum (DAU), yang merupakan salah satu penerimaan fiskal otonomi daerah umum untuk semua provinsi, yang antara lain berdasarkan atas kebutuhan. Dana Otonomi Khusus, yang 80%-nya dialokasikan untuk kesehatan dan pendidikan dan sisanya untuk infrastruktur, termasuk pembagian pendapatan sumber daya, telah meningkat hampir 400% selama kurun waktu ini. Bahkan sebelum ada penerimaan dari proyek Tangguh, transfer dana untuk ke dua provinsi itu saat ini melebihi tingkat per kapita dari transfer dana untuk 31 provinsi lainnya di Indonesia dan tampaknya nanti juga akan lebih dari itu. Menurut penghitungan Bank Dunia, yang melakukan

19

analisa dan mengolah data ini, total transfer tahun 2009 akan berjumlah sekitar Rp 9 juta (\$900) per orang.²⁰

Pemerintah privinsi Papua Barat di Manokwari telah menjadi mitra sejajar dengan pemerintah provinsi di Jayapura. Untuk pertama kalinya Papua Barat akan menerima dana Otonomi Khusus secara langsung. Meskipun tak jelas apakah akan terus berlanjut tanpa ada perubahan, perkembangan ini membawa tingkat stabilitas atas anggaran dan proses perencanaan bagi Papua Barat. Yang penting, jika tidak ada perubahan dalam pelaksanaannya, maka ini dapat berarti bahwa penghasilan dari sumber daya alam, termasuk penghasilan dari Tangguh, dapat dibagi di antara semua wilayah hukum dalam provinsi yang menghasilkannya saja, ketimbang membaginya ke semua wilayah hukum di kedua provinsi di Papua itu. Jika kebijakan ini masih berlaku, maka pendapatan penuh sebesar 70% dari proyek Tangguh, setelah dipotong pajak dan biaya-biaya, kalau nanti sudah mulai mengalir pada sekitar tahun 2011, akan dibagi-bagi dalam provinsi Papua Barat, di antara pemerintah provinsi, kabupaten Teluk Bintuni, dan kabupaten serta kota lain di provinsi itu. Tetapi pendapatan Otonomi Khusus dari proyek sumber daya alam di provinsi Papua, seperti tambang emas dan tembaga Freeport McMoRan dekat Timika, akan dialokasikan hanya di antara wilayah hukum dalam provinsi itu. Karena adanya banyak perubahan yang telah terjadi sejak diberlakukannya Otonomi Khusus, bisa jadi pada akhirnya akan diterapkan pembagian yang berbeda atas pendapatan yang berasal dari sumber daya alam.

Pendapatan dari proyek Tangguh akan merupakan peningkatan besar bagi Papua Barat dan Teluk Bintuni, tetapi jauh lebih kecil dari porsi total pendapatan yang diperkirakan sebelumnya. Dalam laporan tahun 2002, Panel memperkirakan bahwa pendapatan dari proyek

X

²⁰ Lihat Wolfgang Fengler, Dian Agustina & Adrianus Hendrawan, WORLD BANK, *Spending for Development in Papua—Social, Economic and Fiscal Trends, Presentation for the Tangguh Independent Advisory Panel (TIAP)* (2009). Laporan lengkap dapat diunduh pada http://tinyurl.com/cfr8s3, dan statistik terpilih terdapat dalam Apendiks 9 laporan ini.

Tangguh pada puncaknya dapat setara atau melebihi anggaran Papua secara keseluruhan.²¹ Pada 2003 ketika terjadi pemekaran kabupaten Teluk Bintuni, tampaknya pendapatan Tangguh akan jauh melebihi pendapatan lain yang diterima oleh kabupaten itu. Pendapatan Tangguh tetap akan banyak meningkatkan pendapatan pemerintah provinsi Papua Barat dan juga akan meningkatkan pendapatan Teluk Bintuni dengan drastis.²² Tetapi, pendapatan dari Tangguh, selama tahuntahun puncaknya, tampaknya akan berada di kisaran 10-15% dari total transfer kedua provinsi di Papua, tergantung dari harga minyak.²³

Selama beberapa tahun terakhir ini, Dirjen Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan (MOF), di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah menyebarluaskan informasi mengenai transfer keuangan ini dan meningkatkan transparansi pendapatan secara umum. Dengan demikian, Panel dapat mengkaji transfer pendapatan ini, dan institusi seperti Bank Dunia dapat memantau dan menganalisa data itu. Tetapi pemerintah Indonesia belum mengungkapkan informasi pendapatan terkait proyek sumber daya alam tertentu. Keadaan ini mungkin akan berubah dalam waktu dekat. Kepada Panel, Menteri Keuangan telah menyampaikan dukungan dan maksudnya untuk bergerak maju dengan mengadopsi Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI). Sejak kunjungan Panel, pemerintah Indonesia telah memulai proses aplikasi

xxixxixxi-

²¹ Lihat Laporan Pertama Panel (2002), hal. 6.

²² Kabupaten Teluk Bintuni, sekarang usianya lima tahun, akan mengalami peningkatan pesat dalam pendapatan kalau pemasukan dari proyek Tangguh sudah mengalir. Kabupaten ini sudah menerima dana langsung sesuai dengan formula dana otonomi daerah umum (DAU, DAK) dan otonomi khusus. Sekarang ini jumlahnya sekitar Rp 650 milyar (\$65 juta). Sebagai kabupaten di mana proyek Tangguh berlokasi, Teluk Bintuni juga akan menerima porsi besar dari pendapatan sumber daya alam dari Tangguh. Sesuai peraturan saat ini, jumlahnya dapat mencapai dua kali lipat dari pendapatan yang dialokasikan ke pemerintah provinsi, dan jumlah yang sama yang dialokasikan ke semua kabupaten lain di Papua Barat. Ada kemungkinan bahwa perubahan akan terjadi sehingga alokasi dana akan menjadi lebih rata di antara kabupaten-kabupaten itu. Lihat Laporan Keempat Panel (2006), pada Apendiks 4. Meskipun kenaikan ini mungkin relatif kecil pada tahun-tahun pertama, tetapi akan meningkat selama tahun-tahun puncak sebelum mulai berkurang karena produksi gas menyusut. Tergantung harga minyak (yang merupakan faktor kunci dalam harga LNG Tangguh), pendapatan kabupaten itu dapat meningkat dua kali lipat dalam beberapa tahun. Jadi, pendapatan total yang diterima Teluk Bintuni selama tahun-tahun produksi (paling tidak dari sekitar 2017 hingga berakhirnya UU Otonomi Khusus tahun 2026), dapat membuatnya menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat pendapatan per kapita yang terbesar di antara seluruh kabupaten di Indonesia.

untuk EITI, yang pasti selesai dalam waktu dekat. ²⁴ Tampaknya ini akan mengarah pada pengungkapan yang lebih luas akan pendapatan dari proyek-proyek tertentu, termasuk Tangguh, dan penggunaannya. Panel menyambut baik perkembangan ini.

VI. Program untuk desa-desa yang terkena dampak langsung (DAV)

A. LARAP (Rencana Aksi Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali)

Dalam tahun-tahun sebelumnya, Panel memusatkan banyak perhatian akan LARAP, karena di dalamnya terdapat rincian komitmen BP terhadap masyarakat di RAV, yang pastilah terpengaruh oleh proyek Tangguh, dan harus diselesaikan selambat-lambatnya tahun 2009. Setelah itu bantuan dan proyek dalam RAV akan diintegrasikan ke dalam program ISP yang lebih luas. Panel Penasehat dan Pemantauan Pemukiman Kembali, yang khusus dibentuk untuk mengawasi komitmen LARAP, menyimpulkan bahwa proyek Tangguh telah berhasil menyelesaikan tahap konstruksi fisik dalam pelaksanaan LARAP. Kewajiban LARAP lainnya yang tahun lalu belum terpenuhi dan sempat membuat Panel merasa prihatin, yaitu yang terkait dengan tenaga kerja, bagunan publik, kepemilikan tanah, dan peningkatan mata pencaharian, telah diatasi.

²⁴ Pada pertengahan Januari 2009, Menteri Koordinasi untuk Ekonomi, Menteri Keuangan, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Persiapan Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Industri Ekstraktif. Nota itu menyatakan bahwa "para pihak setuju untuk bekerja sama dalam pelaksanaan transparansi pendapatan industri ekstraktif berdasarkan praktik terbaik internasional termasuk kriteria dan indikator pelaksanaan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI)." Nota itu menyetujui pembentukan "Tim Koordinasi bagi Persiapan Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Industri Ekstraktif."

²⁵ Laporan akhir Panel Pemantauan dan Penasehat Pemukiman Kembali, "Proyek LNG Tangguh BP: Kinerja Pelaksanaan LARAP pada tahun 2006," 15 Mei 2007, dapat diperoleh di situs web BP.

bangunan publik dari BP ke pemerintah daerah sedang berlangsung. Sesuai dengan persetujuan antara kepala desa dan bupati, fasilitas tertentu akan dimiliki oleh desa, sedangkan yang lain akan menjadi milik kabupaten sedangkan fasilitas keagamaan akan menjadi milik organisasi sosial. Meskipun serah terima secara formal sudah dimulai dan akan berlangsung secara bertahap dalam waktu dua tahun, tanggung jawab keuangan untuk mempertahankan dan menjalankan fasilitas seperti sarana air bersih masih menimbulkan keprihatinan serius. Ketiga, dokumen kepemilikan tanah untuk rumah penduduk di RAV sudah banyak diselesaikan. Keempat, dengan dukungan pemerintah Bintuni, mesin tempel telah dibagikan untuk nelayan di Saengga. Dan kelima, Yayasan Dimaga, yang disyaratkan oleh LARAP, telah berfungsi, dengan fokus pada pengembangan mata pencaharian. Ini semua adalah perkembangan positif. Tetapi BP perlu tetap memberikan perhatian atas fasilitas yang telah dibangun di RAV, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah selama tahap operasi untuk membantu memastikan bahwa bangunan serta fasilitas umum terawat baik dan berfungsi sebagai mana mestinya. Jika proyek Tangguh ingin menjadi model pembangunan kelas dunia, bangunan-bangunan itu harus tetap berada dalam kondisi baik.

Berakhirnya program LARAP secara formal tidak harus berarti bahwa semua program di RAV akan berhenti juga, khususnya komitmen jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi yang beragam yang tengah berjalan seperti yang digambarkan di atas. Selama tahap operasi, penduduk RAV akan merupakan masyarakat yang paling terkena dampak proyek, dan menghadapi resiko negatif terbesar. Karena itu Panel sebelumnya merekomendasikan bahwa, selain survei rumah tangga RAV seperti yang disyaratkan dalam LARAP pada tahun 2009, survei tambahan untuk mengukur perubahan ekonomi dan sosial di desa-desa ini harus diselenggarakan beberapa tahun setelah tahap operasi dimulai, dan hasil survei ini harus

dipublikasikan oleh BP. Selain itu, meskipun tidak diminta oleh AMDAL, dampak proyek di seluruh DAV juga perlu dipantau. Jadi, kami sekarang merekomendasikan bahwa survei berkala harus dibuat dengan mencakup semua atau sebagaian DAV sebagai sampel. Informasi dari survei mengenai dampak proyek Tangguh terhadap rumah tangga di DAV ini harus selalu menjadi perhatian BP, pemerintah dan masyarakat luas yang mengikuti perkembangan proyek Tangguh. Pemantauan seperti itu juga akan menghasilkan penyempurnaan atau bahkan perubahan besar dalam program ISP yang berkesinambungan yang menyentuh semua DAV. Jadi, BP harus meneruskan survei rumah tangga secara berkala selama tahap operasi.

B. Jalan setapak Manggosa

Kewajiban LARAP yang masih mengundang keprihatinan adalah pembangunan jalan setapak dari Tanah Merah Baru ke sekeliling fasilitas LNG untuk menyediakan akses ke tempat pencarian ikan di bagian timur fasilitas di Maggosa. Setelah tertunda sekian lama, konstruksi telah dimulai dan diharapkan akan selesai tahun 2009. Jalan setapak dan penyediaan motor tempel adalah upaya yang dibuat agar nelayan mendapatkan akses ke tempat pencarian ikan; akses itu terganggu dengan adanya zona eksklusi keselamatan di sekeliling dermaga proyek. Tetapi, jalan setapak itu panjangnya 14 kilometer dan mungkin tak dapat digunakan untuk perjalanan sehari-hari bagi pejalan kaki.

Adanya pelanggar zona keselamatan itu tetap merupakan masalah yang sulit. Meskipun telah dilakukan usaha sosialisasi selama beberapa tahun tentang bahaya pelanggaran zona eksklusi keselamatan laut di sekeliling dermaga dan anjungan, tetap saja ada pelanggaran oleh orang yang sama, dan BP tidak memiliki kewenangan hukum untuk menegakkan peraturan tentang zona itu. Sebagian sosialisasi melibatkan wakil polisi daerah, Angkatan Laut, dan penjaga pantai. Selain itu, sejak Juni 2008, polisi kelautan sering kali juga turut serta dalam

penegakan peraturan tentang zona itu. Dalam kurun waktu ini, pelanggaran banyak berkurang.²⁶ Selesainya pembangunan jalan setapak Manggosa sendiri tampaknya tak akan meniadakan pelanggaran. Bahaya yang dihadapi pelanggar akan meningkat lebih jauh begitu tanker LNG mulai tiba. Pelanggaran jelas membahayakan keselamatan, dan jika tidak dihukum, akan mendorong pelanggaran aturan keselamatan.

BP harus segera menyelesaikan pembangunan jalan setapak Manggosa, melanjutkan sosialisasi akan resiko pelanggaran zona eksklusi keselamatan laut, menggunakan kapal patroli untuk mencegah pelanggaran di saat banyak pelanggaran terjadi, dan bekerja sama dengan polisi agar dapat menegakan peraturan dengan lebih efektif. Jika usaha ini tak berhasil, BP harus memikirkan kemungkinan mengubah dermaga yang akan mempersulit pelanggaran; kemungkinan mendorong penggunaan layanan angkutan di jalan setapak manggosa untuk mempromosikan penggunaan jalan itu; dan mendesak adanya penegakan peraturan yang lebih tegas oleh pihak yang berwenang setempat agar para pelanggar menjadi jera. BP harus juga berusaha mencari tahu identitas pelanggar, menentukan apakah jumlahnya banyak atau hanya beberapa tetapi sering melanggar, dan bekerja dengan pimpinan RAV serta bupati untuk mencegah perilaku ini.

C. Perikanan yang Berkelanjutan

Panel telah menegaskan selama beberapa waktu mengenai pentingnya survei dasar yang akurat mengenai persediaan ikan dan udang di Teluk Bintuni. Penangkapan udang merupakan sumber pendapatan terbesar bagi penduduk asli. Harus diupayakan agar Proyek Tangguh jangan sampai menyebabkan berkurangnya ketersediaan itu, dan jika kekurangan itu sampai terjadi, sebab-sebab yang sebenarnya harus dapat diidentifikasi dan diatasi. Dua survei dilakukan tahun 2004, dan kemudian kembali dilakukan tahun 2007/2008. Survei yang terbaru menunjukkan

²⁶ Tabel yang merinci pelanggaran zona yang tak boleh dilewati ini ada dalam Apendiks 4.

bahwa tak ada pengurangan atas ketersediaan ikan dan tempat pencarian ikan yang subur. Sedikit banyak, hasil ini dapat mencerminkan berkurangnya kegiatan pukat harimau dari luar yang beroperasi di teluk pada saat itu. Karena pentingnya isu ini, Panel merekomendasikan agar dilakukan survei ketiga setelah tahap operasi berjalan, mungkin pada tahun 2010.²⁷

Panel percaya bahwa faktor paling kritis terkait dengan kecukupan persediaan ikan adalah tingkat beroperasinya pukat harimau dari luar. Karena itu, Panel sebelumnya juga merekomendasikan agar BP mendorong pemerintah daerah untuk "menerapkan peraturan yang tegas untuk membatasi kegiatan pukat harimau di masa mendatang dan melestarikan ketersediaan ikan dan udang bagi nelayan setempat." Tahun ini bupati memberitahu Panel bahwa ia telah menerapkan pembatasan itu, dan, paling tidak untuk saat ini, tak ada pukat harimau yang diperbolehkan beroperasi di sana. Tidak jelas apakah pembatasan ini akan terus berlaku, atau bahwa pembatasan ini akan ditegakkan dengan baik, tetapi ini adalah langkah yang bermanfaat dan BP harus mendukungnya. Mungkin BP dapat mendukung penegakannya dengan menyuruh kru tanker untuk bersiap siaga melaporkan setiap pukat harimau yang tampak di teluk, dan dengan demikian paling tidak mengidentifikasi setiap pelanggar yang potensial.

D. Usaha Mikro dan Pengembangan Mata Pencaharian

Program pengembangan mata pencaharian mencakup semua DAV, seperti yang ditetapkan dalam AMDAL. Ini memang program yang penting, tetapi sekarang manjadi kian penting mengingat adanya demobilisasi yang terjadi di antara pekerja lokal. Jelas bahwa proyek Tangguh dalam tahap operasi tidak dapat menyediakan sumber pendapatan bagi sejumlah besar individu di wilayah Teluk Bintuni dan ketrampilan pemasaran serta usaha tradisional harus

xxvixxvixxvi-

²⁷ Lihat Laporan Keenam Panel (2008), hal. 32.

²⁸ Lihat *idem*.

dikembangkan. Untuk mencapai tujuan ini, BP dalam dua tahun terakhir ini telah bekerja dengan Yayasan SatuNama dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Kedua mitra pelaksana ini telah menunjukkan kreativitas dan fleksibilitas dalam usahanya mengembangkan program yang efektif. Hasil yang diperoleh dengan segera tidaklah banyak, dan sama halnya dengan pendidikan dan pemerintahan, perlu waktu dan kesinambungan dalam pekerjaan untuk memperoleh hasil yang besar. Panel melihat sedikit kemajuan tahun lalu. Tahun ini, program yang sedikit banyak telah mengalami perubahan tampaknya menghasilkan hasil yang lebih positif.

IPB bekerja dengan warga desa RAV untuk meningkatkan pasokan, keragaman dan kualitas produk pertanian, baik untuk meningkatkan gizi keluarga dan mengembangkan pendapatan. Lebih dari 130 rumah tangga ikut berpartisipasi. IPB juga bekerja untuk meningkatkan produksi ikan dengan memperkenalkan jaring tiga lapis (*trammel*) yang lebih efektif. IPB membantu mengembangkan pemasaran krupuk udang yang dihasilkan dalam RAV. Tujuan yang ingin segera dicapai adalah agar setiap desa memiliki spesialisasi satu atau dua produk utama. Desa-desa pesisir kemudian akan menjualnya ke desa-desa di pedalaman dan begitu sebaliknya. Di luar RAV, IPB bekerja dengan nelayan kepiting di Babo dan Bintuni untuk mengembangkan teknik penggemukan kepiting dan pemasaran yang lebih baik untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Terdapat kurang lebih 100 peserta. Secara terpisah, IPB juga bekerja untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk membantu pengembangan usaha untuk menghasilkan program berkelanjutan yang didukung oleh pemerintah.

SatuNama bergerak dalam pertanian dan pengembangan usaha mikro di desa non-RAV. Yayasan ini telah membantu 129 usaha di DAV, termasuk kios komersil, produksi palawija, perikanan, dan kerajinan tangan. Yayasan ini juga telah melatih enam warga desa pesisir utara,

dan tengah melatih delapan orang lagi, sebagai organisator masyarakat (community organizer) yang membantu tim CAP di setiap desa dalam memilih dan melaksanakan proyek yang didanai melalui program CAP. Sejauh ini, penggunaan dana CAP di desa-desa di mana terdapat organisator masyarakat lebih efektif.²⁹ Selain itu, SatuNama bekerja bersama warga desa untuk mendorong pemeliharaan jaring ikan dan mesin tempel, yang biasanya tidak diperbaiki, tetapi dibuang begitu saja. Yayasan ini berusaha mendirikan bengkel perawatan di setiap desa.

Ada satu koperasi desa di RAV yang telah mulai membuat taman pada lahan di lokasi LNG melalui kontrak dengan proyek itu. Selain manfaat berupa meningkatnya penghasilan, kontrak pembuatan taman ini juga akan membantu warga desa RAV untuk membangun kapasitas usaha dan memberikan kontribusi secara aktif ke proyek. Untuk mengembangkan keberhasilan dari kontrak yang sudah ada ini, BP harus mempertimbangkan untuk mendorong koperasi itu agar menanam dan memanen pohon buah-buahan asli sebagai bagian dari pekerjaan pembuatan taman yang dilakukan oleh warga desa. Buah dapat dijual ke DAV atau ke kontraktor katering dan akan memberikan dua manfaat sekaligus: sebagai tambahan pendapatan bagi koperasi dan meningkatkan akses warga terhadap produk yang bergizi.

Selain itu, setelah gagalnya beberapa usaha untuk membentuk sistem perbankan di wilayah itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI), sistem perbankan pedesaan terbesar di Indonesia, kini mulai menyediakan kredit dan tabungan bagi warga RAV. Masyarakat dapat memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan kredit hanya kalau mereka telah selesai mengikuti kursus Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga (PERT) yang diadakan oleh SatuNama. Telah ada 43 pinjaman yang disetujui, masing-masing berjumlah Rp1.000.000 untuk empat bulan dengan bunga 9%, semuanya untuk jaring ikan. Program ini diharapkan berkembang untuk tujuan lain di desa-desa lain.

xxviiixxviiixxviii— ²⁹ Lihat Apendiks 5.

Balai latihan kerja di Aranday dibuka akhir 2007, dan sekarang telah melatih 74 warga desa setempat dalam bidang pertukangan kayu, pertukangan batu, dan ketrampilan administrasi. Panel telah lama mendukung usaha ini untuk meningkatkan jumlah warga desa, khususnya yang berada di pesisir utara, yang memilki ketrampilan praktis yang dapat digunakan untuk bekerja di tengah-tengah masyarakat. Panel terus memberikan dukungan. Tetapi, balai latihan kerja sudah menghadapi tantangan serius terkait dengan kesinambungan. Pertama, agar fasilitas ini dapat bertahan dalam jangka waktu panjang, pemerintah daerah harus ikut bertanggung jawab dalam hal perawatan dan manajemen. Kedua, untuk menarik peserta, perlu diberikan pelatihan ketrampilan yang akan menjadi bekal bagi lulusannya agar mereka berhasil mendapatkan pekerjaan. Ini adalah program penting untuk meningkatkan ketrampilan warga setempat yang oleh bupati dianggap sebagai prioritas. BP harus melakukan upaya untuk merangkul bupati serta pemerintahannya agar menyetujui kursus-kursus yang akan diajarkan sebagai bagian dari rencana bertahap guna pengalihan tanggung jawab balai latihan kerja ini.

E. Infrastruktur dan Pengembangan Masyarakat

CAP, yang memberikan dukungan tahunan bagi DAV, Babo, dan Aranday, sekarang berada dalam tahun keenam dari jangka waktu keberlangsungannya selama sepuluh tahun. Meskipun terdapat tantangan di sebagian desa terkait dengan integrasi proses perencanaan partisipatif CAP dengan pemerintahan desa, program ini terus memberikan berbagai manfaat nyata sesuai pilihan warga. Sebagian besar pendanaan telah dipakai untuk proyek infrastruktur, seperti pembangunan mesjid, fasilitas jalan dan dermaga. Tetapi dana yang jumlahnya kian bertambah sekarang ini digunakan untuk pembangunan kapasitas dan bantuan pendidikan, juga

untuk sistem pemanenan air hujan oleh masyarakat.³⁰ Mitra BP, SatuNama, juga telah melatih organisator masyarakat di beberapa desa pesisir utara untuk membantu melaksanakan proses CAP. Dengan demikian maka terjadi peningkatan dalam penggunaan dana yang tersedia di tahun pertama.³¹

Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni, yang dirancang untuk mendukung infrastruktur di pesisir utara dan mengimbangi pandangan tentang manfaat yang tak seimbang, sudah berfungsi (meskipun status hukumnya masih belum terdaftar secara resmi). Di tahun 2008, yayasan itu membangun sepuluh rumah guru, dan mulai membangun satu asrama siswa, satu TK dan dua perpustakaan. Pada tahun 2009 program ini akan mencakup sepuluh gedung serba guna, dua rumah guru, dan penyempurnaan sistem air bersih. Meskipun ada tantangan dalam pengaturan dan pelaksanaannya, proyek yayasan di pesisir utara itu telah membantu mengurangi ketegangan.

Rekomendasi

LARAP

- 7. Berakhirnya LARAP secara resmi tidak boleh berarti berakhirnya komitmen yang ada saat ini terhadap pertumbuhan ekonomi yang beragam di RAV. Selama tahap operasi, BP secara berkala harus melakukan survei untuk mengukur perubahan ekonomi dan sosial di desa-desa itu dan mengumumkannya.
- 8. Jika proyek Tangguh ingin menjadi model pembangunan kelas dunia, bangunan dan fasilitas yang dibangun dalam RAV harus tetap berada dalam kondisi baik. BP harus tetap memberikan perhatian terhadap kondisi fasilitas yang telah dibangun dalam RAV dan bekerja sama dengan pemerintah setempat selama proyek beroperasi untuk membantu memastikan bahwa bangunan dan fasilitas umum itu terpelihara dan dapat berfungsi dengan baik.
- 9. Untuk memperluas keberhasilan kontrak pertamanan dengan koperasi RAV, BP harus mempertimbangkan koperasi untuk menanam dan memanen pohon buah-buahan asli sebagai bagian dari pekerjaan pertamanan dan penghijauan masyarakat.

XXXXXXXXX

³⁰ Lihat *idem*.

³¹ 93% dari dana yang tersedia digunakan dalam desa-desa ini. Dana CAP tetap tersedia untuk tahun berikutnya jika tidak digunakan dalam tahun ketika dana itu dikucurkan.

Jalan setapak Manggosa

10. BP harus segera menyelesaikan jalan setapak Manggosa. Untuk mencegah pelanggaran zona eksklusi keselamatan, BP harus terus melakukan sosialisasi mengenai resiko pelanggaran itu dan bekerja bersama polisi perairan agar pelaksanaannya lebih efektif. Jika usaha itu tidak berhasil, BP harus melihat kemungkinan modifikasi fisik yang akan mempersulit pelanggaran, atau bahkan kemungkinan untuk mendorong adanya layanan angkutan pada jalan setapak Manggosa guna mempromosikan penggunaan jalan itu. BP juga harus berusaha mengidentifikasi pelaku pelanggaran dan bekerja sama dengan para pimpinan RAV untuk mencegah perilaku tersebut.

Perikanan yang berkelanjutan

11. Karena pentingnya persediaan ikan di Teluk Bintuni, BP harus melakukan survei ketiga setelah operasi dimulai untuk menilai setiap dampak pengoperasian proyek Tangguh terhadap perikanan. BP juga harus terus bekerja sama dengan bupati untuk mendorong pemerintah Bintuni agar mengembangkan dan menerapkan peraturan yang ketat untuk membatasi kegiatan pukat harimau yang berasal dari luar di masa mendatang. BP juga harus mempertimbangkan apakah dapat mendukung pelaksanaan peraturan seperti itu dengan cara apapun juga.

Perkembangan industri mikro dan mata pencaharian

- 12. Untuk mempertahankan balai latihan kerja di Aranday dan memastikan keberhasilannya, BP harus mendorong bupati agar menyetujui rencana bertahap untuk mengambil alih tanggung jawab atas fasilitas itu dan pengoperasiannya.
- 13. Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni, yang akhirnya telah berfungsi, harus terus mengembangkan infrastruktur di pesisir utara. BP harus mendukung bupati dan yayasan itu untuk memastikan keberhasilan jangka panjangnya.

VII. Program Sosial Terpadu (ISP)

Kemajuan yang dibuat dalam ISP sangat besar dan telah memberikan hasil yang nyata. Tetapi, diperlukan usaha jangka panjang yang berkesinambungan apabila kemajuan itu dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi dan sosial masyarakat sehingga mendekati taraf hidup di daerah lain di Indonesia. Kajian internal ISP sudah berlangsung sejak Maret 2008. Kajian ini dibuat untuk memantapkan program ke dalam lima bidang sektoral yang luas: pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pengembangan mata pencaharian, dan hubungan

masyarakat. Kajian ini juga dimaksudkan untuk mengurangi peran BP dan meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat. Perubahan yang diusulkan ini, yang pasti akan berguna, diharapkan selesai tahun 2010. Sebagai bagian dari kajian itu, BP juga harus mengevaluasi program ISP untuk menentukan perubahan apa yang diperlukan agar sesuai dengan kondisi yang berubah karena peralihan dari tahap konstruksi menjadi tahap operasi.

A. Pemerintahan

Dalam banyak hal, dukungan BP bagi pemerintah dan masyarakat madani mungkin yang paling penting di antara bidang-bidang dalam ISP. Kebutuhan yang tak terhindarkan akan pengambilalihan semua program sosial, manfaat nyata dari program yang dapat dirasakan sesegera mungkin, dan peningkatan tajam pendapatan daerah yang akan terjadi, semuanya membutuhkan pemerintahan yang efektif. Usaha ini menghadapi tantangan karena kapasitas pemerintah daerah yang lemah, khususnya dalam perencanaan, manajemen fiskal, dan layanan; kapasitas DPRD yang bahkan lebih lemah; rasa tak percaya di antara pejabat dan mutasi yang terus menerus; kapasitas masyarakat madani yang terbatas untuk mempromosikan pemerintah yang baik; dan unit pengelolaan serta wilayah hukum yang banyak jumlahnya dan mengalami pemekaran, dari tingkat desa ke provinsi. Meskipun telah ada upaya selama bertahun-tahun yang berguna, jelas bahwa program ini hanya dapat efektif apabila berlangsung dalam waktu lama. Kemajuan jangka pendek memang bermanfaat, tetapi ini tidaklah cukup mengingat rendahnya kapasitas pada saat dimulai, pemekaran daerah dan mutasi personel.

BP harus berfokus pada tiga prioritas, dan komitmen ini perlu dilanjutkan pada tahap operasi. Pertama-tama, desa dan kecamatan di daerah terdekat: usaha di daerah ini harus mencakup perencanaan strategis untuk infrastruktur dan layanan mendasar, dan pelaksanaan serta perencanaan CAP. Ini adalah program BP yang merupakan konsekuensi langsung dari

proyek dan yang merupakan kewajiban khusus seperti yang digariskan dalam AMDAL. Sudah barang tentu pihak lokal perlu mengelola dana dengan efektif. Kedua, Teluk Bintuni: kabupaten ini memiliki kewenangan utama bagi pengembangan dan pelaksanaan program di wilayah ini, merupakan penerima dana dalam jumlah besar dari pemerintah Indonesia dan dana itu akan meningkat tajam setelah pendapatan dari proyek Tangguh mulai mengalir. Dan ketiga, pemerintah provinsi Papua Barat: provinsi ini memiliki kewenangan besar dan sumber daya penting yang secara langsung mempengaruhi masyarakat Teluk Bintuni dan juga akan menerima pendapatan baru yang cukup besar dari Tangguh.

Panel merasa prihatin bahwa program pemerintahan bagi kabupaten, yang dijalankan oleh mitra pelaksana, Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah (CLGI/YIPD) sejak 2006, telah berakhir Desember 2008. BP secara aktif mengkaji kebutuhan yang masih ada dari program ini dan berharap untuk melanjutkannya dengan kontraktor pada tahap kedua selama tiga hingga lima tahun. BP mengusahakan integrasi yang lebih baik dengan elemen-elemen pembangunan kapasitas lainnya, terutama mereka yang terkait dengan program khusus sektoral yang tengah dijalankan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. BP harus mengukuhkan kembali dukungan umumnya bagi pemerintah kabupaten, termasuk DPRD dan organisasi masyarakat madani, secepat mungkin, dan bekerja dengan bupati untuk membentuk program yang memenuhi keperluannya. BP menyadari bahwa program pembangunan kapasitas kabupaten adalah usaha jangka panjang. Tujuan jangka panjangnya haruslah membuat Teluk Bintuni menjadi model kabupaten yang bekerja dengan perusahaan asing dan memberikan manfaat bagi masyarakatnya.

Program dukungan pemerintahan bagi kawasan Kepala Burung, yang mencakup pemerintahan provinsi Papua Barat, berakhir tahun 2009. Ini adalah program kemitraan yang

sudah berlangsung selama tiga tahun dengan USAID dalam Aliansi Pembangunan Global, dan dilaksanakan melalui Program Dukungan Pemerintah Daerah (LGSP). Program ini telah menunjukkan manfaatnya dalam membantu kawasan Kepala Burung, termasuk pemerintah daerah di Fak-Fak, Kaimana, dan Manokwari serta pemerintah provinsi. Dalam program ini telah dilatih banyak pejabat setempat dalam bidang keuangan dan anggaran, perencanaan partisipatif, dan penguatan legislatif serta masyarakat madani. Pengalaman ini menunjukkan dibutuhkannya komitmen yang lama bagi manajemen pendapatan yang baik dan dengan demikian konsentrasi pada wilayah hukum merupakan hal terpenting yang di diperlukan Tangguh. Menyusul program awalnya, BP harus kembali berfokus pada pemerintah provinsi di Manokwari. Salah satu elemen luar biasa dari program ini yang harus dilanjutkan adalah seminar yang diadakan di Manokwari bersama KPK pada bulan Februari 2008 berjudul "Managing Ethical Dilemmas and Facilitating Payments." Kegiatan seperti ini harus disponsori oleh BP setiap tahunnya, dan dipusatkan di Manokwari. BP harus datang agar dikenal sebagai perusahaan yang mendukung transparansi dan pemerintahan yang etis dan kompeten.

B. Pendidikan

Investasi BP dalam pendidikan dasar dan menengah sangat bermanfaat, meskipun belum banyak membuahkan hasil yang terukur. Selama dua tahun terakhir, prakarsa pendidikan yang utama adalah kemitraan dengan British Council. Kegiatannya difokuskan pada pendidikan dasar dan menengah di Teluk Bintuni, termasuk upaya untuk meningkatkan kapasitas kantor pendidikan Teluk Bintuni. Pada bulan Agustus 2008, British Council menerbitkan evaluasi tengah tahunan dari program ini. Dalam kajian itu diketahui bahwa beberapa aspek program pendidikan dasar telah dilaksanakan dengan baik dan membawa dampak positif bagi pendidikan di Bintuni, termasuk pelatihan guru, perencanaan pendidikan, dan pembuatan anggaran. Tetapi,

juga terungkap bahwa aspek lain dari program itu kurang efektif, seperti gagalnya pembentukan Dewan Pendidikan yang berfungsi dengan baik pada tingkat kabupaten, seperti yang dimandatkan oleh pemerintah Indonesia di semua kabupaten. Isu lain yang memerlukan lebih banyak perhatian meliputi koordinasi dan komunikasi di antara pemangku kepentingan utama dalam bidang pendidikan di Bintuni, persepsi negatif terhadap British Council dari bupati dan yang lain-lain, serta gagalnya sekolah untuk membangun perpustakaan tempat murid dapat meminjam buku.

Meskipun tidak langsung terkait dengan program British Council, rendahnya mutu pendidikan di wilayah itu mendapat sorotan tahun ini ketika hanya ada satu murid dari Bintuni dan 13 dari Aranday yang lulus ujian nasional dalam sistem sekolah menengah umum atas. Meskipun ada yang mengkritik British Council dengan tidak adil, hasil itu menunjukkan perlunya membangun fondasi pendidikan pada tingkat dasar dan melanjutkannya hingga jangka panjang. Pembangunan budaya pendidikan, pemerintahan dan infrastruktur di antara desa-desa akan makan waktu lama. Panel mendesak BP untuk terus berfokus pada pendidikan dasar, dengan upaya utama di kabupaten, sambil mengadakan penilaian dan evaluasi ulang atas rincian program setiap beberapa tahun.

Panel juga mendesak BP untuk meningkatkan dukungan bagi pendidikan tinggi di Papua dan kesempatan bagi mahasiswa Papua. BP turut mengambil bagian dalam program beasiswa BPMigas untuk pendidikan tinggi, dimulai tahun 2003, dan didanai oleh semua operator Kontrak Bagi Hasil (PSC) di Indonesia melalui kewajiban kontribusi per barel. Pada tahun 2008, program ini menyediakan 175 beasiswa bagi mahasiswa Papua untuk belajar di universitas di Papua. Kabupaten Teluk Bintuni juga mempunyai program beasiswa yang besar untuk belajar di

bagian lain dari Papua dan di luar Papua. Pada tahun 2008 kabupaten ini memberi beasiswa bagi 657 murid pada tingkat menengah dan tinggi. Kedua program ini sangatlah penting.

Program BPMigas mungkin akan dialihkan ke Departemen Pendidikan pemerintah Indonesia pada tahun 2009. BP bertanggung jawab hanya atas 60 bea siswa untuk mahasiswa Papua tahun 2009. Ini akan dibatasi untuk UNIPA, Universitas Cenderawasih (UNCEN) dan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ). Meskipun BP mungkin harus menanggung beban administrasi yang lebih besar karena kemungkinan peralihan itu, tak jelas mengapa jumlah beasiswa berkurang demikian drastis. Tak peduli apakah program itu jadi dialihkan secara resmi ke Departemen Pendidikan atau tidak, BP harus berusaha untuk meningkatkan jumlah beasiswa, melanjutkan program ini selama periode operasi, dan memasukkan ke dalam program beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang berkualitas di luar Papua, khususnya yang memiliki program teknis.

BP juga telah memberikan dukungan bagi UNIPA melalui kesempatan pelatihan, beasiwa untuk dosen-doesen UNIPA, dan bermitra dengan UNIPA mengenai survei perikanan di Teluk Bintuni. UNIPA menyampaikan kepada Panel bahwa mahasiswa yang mendapat beasiswa dengan dukungan BP tak memperoleh jumlah sesuai dengan standar nasional, dan bahwa dukungan tambahan untuk riset di bidang ilmu pengetahuan, teknik, pertambangan dan minyak akan meningkatkan mutu universitas, dan dengan demikian akan memberi manfaat bagi Papua Barat. Panel setuju. Dukungan yang ditunjukkan bagi UNIPA akan meningkatkan kapasitas teknik dan pendidikan di wilayah itu. Ini merupakan lokasi ideal untuk mendidik banyak masyarakat Papua yang akan menjadi inti dari manajer dan supervisor di proyek Tangguh di masa mendatang. Sebagian penerima manfaat dari program yang ditingkatkan ini akan kembali ke daerah, memberi manfaat bagi proyek Tangguh dan masyarakat terkait.

C. Kesehatan

Dalam setahun terakhir ini program kesehatan masyarakat beralih dari TCHU yang dikelola BP ke LSM lokal yang baru dibentuk, Yayasan Anak Sehat Papua (ASP). ASP, yang oleh BP masih dicarikan tambahan donornya, pada awalnya berfokus menjalankan program kesehatan desa yang dibuat oleh TCHU sementara TCHU bertindak sebagai pengawas untuk memastikan keberlanjutan dari beragam komponen program kesehatan. ASP berniat mengembangkan program regional yang lebih luas dalam beberapa tahun mendatang, dengan model bisnis sosial yang berkelanjutan dan ringan biaya mirip dengan TCHU dan dasar pendanaan yang bervariasi, yang akan bekerja untuk dan dengan sektor swasta, pemerintah dan agen donor untuk menyediakan layanan kesehatan.

ASP terus membuat kemajuan dalam hal pengendalian penyakit malaria pada tahun 2008, dengan tingkat prevalensi tetap di bawah 5% sejak pertengahan 2007 dan rata-rata tahunan sebesar 2,15% pada tahun 2008.³² Dengan mempromosikan dan memperluas penggunaan kios desa yang inovatif dengan staf dari tenaga kesehatan setempat, yang menjual obat-obatan malaria yang murah dan mudah digunakan, ASP terus mengembangkan program pengembangan usaha mikro kesehatan.³³ Program ini dirancang agar tenaga kesehatan lokal Papua dapat mengobati malaria dengan efektif dan agar menyediakan layanan kesehatan dasar lainnya di desa-desa terpencil.

ASP juga melanjutkan usaha TCHU dalam hal kesehatan ibu dan anak, dengan fokus pada imunisasi balita, gizi yang baik untuk anak-anak, dan pendidikan serta pemeriksaan ibu hamil. Selain itu, program kesehatan mencatat kemajuan dengan memastikan akses masyarakat akan air bersih dan sanitasi, termasuk membentuk program sanitasi total yang dipimpin oleh

xxxviixxxviixxxvii

³² Lihat Apendiks 6

³³ Lihat Laporan Keenam Panel (2008), hal. 28-29.

masyarakat, yang menekankan kesadaran akan perubahan perilaku yang dibutuhkan untuk menggalakkan kebiasaan kebersihan pribadi.

Tetapi, meskipun terus membuat kemajuan di bidang-bidang tertentu, program layanan kesehatan menghadapi tantangan yang serius. Pertama-tama, transisi program layanan kesehatan ke tenaga setempat sangatlah penting untuk memastikan keberlanjutan program jangka panjang, BP harus tetap berperan dan waspada untuk memastikan bahwa kemajuan yang telah dibuat dengan susah payah tidak hilang begitu saja. Salah satu contoh penting adalah BP telah membuat kemajuan besar sejak dimulainya proyek dalam pemberantasan kematian balita karena malaria di DAV, mengurangi kematian dari 21 pada tahun 2003 menjadi lima pada tahun 2007. Tetapi, selama periode September dan Oktober 2008, terjadi wabah epidemik musiman rotavirus di DAV pantai utara yang mengakibatkan meninggalnya 13 anak, antara lain karena tenaga kesehatan di daerah itu kurang berpengalaman.³⁴ BP harus terus berperan aktif dalam memantau dan memberi nasihat sementara program dialihkan ke pimpinan yang baru untuk memastikan bahwa organisasi seperti ASP mendapatkan manfaat dari pengalaman dan keahlian TCHU.

Kedua, BP harus terus memainkan peran utama dalam bidang HIV/AIDS. Tingkat HIV/AIDS sangatlah tinggi di Papua, dengan perkiraan sejumlah 2,4% warga Papua yang dewasa terkena infeksi virus itu akibat perpaduan antara kemiskinan, terisolasi, pendidikan yang rendah, dan pandangan yang salah tentang penyebaran penyakit itu. ASP bekerja dengan komunitas bisnis Papua, pemerintah, dan masyarakat madani untuk melaksanakan program pencegahan, dan BP adalah anggota pendiri dari Koalisi Pengusaha Indonesia untuk AIDS (IBCA), yang tengah mempertimbangkan untuk membuka cabang di Papua. BP harus mengambil peran utama dalam memastikan bahwa cabang ini didirikan secepat mungkin. Begitu cabang ini beroperasi, BP harus memastikan bahwa IBCA menyediakan sumber daya yang xxxviiixxxviiixxxviiiixxxviiii

³⁴ Lihat Apendiks 6.

cukup bagi Papua. Jika perlu, BP harus menambahkan sumber daya itu. Selain itu, BP telah terlibat dalam kampanye melalui media untuk meningkatkan kesadaran akan HIV/AIDS, telah melaksanakan program penyadaran dan pencegahan di lokasi LNG, dan mendukung LSM lokal yang menyediakan layanan bagi penduduk beresiko tinggi. BP harus melanjutkan semua usaha ini.

D. Mata Pencaharian dan Pengadaan

BHBEP mungkin merupakan program mata pencaharian jangka panjang proyek yang paling penting. Program ini dirancang untuk mendorong ekonomi yang lebih maju dan beragam di wilayah ini. Dalam pandangan Panel, meskipun hasilnya masih lamban, program ini harus menjadi prioritas. Kemitraan dengan Korporasi Keuangan Internasional (IFC) pada Tahap I, yang digambarkan dalam laporan sebelumnya, telah berakhir Desember 2007. Tahap II dari BHBEP diawali dengan kontrak baru selama dua tahun dengan mitra Indonesia, yaitu PT Austraining Nusantara. Dalam tahun pertama, program ini mengadakan pelatihan usaha di Manokwari, Sorong, Fak-Fak, dan Bintuni. Sejauh ini, 145 pengusaha sudah mengikutinya. Dari jumlah itu, 65 pengusaha lokal sudah terpilih untuk program pembinaan (mentoring), yang semuanya digambarkan dalam buklet profil peserta program pembinaan yang telah dibagikan ke tim pengadaan BP (PSCM), dan para kontraktor utama, untuk mendorong mereka dalam memilih subkontraktor. Pengadaan dari perusahaan yang ditargetkan harus merupakan upaya berkesinambungan, khususnya di antara kontraktor, yang mempunyai keperluan lebih besar dan lebih beragam. PSCM telah berkomitmen untuk membeli semua jasa pertamanan, seragam, alat tulis, barang-barang elektronik dasar, dan peralatan kebersihan dari perusahaan Papua. Barang dan jasa lainnya, termasuk katering, penyewaan kapal, pasokan barang kering, air bersih, pasir dan kerikil, pembangunan perumahan, pemagaran dan pembangunan dermaga sudah diserahkan

ke pengusaha Papua. Tetapi jumlah untuk fase konstruksi secara keseluruhan hanyalah \$103,6 juta, tak sampai 2% dari biaya Proyek Tangguh. PSCM memasukkan persyaratan pengadaan lokal dalam kontraknya dengan Indocater, kontraktor yang bertanggungjawab untuk memasok layanan makanan bagi fasilitas LNG. Indocater juga diminta untuk mendirikan tempat pembelian ikan dan sayur mayur dan buah-buahan di daerah Bintuni. Perusahaan ini mendirikannya di Bintuni untuk sayur mayur dan buah-buahan segar dan di Arguni untuk ikan segar. Tempat serupa direncanakan untuk didirikan di Tofoi dan di RAV. Persyaratan ini seharusnya banyak meningkatkan pengadaan dan pendapatan masyarakat setempat dengan segera. Inilah tepatnya jenis kewajiban kontrak yang harus dipertimbangkan untuk setiap pengadaan.

Kecuali pengadaan lokal untuk ikan dan sayur mayur dan buah-buahan, programprogram itu mungkin tidak segera menunjukkan hasil yang berarti. Tetapi keberhasilan itu
penting untuk membantu menciptakan ekonomi yang beragam dan berkelanjutan di daerah
Kepala Burung yang tidak tergantung hanya kepada Proyek Tangguh. BP harus memasukkan
persyaratan pengadaan lokal (atau, apabila tidak dimungkinkan, kewajiban mempekerjakan
warga setempat) dalam seluruh kontrak dengan para kontraktor. BP harus memastikan bahwa
kontraktor memenuhi kewajiban pengadaan lokal sesuai dengan kontrak. Tanggung jawab untuk
memastikan pemenuhan ini melalui tinjauan yang berkesinambungan harus ditugaskan kepada
Papua Employment Steering Committee atau komite yang setara yang dibentuk untuk pengadaan
yang memiliki kewenangan serupa. Meskipun hasilnya mungkin tidak rata/uneven, BP harus
terus melakukan upaya ini selama berlangsungnya program ISP.

E. Hubungan Masyarakat

XIXIX

³⁵ Dari \$103 juta, \$11,9 juta berasal dari pengadaan BP untuk tahap konstruksi, \$17.2 juta dari pengadaan terkait dengan ISP, dan \$74.6 juta dari pengadaan KJPselama tahap konstruksi.

Panel bertemu dengan pimpinan dari setiap DAV dan masyarakat lokal lainnya.

Meskipun ada permintaan tertentu dan keluhan, tetapi hampir semua pemimpin lokal mendukung Tangguh dan menghargai BP. Tingkat kepuasan ini juga tercermin dari jumlah keluhan masyarakat yang diajukan, yang menurun dari sekitar 40 tahun 2007 menjadi 21 tahun 2008 dan sebagian besar terkait dengan isu ketenagakerjaan dan pengembangan masyarakat (ComDev). Tim hubungan masyarakat BP (ComRel) telah melakukan tugas yang sangat baik bersama dengan warga desa setempat dalam hampir semua isu dan mengatasi kekhawatiran mereka. Sekali lagi, Panel mendesak BP untuk mengumpulkan dan menerbitkan keluhan-keluhan yang diajukan masyarakat serta hasil yang dicapai.

CAP tahunan belum semuanya berhasil. Program di beberapa DAV belum dilaksanakan sepenuhnya. Yang tahun ini telah berhasil adalah Tomu & Ekam: perahu panjang dan mesin tempel; Taroi: penyelesaian pembangunan mesjid dan tempat untuk berjalan; Weriagar-Mogotira, Otoweri, Tomage: program pemanenan air hujan. Salah satu alasan atas belum terpenuhinya semua CAP terletak pada proses pembuatan keputusan. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memasukkan evaluasi dan perencanaan bersama masyarakat (PBM) dalam CAP hingga menjadi proses perencanaan desa yang lebih umum dan melibatkan pemerintahan desa dalam pembuatan keputusan serta pada akhirnya mengalihkan pembuatan kepusuan ini kepada mereka. BP, melalui mitra lokalnya, harus terus bekerja dengan pimpinan lokal untuk membantu agar proses ini menjadi efektif.

³⁶ Lihat Apendiks 7.

dengan kemungkinan terjadinya bencana, dan ganti rugi adat. Pertemuan para pemangku kepentingan lokal ini harus dilanjutkan setiap tahun selama tahap operasi. Pertemuan ini penting sebagai alat untuk melibatkan semua pihak lokal, yang mungkin tak memiliki cara lain untuk berkomunikasi dengan BP. Secara terpisah, pelatihan penguatan LSM diadakan di Manokwari, Jayapura, dan Jakarta. Kegiatan ini tak hanya membangun kapasitas LSM; tetapi juga membangun dukungan bagi Tangguh.

Tim humas juga terus berfokus pada prakarsa pemberdayaan perempuan. Tim ini mengadakan seminar pemberdayaan perempuan di UNCEN dengan pimpinan perempuan setempat, dan pejabat pemerintah daerah. Di samping itu, peretemuan juga diadakan di Tanah Merah Baru dan Saengga agar perempuan mendapatkan kesempatan untuk memberikan masukan dalam pembuatan peraturan desa dan menyampaikan kekhawatiran mereka terkait dengan migrasi masuk, kekerasan, penyalahgunaan alkohol, dan prostitusi. Salah satu saran yang disampaikan adalah melakukan kampanye pemberdayaan perempuan melalui radio lokal. Panel menyetujui saran ini yang merupakan cara yang baik untuk menggunakan radio lokal bagi manfaat publik. Terlepas dari kegiatan yang patut dipuji ini, masih ada ketimpangan jender di Teluk Bintuni. BP harus melanjutkan usahanya untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan kesempatan yang tersedia bagi perempuan, misalnya, dengan memastikan bahwa anak-anak perempuan menerima 50% dari beasiswa seperti yang disyaratkan dalam ISP.

Rekomendasi

Program Sosial Terpadu

14. Sebagai bagian dari tinjauan internal terhadap ISP yang saat ini sedang berjalan, BP harus memutuskan penyesuaian apa yang diperlukan agar sesuai dengan kondisi yang berubah dalam lingkungan proyek yang beroperasi dan bukannya dalam tahap konstruksi.

Pemerintahan

- 15. BP harus mempertahankan usaha jangka panjang yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat madani di tingkat desa, kabupaten dan provinsi.
- 16. Mengingat pentingnya pembangunan kapasitas di tingkat kabupaten, BP harus menegaskan kembali dukungan pemerintahannya bagi pemerintah kabupaten, termasuk, dalam waktu secepat mungkin, DPRD dan masyarakat madani.
- 17. BP harus terus menyokong program atau kegiatan KPK yang mendorong transparansi dan pemerintahan yang etis dan kompeten.

Pendidikan

- 18. Pembangunan budaya pendidikan, kapasitas, dan infrastrukturnya di Teluk Bintuni akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, untuk mencapai hasil yang berkelanjutan, BP harus meneruskan usahanya yang berkesinambungan dalam pendidikan dasar dan menengah, dengan fokus pada tingkat kabupaten. BP harus mempertahankan fleksibilitasnya, melakukan penilaian dan evaluasi ulang terhadap rincian program setiap beberapa tahun sekali.
- 19. BP harus meningkatkan jumlah beasiswa bagi siswa Papua yang layak mendapatkannya, menyelenggarakan program ini selama masa operasi, dan program harus mencakup beasiswa untuk lembaga pendidikan tinggi yang bermutu di luar Papua, khususnya dalam program teknik. Jika mungkin, maka ini harus disebut sebagai beasiswa Tangguh.
- 20. Selain dukungan jangka panjang untuk pendidikan dasar dan menengah di Teluk Bintuni, BP juga harus mendukung UNIPA di Manokwari melalui kesempatan pelatihan, beasiswa dan kemitraan. Dukungan untuk UNIPA ini akan banyak meningkatkan kapasitas teknis dan pendidikan di wilayah itu.

Kesehatan

- 21. Transisi program layanan kesehatan dari TCHU ke pihak setempat sangatlah penting, dan BP harus terus melakukan pemantauan secara aktif dan berperan sebagai penasehat untuk memastikan bahwa apa yang telah dicapai dalam DAV tidak hilang begitu saja dan organisasi baru yang menangani layanan kesehatan itu memperoleh manfaat dari pengalaman dan keahlian TCHU.
- 22. Sementara BP memperluas program kesehatannya ke daerah sekitar Teluk Bintuni dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada suatu yayasan lokal, fokus utamanya haruslah tetap dalam DAV dan perolehan yang telah dicapai di sana harus dipertahankan. Karena itu, BP harus mengkaji alasan meningkatnya kematian anak akibat diare tahun 2008 dan mengambil langkah untuk kembali mencapai apa yang sebelumnya telah diperoleh dan kemudian terus melakukan perbaikan.

23. BP harus mengambil peran utama dalam pendirian Koalisi Pengusaha Indonesia untuk AIDS (IBCA) cabang Papua. Begitu cabang itu telah berdiri, BP harus memastikan bahwa koalisi menyediakan sumber daya yang memadai bagi Papua. Jika perlu, BP harus menambahkan sumber daya itu.

Mata pencaharian dan pengadaan

- 24. Program pembangunan yang berkelanjutan menjadi kian penting mengingat adanya keterbatasan kesempatan kerja dalam tahap operasi. Diperlukan banyak waktu untuk mencapai hasil yang berarti, karena itu BP harus mempertahankan usaha berkesinambungan yang fleksibel untuk jangka panjang.
- 25. BP harus melanjutkan Program Pemberdayaan Usaha di Kawasan Kepala Burung (BHBEP), yang dirancang untuk mendorong perekonomian sektor swasta yang beragam dan lebih maju di kawasan itu untuk jangka panjang.
- 26. Apabila mungkin, BP harus memasukkan persyaratan pengadaan lokal dalam kontrak dengan kontraktor-kontraktornya dan memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pengadaan lokal itu. Pelaksanaan ini harus ditangani oleh Komite Pengarah Tenaga Kerja Papua atau komite serupa yang didirikan untuk pengadaan. Meskipun hasilnya pasti tak akan sama, BP harus terus mempertahankan usaha ini selama berlangsungnya program ISP.

Hubungan masyarakat

- 27. Untuk membantu mengelola harapan, BP harus terus berdiskusi dengan pimpinan pemerintah kabupaten dan provinsi serta masyarakat setempat tentang rincian dan waktu penerimaan pendapatan dan manfaat selama tahap operasi.
- 28. BP setiap tahun harus mengumpulkan rangkuman keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan juga tanggapan BP serta hasil dari upaya penanganan halhal yang menjadi perhatian warga desa serta mengumumkannya.
- 29. Selama diberlakukannya Rencana Aksi Masyarakat (CAP), BP harus mendukung proses pengambilan keputusan desa untuk memastikan bahwa pendanaan CAP sepenuhnya digunakan untuk kepentingan penduduk asli.
- 30. BP harus bekerja untuk memperkuat masyarakat madani di wilayah Teluk Bintuni dan menjadi sponsor dalam pertemuan tahunan pemangku kepentingan Papua dalam usahanya untuk terlibat bersama dengan LSM dan pihak-pihak lokal lainnya.
- 31. BP harus terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kesempatan yang tersedia bagi perempuan, misalnya, dengan memastikan bahwa anak-anak perempuan menerima 50% dari beasiswa seperti yang disyaratkan dalam ISP.

VIII. Informasi Publik

Panel telah lama mendesak BP agar meningkatkan dan memperluas kegiatan komunikasinya. Hingga tahun 2008 rekomendasi ini telah banyak dilaksanakan. Meskipun terdapat tantangan logistik yang serius, sekarang ada beberapa media informasi yang bermanfaat di daerah Teluk Bintuni: surat kabar bulanan, radio, dan papan informasi di DAV. Sudah pasti, hal ini haruslah dilanjutkan dalam bentuk apapun selama berlangsungnya proyek.

BP juga setuju untuk mengadakan pelatihan media dan kunjungan ke lokasi bagi jurnalis lokal secara teratur. Tahun ini sepuluh jurnalis lokal turut serta dalam pelatihan, yang berfokus pada isu pembagian pendapatan dan isu-isu praktis yang mempengaruhi reporter. BP setuju untuk menyelenggarakan pelatihan semacam itu setiap tahun. Panel kembali menegaskan pentingnya latihan ini dan perlunya untuk melanjutkannya selama tahap operasi.

BP juga mengadakan dua kali pertemuan dengan media nasional dan media internasional di Jakarta untuk menyampaikan informasi terkini tentang proyek Tangguh dan program-program sosial. Hal ini berguna dan harus dilanjutkan. Jika dimungkinkan, BP harus berbagi informasi dengan media mengenai proyeksi pendapatan dan transfer dana. BP harus bertanggung jawab penuh selama operasi untuk memberikan informasi mengenai proyek Tangguh ke masyarakat.

Tetapi BP belum memanfaatkan dimulainya tahap operasi sebagai alat yang efektif untuk memberikan informasi dan pencapaian. Seperti yang telah disampaikan oleh Panel, mulai beroperasinya pabrik ini mungkin merupakan kesempatan terbaik untuk mendapatkan perhatian dari dalam dan luar negeri. Untuk jangka waktu pendek, kesempatan ini masih terbuka.

Proyek Tangguh banyak muncul dalam pemberitaan sebagian besar bukan karena strategi media atau komunikasi terkait dengan mulai beroperasinya proyek itu, tetapi karena hasil diskusi atau perdebatan tentang persyaratan dalam kontrak proyek Tangguh dengan Cina untuk

memasok ke terminal LNG di Fujian. Kesepakatan itu dinegosiasikan tahun 2003 ketika harga minyak rendah dan pasokan gas melimpah. Debat itu mencapai puncaknya pada musim panas tahun 2008 ketika harga minyak mencapai \$147 per barel. Wakil Presiden Jusuf Kalla bertindak selaku ketua komite untuk melakukan negosiasi ulang dari kontrak itu. Tidak peduli apakah kontrak ini direvisi atau tidak, hal itu tak boleh mempengaruhi dimulainya tahap operasi atau kegiatan apapun yang dilakukan oleh BP.

Sayangnya laporan media yang membingungkan dan miskin informasi, umumnya ditandai dengan tajuk seperti "*Indonesia Suffer Loss on Tangguh*,"³⁷ merupakan pemberitaan utama dalam ranah publik terkait dengan proyek Tangguh. Hal ini haruslah dihadapi dengan informasi yang akurat tentang Tangguh. Dalam hal ini, Panel merekomendasikan agar BP memanfaatkan mulai beroperasinya proyek Tangguh serta masa-masa awal pengoperasian untuk memusatkan perhatian pada manfaat keuangan, energi dan sosial dari proyek Tangguh bagi Indonesia. Awal kegiatan tanker di Teluk Bintuni dan aliran pendapatan ke Indonesia seyogyanya menarik banyak minat masyarakat.

Rekomendasi

- 32. BP perlu mempertahankan program komunikasi aktif selama beroperasinya proyek. Dilanjutkannya keterlibatan aktif dengan media Papua dan pelatihan bagi mereka merupakan hal yang teramat penting untuk memastikan liputan yang akurat mengenai pencapaian proyek Tangguh dan menghindari kesalahpahaman dan hal yang tidak benar.
- 33. BP harus terus mempertahankan selama tahap operasi ini sarana-sarana yang bermanfaat yang telah dibangun untuk penyebaran informasi dan komunikasi di Teluk Bintuni.
- 34. BP harus memanfaatkan periode awal dari tahap operasi untuk menarik perhatian umum pada manfaat keuangan, energi dan sosial dari proyek Tangguh bagi Indonesia melalui kegiatan komunikasinya. Untuk jangka panjang, BP harus melanjutkan keterlibatannya dengan media nasional dan

46

xlvixlvixlvi—

37 Investor Daily (26 Jan. 2009), hal. 20.

internasional di Jakarta, memberikan *briefing* secara teratur, dan sedapat mungkin, berbagi informasi tentang program dan transfer pendapatan.

IX Lingkungan hidup

Dengan berakhirnya tahap konstruksi proyek, maka masalah kepatuhan terbesar adalah hal-hal yang terkait dengan pembuangan limbah padat, yang sebagian besar disebabkan oleh jumlah tenaga kerja yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan semula. Isu ini tengah ditangani dengan pembelian dan instalasi pembuatan kompos industri, pembangunan *sanitary landfill* (tempat pengolahan limbah yang dapat mencegah resapan limbah cair yang berbahaya ke dalam tanah) yang baru, dan instalasi sumur-sumur pemantauan untuk menentukan apakah ada perbaikan yang diperlukan. Mesin pembuat kompos yang baru itu akan menghasilkan kompos sebanyak 15.000 kg /bulan yang dapat digunakan untuk program penghijauan kembali di lokasi LNG.

Program pemantauan air dan endapan dilakukan tahun 2007 dan 2008 untuk menyediakan informasi terbaru bagi data dasar. Tingkat kandungan beberapa logam berat yang cukup tinggi, termasuk arsenik, merkuri, dan nikel, dilaporkan terdapat dalam sebagian sampel endapan, sedangkan dalam sebagian sampel air ditemukan kandungan nikel yang cukup tinggi. Tampaknya konsentrasi ini tak terkait dengan proyek Tangguh. BP telah mengkaji data awal tahun 1996 dan menyimpulkan bahwa tingkat kandungan ini adalah tingkat latar belakang yang, entah bagaimana, ada dalam berbagai tempat di Teluk Bintuni, termasuk bagian yang jauh dari Tangguh. Pemantauan dasar ini penting. Panel merekomendasikan agar BP terus memeriksa isu ini, mengadakan pemantauan dan mengambil sampel secara teratur, serta melaporkan semua hasilnya dalam laporan AMDAL ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan, jika mungkin, ke masyarakat.

Kemungkinan kontaminasi air atau endapan menggambarkan betapa BP perlu mempergunakan injeksi ulang untuk mengelola limbah dan potongan dari pengeboran lumpur (DCRI atau Injeksi Ulang Limbah Pengeboran). Praktik ini lebih disukai dari sisi lingkungan hidup daripada membuang ke laut semua limbah lumpur dan potongan dari pengeboran, yang menimbulkan resiko terhadap industri perikanan dan daerah hutan bakau yang sensitif di teluk. BP tidak menyetujui saran dari pemerintah Indonesia agar membuang limbah ke laut. Meskipun DCRI telah digunakan lebih dari 20 tahun di banyak tempat di dunia, ini akan merupakan penggunaan yang pertama kalinya di Indonesia. Ijin penggunaannya untuk Tangguh diperoleh setelah proyek berusaha keras menunjukkan manfaat lingkungan hidup dari proses CDRI kepada perwakilan pemerintah.

Pengelolaan emisi CO₂ masih merupakan tantangan berat. Dalam rancangan proyek

Tangguh sekarang ini, seperti yang disetujui dalam AMDAL, CO₂ akan dilepaskan selama kilang
beroperasi. Saat ini, injeksi ulang CO₂ bukan merupakan pilihan yang mungkin karena tak ada
peraturan yang mendukungnya di Indonesia. Fakta bahwa injeksi ulang CO₂ tidak memenuhi
syarat dalam proyek Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) dalam Protokol Kyoto juga
merupakan hal yang kurang menguntungkan bagi penggunaannya di Indonesia. Panel kembali
mengulangi rekomendasi bahwa BP harus mendesak pemerintah Indonesia untuk menyetujui
penilaian lapangan akan injeksi ulang CO₂ dalam waktu secepat mungkin. Hal ini akan
meningkatkan kemungkinan bahwa penangkapan dan injeksi ulang CO₂ akan menjadi strategi
jangka panjang bagi pengelolaan emisi CO₂ dari Tangguh.

Rekomendasi

35. BP harus memantau dan mengawasi kegiatan perbaikan atau pembersihan yang mungkin diperlukan untuk mengatasi pelanggaran kepatuhan terkait dengan pembuangan limbah padat di lokasi LNG untuk memastikan bahwa kepatuhan telah dipenuhi pada masa secepat mungkin.

- 36. BP harus melanjutkan pemantauan dan pengambilan sampel air laut dan kualitas endapan secara berkala di Teluk Bintuni. BP harus melaporkan semua hasilnya dalam AMDAL yang disampaikan ke Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan sedapat mungkin, ke masyarakat. Pemantauan ini akan mencakup tingkat kandungan logam berat yang, meskipun kemungkinan besar tak terkait dengan proyek Tangguh, harus diperiksa dengan seksama.
- 37. BP harus terus bekerja bersama dengan pemerintah Indonesia dalam hal peraturan penangkapan dan penyimpanan karbon dan mendorong persetujuan kajian lapangan atas injeksi ulang karbon dioksida (CO₂) dalam waktu secepat mungkin.
- 38. Selama tahap operasi, BP harus secara teratur mengkaji prosedur lingkungan hidup dan berusaha meningkatkan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa BP mengikuti praktik terbaik. BP juga harus memelihara proses yang transparan, terbuka dan inklusif dalam pemenuhan dan pelaporannya di bidang lingkungan hidup.
- 39. Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati sempat tertunda karena proyek masih dalam transisi untuk beroperasi. Mengingat pentingnya dukungan BP atas rencana ini bagi mitra-mitra lingkungan hidupnya, dan perolehan penting yang sudah dicapai dapat hilang jika terdapat kekosongan yang berlarut-larut, maka BP harus mengaktifkannya kembali secepat mungkin.

Tinjauan Pengalaman TIAP (2002 – 2009)

X. <u>Tinjauan Retrospektif</u>

Ini adalah kunjungan Panel ke Papua dan Teluk Bintuni yang ketujuh atau terakhir kalinya. Pabrik hampir selesai dan akan mulai beroperasi pada tahun 2009. Dengan demikian laporan ini merupakan kesempatan untuk melihat perubahan apa yang telah terjadi, isu dan keprihatinan apa yang kelihatannya akan muncul selama tahap operasi, dan pelajaran apa yang mungkin dapat dipetik dari tahap konstruksi.

Banyak yang telah berubah secara fisik di daerah itu sejak Panel mulai bekerja. Kunjungan Panel yang pertama, Juni 2002, berlangsung sebelum ada kegiatan konstruksi atau relokasi. Desa Tanah Merah terletak di tanah yang akan menjadi bagian dari fasilitas LNG. Rumah-rumah di Tanah Merah, juga di desa-desa Saengga dan Onar, masih primitif, terbuat dari kayu dengan atap ilalang atau seng dan tak ada saluran air, listrik atau peralatan masak di dalamnya.³⁸ Hampir tak ada kegiatan komersil di RAV. Tak satupun dari sembilan DAV memiliki system pengumpulan air bersih atau tenaga kesehatan professional atau fasilitas kesehatan. Malaria, diare dan gizi buruk merajalela, menyebabkan banyaknya kematian pada anak-anak. Makanan sangat terbatas dan buruk, kebanyakan terbuat dari sagu, tepung yang terbuat dari saripati batang pohon sagu. Sekolah di semua DAV terselenggara sekedarnya oleh guru-guru yang terbatas dengan peralatan yang jauh dari cukup; tingkat kehadiran tak merata dan tak ada usaha untuk meningkatkannya. Listrik sangat terbatas dan tak ada telepon atau radio lokal. Tak ada kendaraan bermotor di desa atau jalan yang menghubungkan mereka. Selain kapal kecil, akses menuju daerah itu hanyalah terbatas pada landasan helikopter di barak pangkalan kecil di dekat desa Saengga (dibangun oleh perusahaan sebelum BP, ARCO); tak ada landasan terbang di pesisir selatan Teluk Bintuni.

50

³⁸ Lihat foto-foto pada Apendiks 3.

Tahun 2002, terdapat kekhawatiran yang beralasan terkait dengan ancaman terhadap gaya hidup dan budaya penduduk asli Papua, khususnya yang berada di desa Tanah Merah, yang akan direlokasikan, dan di Saengga, tempat di mana desa baru bernama Tanah Merah Baru akan didirikan. Terdapat kekhawatiran terkait dengan lingkungan hidup, khususnya terkait dengan pelestarian bakau di sepanjang pantai, yang merupakan hutan bakau terbesar yang masih asri di Asia Tenggara, dan kestabilan persediaan udang serta ikan di Teluk Bintuni, yang merupakan satu-satunya sumber penghidupan bagi warga desa setempat. Ada juga kekhawatiran terkait dengan keamanan, baik berhubungan dengan peran dan tindakan TNI dan polisi dalam mengamankan fasilitas dan juga apakah TNI akan mengajukan tuntutan finansial ke BP seperti yang pernah dilakukan terhadap perusahaan lain.

Secara politis, daerah Teluk Bintuni terbagi menjadi tiga kabupaten yang terpisah:

Manokwari, Sorong Selatan (di pesisir utara), dan Fak-Fak (di pesisir selatan). Proyek Tangguh berada di provinsi Papua (Irian Jaya), dengan ibukota Jayapura, yang berjarak 834 kilometer dari proyek. Ketika itu belum ada kabupaten Teluk Bintuni dan provinsi Papua Barat. Gubernur provinsi itu dan bupati para kabupaten ditunjuk oleh pejabat di Jakarta. Jadi, terdapat kapasitas yang terbatas, baik dari sisi manusia ataupun fisik, di tingkat provinsi maupun kabupaten. Selain di Jayapura, kapasitas masyarakat madani juga sangat terbatas, kecuali entitas berbasis keagamaan dan kelompok bantuan hukum/pembela HAM di Manokwari.

Undang-undang yang memberikan otonomi khusus bagi Papua dan otonomi daerah bagi semua provinsi baru diberlakukan akhir-akhir ini. Pimpinan Dewan Presidium Papua, Theys Eluay, yang memegang peran penting dalam upaya untuk mendapatkan otonomi khusus, baru saja tewas setelah pertemuan dengan TNI di Jayapura. OPM, organisasi separatis militan, diduga malakukan kegiatan luas di Papua, dan pada bulan Agustus 2002, dituduh membunuh tiga orang

guru asing yang bekerja bagi pertambangan Freeport. Kekhawatiran akan ketegangan keagamaan meningkat, sebagian disebabkan oleh milisi Islam radikal seperti Laskar Jihad. Meskipun sama sekali terpisah dari kondisi di Papua, pemberontakan berkobar dengan marak di Aceh, bagian lain di Indonesia.

Tahun 2001, anggaran keseluruhan untuk Papua dan semua kabupaten berjumlah Rp 3,85 triliun, atau sekitar \$400 juta. Papua (termasuk semua kabupaten) pada tahun 2002 menerima sekitar Rp 5,54 triliun (sekitar \$550 juta) dalam bentuk transfer dana dari Jakarta, dan memiliki PDB sekitar Rp 9 juta per kapita (sekitar \$900). Terdapat kekurangan pendapatan untuk program sosial dan infrastruktur dasar, dan banyak dari dana yang terbatas itu dihabiskan untuk "administrasi" dan "tak jelas". ³⁹ Pada saat itu, tampaknya pendapatan dari proyek Tangguh untuk provinsi itu, apabila mendekati tingkat puncak, dapat melebihi seluruh anggaran provinsi sejumlah \$190 juta. Hal ini, tentu saja, memiliki dampak besar terhadap provinsi dan wilayah hukum di dalamnya. Untuk mengendalikan dampak ini, dalam beberapa dari laporannya yang terdahulu, Panel mengemukakan kebutuhan untuk mempercepat dan melancarkan setiap peningkatan aliran pendapatan ke provinsi dan kabupaten.⁴⁰

Tingkat kemiskinan di Papua mencapai 46% 41 (tertinggi dari semua provinsi di Indonesia yang berjumlah 30), dan di daerah terpencil seperti Teluk Bintuni tingkat kemiskinan itu jauh lebih tinggi. Tingkat melek huruf di Papua adalah 74,4%, terendah dari 30 provinsi, 42 dan ratarata masyarakat Papua hanya bersekolah selama enam tahun, paling buruk nomor dua dari semua

³⁹ Bank Dunia, *Papua Public Expenditure Analysis Overview Report* (2005), hal 36.

⁴⁰ Lihat Laporan Pertama Panel (2002), hal 16-17; Laporan Kedua Panel (2003), hal 15; dan Laporan Ketiga Panel (2005), hal. 26-28.

41 Lihat Apendiks 9, hal 3 (harap dicatat bahwa itu angka dari 2000, sedangkan angka 2001 hanya mewakili ibukota

⁴² UNDP, *Indonesia Human Development Report 2004*, hal 101 (harap dicatat bahwa angka Papua dari tahun 2003).

provinsi di Indonesia. ⁴³ Papua menduduki peringkat ke 29 dari 30 di antara semua provinsi di Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia, yang mengukur tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf orang dewasa, rata-rata tahun bersekolah, dan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan. ⁴⁴ Di daerah Teluk Bintuni, kegiatan ekonomi utama adalah pukat harimau yang dilakukan oleh perusahaan perikanan asing atau yang berbasis di Jawa, yang tidak melibatkan warga Papua. Boleh dikatakan bahwa sumber penghasilan satu-satunya bagi masyarakat setempat adalah perikanan, terutama udang, yang semuanya dilakukan hampir dengan menggunakan perahu lesung (kano) yang dikayuh dengan tangan dan hasil tangkapannya dijual ke pedagang.

Pengalaman utama Papua dengan proyek pertambangan yang besar dari luar adalah pertambangan raksasa emas dan tembaga Freeport McMoRan di dekat Timika, hampir 500 km dari Teluk Bintuni, yang telah menimbulkan kontroversi terkait dengan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, degradasi lingkungan hidup, manfaat yang terbatas bagi penduduk asli, dan ketegangan sosial terkait dengan banyaknya pekerja pendatang yang membanjiri daerah itu. BP berjanji untuk bertindak lain daripada apa yang telah dilakukan oleh Freeeport di masa lalu, tetapi terdapat rasa skeptis terkait dengan jaminan atas konsultasi dan pelibatan. Pada saat yang sama, pelibatan BP mengarah pada suatu momentum pengharapan atas manfaat proyek yang diharapkan oleh setiap kelompok pemangku kepentingan untuk dapat dinikmati. Seperti yang telah Panel sampaikan pada awalnya, "Tangguh disambut gembira baik sebagai model baru perilaku perusahaan internasional tetapi juga ditakuti karena pengalaman masa lalu Papua." Sesungguhnya, pengalaman historis dengan Freeport juga menimbulkan pertanyaan serius dalam

liiiliiiliii-

⁴³ *Idem.* Hal. 97.

⁴⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), *Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia* (Maret 2008), hal. 34.

⁴⁵ Lihat Laporan Pertama Panel (2002), hal. 8.

sektor perusahaan internasional mengenai apakah mungkin untuk melakukan investasi modal dalam jumlah besar dengan sukses dalam lingkungan politik dan sosial di Papua.

Di tingkat lokal, terdapat ketegangan antara warga desa pesisir utara dan pesisir selatan mengenai manfaat, khususnya terkait dengan rumah dan fasilitas baru untuk masyarakat yang dibangun bagi RAV, yang semuanya ada di pesisir selatan. Hal ini diperparah dengan banyaknya warga desa pesisir utara yang merasa bahwa mereka memiliki ladang gas, dan mereka harus mendapatkan kompensasi untuk itu sesuai dengan sistem tradisional adat. Kenyataannya, banyak pemimpin di pesisir utara yang menuntut agar fasilitas LNG dibangun di pesisir utara agar mereka mendapatkan lebih banyak manfaat.

Saat ini, pembangunan fasilitas boleh dikatakan telah selesai dan transisi ke tahap operasi berjalan dengan baik dan harus selesai pada kwartal ke dua tahun 2009. Kilang 1 hampir 100 % selesai diuji dan Kilang 2 akan selesai nanti pada kuartal kedua 2009. Masa operasi telah ditentukan untuk dimulai pada kuartal kedua 2009. Personel untuk operasi terintegrasi dengan tim konstruksi proyek dalam pengalihan prosedur kesehatan, keselamatan dan lingkungan (HSE). Banyak warga Papua yang bekerja di fasilitas itu, baik untuk BP dan juga untuk kontraktornya, termasuk beberapa orang yang bekerja di ruang kontrol operasi yang sangat teknis.

Fasilitas LNG, dengan dua tank penyimpanan yang sangat besar, dua menara pencairan, dan bangunan serta fasilitas terkait, mendominasi sebagian daerah pesisir selatan. Terdapat asrama dan fasilitas rekreasi/tempat makan yang menarik bagi 500 karyawan. Pabrik itu sendiri letaknya tersembunyi dan tak tampak dari ujung pantai lain kecuali dari RAV. Lahan seluas 335 hektar yang telah dibersihkan itu kini ditanami dengan 400.000 bibit dari hutan di sekelilingnya,

livlivliv————

⁴⁶ Awal operasi ditunda karena BP menemukan beberapa katup yang cacat. Setelah menyadari bahwa sebagian katup yang diproduksi di Indonesia ternyata cacat, meskipun telah lulus tes kendali mutu pemasok, BP memerintahkan penggantian lebih dari 1.600 katup di seluruh fasilitas, sehingga pengoperasiannya tertunda beberapa bulan. Keputusan ini didasarkan atas pertimbangan keselamatan dan meskipun mahal, jelas bahwa keselamatan adalah prioritas utama BP.

yang ditanam dalam tempat pembibitan Tangguh. Ada dua platform pengeboran tanpa awak yang beroperasi di Teluk Bintuni.

Belum ada keputusan yang dibuat mengenai pembangunan kilang LNG tambahan. Ini akan tergantung pada besarnya cadangan yang dapat dibuktikan yang terdapat di Teluk Bintuni dan juga tingkat permintaan. BP melakukan kegiatan seismik baru di Teluk Bintuni untuk dapat menentukan jumlah dan karakteristik cadangan itu dengan lebih akurat dan khususnya apakah terdapat cukup banyak cadangan sehingga perlu membangun kilang ketiga. Jika kilang ketiga layak dibangun, dan dapat dipastikan adanya konsumen gas itu, perlu dipersiapkan AMDAL baru yang dapat mengubah kewajiban BP terhadap wilayah itu. Dalam proses ini bupati Teluk Bintuni dan warga setempat lainnya akan mendapat kesempatan bagi untuk berpartisipasi dalam konsultasi sebelum ada keputusan yang diambil.

Wilayah Teluk Bintuni di sekeliling fasilitas LNG telah berubah drastis. Tanah Merah dan Saengga yang merupakan RAV sekarang seluruhnya telah terbangun kembali. Di setiap desa ada rumah baru untuk setiap keluarga yang terdaftar dalam sensus dasar. Dalam rumah yang dilengkapi dengan listrik itu terdapat tiga tempat tidur dan fasilitas untuk memasak dan toilet yang terpisah. Di setiap desa ini terdapat fasilitas umum dan keagamaan yang besar, nyaman, dan modern. Di Onar juga terdapat rumah baru yang sama bagi setiap penduduk yang berasal dari Tanah Merah yang memilih untuk tinggal di sana, dan juga rumah baru dengan bentuk yang berbeda bagi setiap penduduk asli. Semua DAV memiliki sistem yang sama untuk penampungan air bersih, listrik, sekolah yang sudah ditingkatkan mutunya dan perumahan guru, serta kios layanan kesehatan yang dijaga oleh personel lokal yang terlatih. Perahu nelayan di RAV sekarang diberi motor tempel dan banyak nelayan mempunyai jaring modern. Nelayan diajari untuk merawat mesin dan memperbaiki jaring. Perempuan di RAV terlibat dalam berbagai usaha lululu

⁴⁷ Lihat Apendiks 3.

mikro, termasuk menanam tumbuh-tumbuhan baru dan membuat kerupuk udang. Banyak yang mengikuti kursus melek huruf dan ada keluarga yang turut serta dalam program simpan pinjam untuk mengembangkan usaha.

Wilayah Teluk Bintuni dan sekitarnya juga telah berubah secara ekonomi. Babo dan Bintuni, dua kota besar di wilayah itu, tumbuh dalam perekonomiannya. Babo adalah lokasi barak pangkalan proyek Tangguh dan tempat lapangan udara yang dibangun BP bagi proyek itu. Layanan udara komersial sekarang ada di sana untuk pertama kalinya. (BP membangun kembali landasan pesawat buatan Jepang yang dihancurkan oleh bom A.S. di masa Perang Dunia II). Penduduk Bintuni, ibu kota kabupaten baru Teluk Bintuni, telah meningkat dua kali lipat menjadi 15.000, memiliki landasan terbang komersial, dan menunjukkan tanda-tanda pembangunan komersial yang bergairah. Bupati juga membangun pusat pemerintahan yang sama sekali baru dan terpisah dengan perumahan dan kantor bagi karyawan kabupaten. Jalan dari Bintuni ke Manokwari, yang sebelumnya ditempuh selama lebih dari 10 jam berkendara, sekarang tengah diperbaiki. Meskipun ada pertikaian sehubungan dengan kebijakan perekrutan untuk konstruksi proyek Tangguh, tak tampak adanya ketegangan sosial baik di Babo atau Bintuni.

Masih ada keprihatinan yang serius. Karena zona eksklusi keselamatan di sekitar kedua dermaga, nelayan dari RAV harus menempuh jarak lebih jauh untuk mencapai tempat mencari ikan pilihan mereka, dan sebagian melanggar zona itu. Tak ada budaya memelihara dan memperbaiki, sehingga jaring ikan yang robek atau mesin tempel yang rusak sering kali dibuang begitu saja. Terdapat banyak pendatang di desa-desa RAV. Penduduknya telah meningkat dari

lvilvilvi-

⁴⁸ Meskipun ada kemajuan ekonomi, Teluk Bintuni masih tertinggal dalam hampir semua indikator sosial dan ekonomi. Misalnya, di antara sembilan kabupaten di Papua Barat, Teluk Bintuni berada di urutan 8 dalam Indeks Pembangunan Manusia (yang mengukur tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf penduduk dewasa, rata-rata tahun berekolah, dan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan), dan urutan ke 8 dalam tingkat pendaftaran masuk sekolah dasar. Lihat Apendiks 9.

1.074 menjadi 2.153, dengan pertumbuhan terbesar ada di Onar sebesar hampir 300%. Banyak dari pendatang ini berbagi rumah atau menyewa rumah dari penduduk asli. Hal ini telah meningkatkan ketegangan atas sumber daya pertanian dan perikanan, pemerintahan desa, pengelolaan penduduk, dan isu sosial termasuk prostitusi, alkohol dan judi. Terdapat kegiatan komersial yang cukup penting, khususnya di Tanah Merah Baru, di mana banyak kios menjual berbagai makanan dan barang, dan ada banyak layanan ojek sepeda motor di seluruh desa yang dikendarai warga. Tetapi, banyak dari kegiatan ini dijalankan oleh warga pendatang.

Kestabilan politik di wilayah ini telah banyak meningkat. Selalu ada kemungkinan atas perubahan di masa mendatang, tetapi ada pengakuan bahwa provinsi Papua Barat akan tetap berdiri, ibukotanya tetap Manokwari, dan proyek Tangguh tetap akan berada di provinsi itu. Gubernur provinsi Papua maupun provinsi Papua Barat dan bupati sekarang dipilih melalui pemilu bebas. Di ketiganya, paling tidak, telah ada peningkatan dalam kinerja dan akuntabilitas dari para pejabat serta pemerintahannya.

Kondisi keuangan wilayah ini, seperti juga transparansi keuangan di tingkat nasional, juga telah meningkat dengan dramatis. Langkah pemerintah pusat terhadap otonomi daerah dan usahanya untuk menghadapi sentimen separatis di Papua melalui otonomi khusus telah mengakibatkan mengalirnya dana dalam jumlah besar ke provinsi itu, yang mulai menunjukkan hasil dalam pengeluaran kesehatan dan pendidikan dan dalam pembangunan infrastruktur. Tingkat kemiskinan di Papua, meskipun masih tertinggi di Indonesia, telah turun 10% menjadi sekitar 36%. Tahun 2009, total transfer dana akan mencapai hampir Rp 24 triliun. Ini seharusnya melebihi seluruh PDB Papua tahun 2002. Menjelang 2006, PDB Papua telah

lviilviilvii-

⁴⁹ Meskipun tingkat kemiskinan telah turun, masih saja tetap jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 15,4%. Lihat Apendiks 9.

Transfer ini dibagi antara kedua provinsi. Papua akan menerima sekitar Rp 17 triliun dan Papua Barat sekitar Rp 7 triliun. Papua Barat, dengan jumlah penduduk sekitar 26% dari jumlah total, akan menerima sekitar 29% dari transfer dana, sebelum penerimaan dari proyek Tangguh.

meningkat dua kali lipat menjadi hampir Rp 56 triliun, atau sekitar Rp 21 juta (lebih dari \$2.000) per kapita.⁵¹ Dengan berjalannya waktu, dengan aliran pendapatan ke provinsi dan kabupaten yang meningkat pesat, jelaslah bahwa pendapatan tambahan dari proyek Tangguh, meskipun substantial, persentasenya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah total untuk keseluruhan wilayah hukum.

Pemerintah pusat telah berusaha untuk membawa elemen tambahan berupa dukungan ekonomi afirmasi dan stabilitas ke Papua. Transfer dana telah meningkat pesat, baik melalui otonomi khusus maupun formula distribusi otonomi daerah yang berlaku di seluruh provinsi. Pada tahun 2008, Jakarta juga menegaskan bahwa otonomi khusus akan diterapkan secara setara terhadap provinsi Papua Barat dan bahwa, untuk saat ini, paling tidak, tak akan ada pemekaran lebih lanjut di Papua.

Dalam bidang keamanan, telah ada beberapa perkembangan yang positif. Pemerintah Indonesia dalam masa ini telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi kemungkinan penyalahgunaan oleh TNI dalam penyediaan keamanan dalam fasilitas industri. Ketika Panel mulai melaksanakan tugas, polisi baru saja terpisah dari TNI. Selama masa ini, pemisahan tersebut telah mengarah pada semakin berkurangnya militerisasi kepolisian. Hal ini tampak jelas dalam kunjungan Panel yang pertama, ketika Kapolda Papua I Made Pastika, yang kemudian menjadi gubernur Bali, menyampaikan kepada Panel bahwa reorganisasi polisi akan mengarah pada paradigma baru, di mana akan ada lebih banyak pengamanan berbasis masyarakat dan TNI hanya akan dipergunakan apabila ada ancaman serius.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Reformasi Militer tahun 2005, 52 tanggung jawab TNI untuk mengamankan semua "aset nasional yang vital" telah dihapus, dan keterlibatannya

Tahun 2009, PDB per kapita Papua Barat Rp 13 juta, dan PDB per kapita Papua Rp 23.8 juta. Lihat Apendiks 9. ⁵² Lihat Laporan Ketiga Panel (2005), hal. 10-11.

dalam kegiatan usaha sektor privat juga dikurangi. Di bawah Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, militer telah mengadopsi "kebijakan menghadapi pemberontakan" yang menghargai budaya lokal dan mengurangi kejadian yang berpotensi menjadi brutal dan pelanggaran HAM. Tentu saja, hal ini dapat berubah dan mungkin ada komandan wilayah yang tidak menerapkan peraturan ini secara penuh. Tetapi, untuk saat ini, paling tidak kebijakan nasional bergerak menuju arah yang tepat. ⁵³

Pemerintah Indonesia juga bergerak dengan pasti menuju transparansi dan akutabilitas dalam hal keuangan, dan berusaha mengurangi korupsi dan pemerasan oleh pejabat publik. KPK berhasil mendapatkan kembali aset negara senilai Rp 410 milyar (sekitar \$40 juta) dari kasus korupsi tahun 2008, hampir sepuluh kali lipat dari jumlah yang dapat didapatkan kembali oleh KPK tahun 2007. Pejabat pemerintah di seluruh Indonesia, termasuk Papua, ditangkap karena korupsi. Pada tingkat provinsi, juga ada usaha untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi, khususnya oleh Gubernur Suebu, yang menganggapnya sebagai prioritas. Meskipun demikian korupsi terus merupakan masalah serius di Papua dan Papua Barat, dan Transparency International cabang Indonesia belum lama ini mengungkapkan bahwa Manokwari merupakan kota terkorup ketiga di Indonesia.⁵⁴

Selain itu, di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jendral Perimbangan Keuangan sekarang mengumpulkan, menganalisa, dan mempublikasikan alokasi dari setiap sumber dari pengeluaran pemerintah, sehingga pihak luar dapat memantau dan menilai hasilnya. Panel baru-baru ini mendapat informasi bahwa Indonesia akan segera mengadopsi EITI, yang selanjutnya dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang proyek-proyek khusus, termasuk Tangguh.

lixlixlix-----

⁵³ Sebagai tambahan, ancaman dari kelompok radikal Islam di Papua sudah banyak berkurang, paling tidak untuk saat ini.

⁵⁴ ANTARA, 22 Jan. 2009.

Meskipun banyak yang telah berubah, Tangguh tetap merupakan proyek penting bagi Indonesia dan Papua. Memang proyek ini sungguh penting karena besarnya pendapatan devisa yang akan dihasilkannya, kesempatan dan manfaat yang diberikan bagi masyarakat Papua, dan lamanya waktu selama tahap operasi. Tetapi proyek Tangguh mungkin bahkan lebih penting lagi sebagai suatu preseden. Hingga saat ini, hanya sedikit perusahaan dari Barat yang menanamkan modal di Papua; pengalaman dari yang lain menunjukkan adanya banyak hambatan dan resiko kegagalan yang tinggi. Jika berhasil terus mengelola hubungannya dengan penduduk asli dan dampaknya terhadap lingkungan setempat, proyek Tangguh akan menunjukkan ke perusahaan di seluruh dunia bahwa investasi besar di Papua dapat meraih sukes dan investasi seperti itu dapat membawa manfaat bagi negara dan rakyatnya.

XI. Isu Utama Di Masa Depan

Meskipun telah ada perubahan dramatis di Papua dan Wilayah Teluk Bintuni sejak 2002, banyak isu yang sejak semula membuat Panel merasa sangat prihatin, sampai saat ini sedikit banyak masih tetap ada. Hanya sedikit sekali yang benar-benar telah sirna. Evolusi dari isu-isu ini jelas menunjukkan bahwa persoalan itu tampaknya akan tetap signifikan selama proyek Tangguh beroperasi. BP akan perlu sabar, waspada dan fleksibel dalam berusaha untuk menghindari masalah dan membangun lingkungan yang stabil dan mandiri di sekeliling proyek.

Isu-isu utama yang akan tetap akan ada untuk jangka panjang termasuk:

A. Ketegangan antara desa-desa pesisir uara dan selatan.

Tuntutan terkait dengan adat, terutama oleh warga desa pesisir utara, merupakan sumber ketegangan sejak dimulainya eksplorasi daerah itu oleh ARCO. ⁵⁵ Warga desa pesisir utara merasa bahwa mereka dapat menuntut pembayaran berdasarkan hak kepemilikan adat atas gas, lylyly

⁵⁵ Lihat, mis., Laporan Kelima Panel (2007), hal. 23 dan Laporan Ketiga Panel (2005), hal. 16.

yang sebagian terdapat di bawah tanah mereka. Ketegangan ini memburuk karena adanya manfaat yang besar, sesuai dengan ketentuan dalam LARAP, yang diberikan kepada RAV, yang semuanya ada di pesisir selatan. Pada awalnya, ada tuntutan bahwa BP membangun fasilitas LNG di pesisir utara, yang secara teknik tidak dimungkinkan, dan ada ancaman gangguan terhadap operasi. Baru-baru ini pimpinan adat meminta pembayaran dari BP dan pemerintah Indonesia. Panel sepenuhnya telah merekomendasikan bahwa BP perlu menegaskan bahwa isu ini haruslah diatasi oleh pemerintah, dan sebagai kontraktor, BP tak dapat berpaling dari ketentuan-ketentuan dalam PSC-nya. BP telah menuruti nasehat ini.

Sekarang tuntutan adat itu mungkin dapat diatasi, paling tidak untuk saat ini. Dalam pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan Bupati, telah tercapai kesepakatan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan dana \$600.000 bagi proyek infrastruktur di pesisir utara. Proposal untuk menggunakan dana itu telah diserahkan oleh Bupati untuk BPMigas, yang tengah berkonsultasi dengan departemen lain. Panel mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikannya. Terdapat komplikasi mengenai bagaimana pembayaran ini akan dibiayai. Tetapi, apabila dilaksanakan, ini pasti akan mengurangi salah satu sumber utama ketegangan antara warga pesisir utara dan selatan. BP harus bekerjasama secara penuh dalam setiap rencana pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini.

B. Ketegangan akibat migrasi masuk

Sejauh ini, ketegangan akibat migrasi masuk merupakan isu utama dalam RAV. Tak banyak migrasi masuk di pesisir utara DAV. Penduduk Onar telah meningkat hampir 300%, dan RAV lainnya juga tumbuh pesat. Sayangnya, kompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas dan, sedikit banyak, alkohol, prostitusi dan judi, juga merebak seiring dengan mengalirnya para pendatang. Meskipun ada usaha terus-menerus dari BP dan kontraktor-

kontraktornya untuk menekan tingkat migrasi masuk serendah mungkin, tetap saja ini terus terjadi dan kelihatannya besar kemungkinan pendatang tak akan dapat dikembalikan ke tempat asal mereka. Hal ini telah menimbulkan ketegangan sosial, dan memiliki potensi untuk meminggirkan sebagian warga desa yang merupakan penduduk asli.

Proses yang melibatkan pemerintahan desa dan Bupati untuk mengatur kegiatan pendatang sekarang ini sedang berlangsung. Peraturan ini akan mensyaratkan pendaftaran, penyerahan uang jaminan untuk biaya transportasi ke tempat asal pendatang, dan pembatasan jangka waktu tinggal serta kegiatan yang diperbolehkan, termasuk keikutsertaan dalam kegiatan pertanian dan perikanan.⁵⁶ Pimpinan pemerintah daerahlah, dan bukannya BP, yang harus memutuskan pembatasan apa, jika ada, yang perlu dikenakan atas para pendatang. BP harus meneruskan kegiatan proyek menuju tahap operasi dan hanya mencari pekerja dari pusat perekrutan yang berada di luar lokasi, dan tidak mempekerjakan pendatang dari DAV atau menjadikan warga DAV sebagai karyawannya kecuali kalau warga itu dari awal memang sudah terdaftar sebagai penduduk DAV. BP harus memastikan bahwa praktik ini juga diikuti oleh para kontraktornya. Melalui pemantauan ketat, BP harus berusaha untuk memastikan bahwa penggunaan CAP, dan program ISP lainnya, memberikan manfaat seluas mungkin kepada warga masyarakat asli dan mendukung mereka secara ekonomi. Masalah migrasi masuk mungkin akan berkurang sekarang setelah tak ada pekerjaan baru dalam konstruksi dan semakin sedikitnya kesempatan ekonomi baru di RAV.

lxiilxiilxii-

⁵⁶ RAV dan Babo, dan secara terpisah, kabupaten, telah membuat PERDA yang mengatur pembatasan untuk pendatang. Peraturan ini mencakup: keharusan mendaftar bagi pendatang dan membayar uang jaminan ke pemerintah (yang biasanya diartikan sebagai ongkos setara dengan biaya transportasi untuk pulang ke tempat asal mereka) untuk mendapatkan surat domisili sementara; larangan pendatang untuk membangun rumah nonpermanen atau permanen; dan larangan pendatang untuk memulai usaha (tetapi pendatang diperbolehkan berjualan di pasar dengan seijin pemerintah desa). "Usaha luar" juga biasanya dibatasi, mulai dari membangun fasilitas permanen tanpa ijin pemerintah desa, dan larangan memanen langsung hasil laut atau hutan (meskipun mereka boleh bertindak sebagai pembeli dari pedagang dan penduduk lokal).

Tetapi migrasi tetap akan terjadi di kabupaten secara umum dan di kota Bintuni, yang penduduknya telah meningkat dua kali lipat dari empat tahun terakhir menjadi sekitar 15.000. Peningkatan ini disebabkan sebagian besar karena ditetapkannya Bintuni sebagai ibukota kabupaten, dan bukan karena Tangguh. Bupati yakin bahwa penduduk yang makin beragam baik untuk wilayah itu secara ekonomi dan budaya. Sejauh ini, berbeda dengan yang terjadi di RAV, masuknya pendatang ini belum menimbulkan masalah serius seperti pengangguran, kriminalitas atau keresahan sosial. Meskipun mungkin tak ada konsensus mengenai kebijakan yang tepat terkait dengan migrasi masuk, bupati dan DPRD perlu menentukan dan mengelola dampaknya.

C. Keamanan dan HAM

Sejak awal, kekhawatiran terkait dengan masuknya TNI dan polisi ke daerah untuk menjaga fasilitas LNG, dan bagaimana mereka mungkin bertindak, sudah merupakan isu yang serius. Kekhawatiran ini tampaknya akan berlanjut selama tahap operasi. Upaya BP dalam rancangan dan pelaksanaan ICBS sejauh ini sudah berhasil. Dengan dukungan awal dari Panel, BP berhasil mendapatkan persetujuan regional dan nasional atas konsep ICBS dan, dengan kebijakan BPMigas, melaksanakan kesepakatan JUKLAP dengan polisi Papua. JUKLAP itu menggambarkan peran mereka masing-masing dan menggabungkan prinsip suka rela dan prinsip dasar penggunaan kekerasan dan senjata api oleh petugas penegak hukum dalam pelatihan HAM secara berkala seperti yang disyaratkan dalam kesepakatan itu. Petugas pengamanan masyarakat, yang berada di garis depan pembelaan dan hampir semuanya warga Papua, juga bekerja dengan efektif selama tahap konstruksi. Bentuk baru pengamanan ini menjadi model di Indonesia. Pemerintah Indonesia meminta perusahaan lain untuk memasukkan program serupa dalam PSC mereka dan meminta Freeport untuk mempertimbangkan pengamanan masyarakat juga.

Ada perubahan nyata dalam sikap dibandingkan tujuh tahun yang lalu, ketika banyak orang menyangka bahwa konsep ICBS tak akan berhasil. Tetapi tantangan akan meningkat dalam tahap operasi. Instalasi Tangguh sekarang merupakan target potensial bagi teroris dan keresahan sosial. Baik polisi maupun TNI akan perlu berjaga-jaga untuk melindunginya dari ancaman tertentu, meskipun lokasinya yang sulit dijangkau dan terpencil membuat ancaman itu berkurang. Karena ancaman yang baru dan berbeda yang dapat dihadapi oleh fasilitas itu sebagai pabrik LNG yang beroperasi, BP harus mengkaji ICBS, sejalan dengan kajiannya terhadap semua program ISP, untuk menentukan apakah diperlukan adanya perubahan. Kajian keamanan ini harus melibatkan konsultasi dengan personel keamanan BP Group yang senior atau pakar lain yang yang memiliki pengalaman di lokasi terpencil dan sulit dijangkau. Tinjauan itu harus mempertimbangkan kemungkinan tak terduga yang dapat terjadi di daerah terpencil seperti pembajakan tanker LNG atau serangan teroris terhadap fasilitas LNG

BP harus berusaha untuk berkonsultasi dengan lebih erat dengan TNI. BP telah bekerja dengan efektif sekali dengan polisi. Tetapi karena BPMigas mencapai kesepakatan atas kerangka kerja pengamanan hanya dengan Polri, maka tak ada kesepakatan formal (seperti JUKLAP) dengan TNI. Jadi TNI kurang berinteraksi dengan BP dan tidak berkewajiban untuk turut serta dalam setiap pelatihan HAM atau kegiatan pelatihan gabungan tahunan dan belum ada pelatihan yang melibatkan TNI dengan simulasi keadaan darurat yang sebenarnya.

Dari sekarang, semua personel keamanan yang terlibat dalam perlindungan untuk proyek Tangguh, termasuk personel TNI, khususnya yang ditempatkan di Bintuni atau Babo, harus diberikan tawaran dan dorongan untuk mengikuti pelatihan HAM. Sejauh ini, semua aparat keamanan yang berpartisipasi menyambut baik pelatihan HAM. Pelatihan ini juga telah disetujui

oleh LSM yang bergerak dalam bidang HAM di Papua, yang telah memuji BP untuk pelatihan yang disponsorinya bagi aparat keamanan.

Selain itu, TNI harus didorong untuk berpartisipasi dalam latihan gabungan tahunan sesuai dengan JUKLAP, seperti yang dilakukannya tahun lalu. Ini sudah terbukti sebagai mekanisme yang bermanfaat untuk membuat aparat keamanan terbiasa dengan kerangka kerja ICBS. Sejauh ini TNI belum berpartisipasi penuh dalam latihan-latihan ini, antara lain karena bukan merupakan pihak yang tercakup dalam JUKLAP. Sedapat mungkin, karena keduanya mungkin terlibat dalam pengamanan Tangguh, maka polisi daerah dan TNI harus berpartisipasi setiap tahunnya dalam latihan tahunan ini. Selain itu, pelatihan tahunan harus diperluas sehingga mencakup simulasi keadaan pengamanan darurat di fasilitas Tangguh. Ini merupakan hal penting dalam pelatihan yang efektif seperti yang ditekankan oleh Pangdam. Panel setuju. BP harus berkonsultasi dengan pejabat TNI dan BPMigas untuk mengajukan proposal ini. Meskipun partisipasi TNI dalam pelatihan ini mungkin akan menimbulkan keprihatinan di tingkat lokal, ini merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk memastikan bahwa TNI lokal dan regional memahami peran mereka dalam ICBS dan dalam keadaan darurat dan dapat menjalankannya dengan baik.

D. Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan Teluk Bintuni telah menjadi fokus utama Panel sejak dari awal, bahkan sebelum AMDAL selesai dibuat. Banyak tantangan dalam merancang, membangun dan mengoperasikan fasilitas LNG besar di daerah yang terpencil dan sensitif secara ekologi. BP telah berusaha untuk menghindari, menekan dan mengurangi dampak-dampak negatif lingkungan. AMDAL yang disetujui oleh pemerintah Indonesia menggariskan program yang tepat dan komprehensif yang mencakup persyaratan pemantauan lingkungan yang mengikat

secara hukum selama proyek Tangguh berjalan. Dalam tahap konstruksi, meskipun terjadi beberapa pelanggaran, BP telah melakukan pekerjaan yang patut dipuji untuk memenuhi komitmen AMDAL dan mengambil tindakan untuk melindungi lingkungan hidup.

Dengan masuknya proyek ke tahap operasi, dengan adanya tanker LNG di teluk dan operasi pencairan gas di pantai, maka resiko lingkungan hidup berpotensi untuk menjadi semakin besar. BP telah berkomitmen untuk memenuhi standar yang ketat, menerapkan prosedur pemantauan dan pengkajian yang akan mengidentifikasi dan mengatasi setiap masalah dengan cepat, dan berusaha terus untuk meningkatkannya. Karena konsekuensinya sangat serius, BP harus tetap waspada dan terus memantau dan mengendalikan kegiatan yang mungkin berdampak terhadap sumber daya tanah, air, atau udara. Selain itu, memelihara proses yang transparan, terbuka dan inklusif merupakan hal penting bagi keberhasilan lingkungan hidup yang berkesinambungan.

BP telah memutuskan untuk mengubah route perjalanan semua tanker LNG di sekeliling Cagar Laut Raja Ampat di bagian barat laut Papua, daerah dengan ekosistem yang sensitif yang juga merupakan rute penting bagi migrasi ikan paus. Dengan rute yang diubah ini perjalanan setiap tanker akan menjadi lebih jauh sekitar 550 km, sehingga biaya akan bertambah. Demikian juga, berdasarkan rekomendasi dari kajian Marine Mammals, rute kapal dari Babo menuju lokasi LNG juga telah diubah sehingga kapal bergerak lebih jauh dari pantai dan terbentuklah zona yang tak boleh dilewati untuk melindungi ikan lumba-lumba Sousa. Sesuai dengan rekomendasi Panel, telah dibuat rencana pemantauan dan pengelolaan jangka panjang bagi hewan mamalia dan reptil laut.

Selain itu, untuk menghindari dampak negatif, BP telah membuat kontribusi yang cukup besar bagi perlindungan dan peningkatan lingkungan hidup di wilayah itu dan di Papua pada umumnya. Sejak dari awal Panel telah mendorong usaha ini, yang secara kolektif disebut, Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati, yang mencakup:

- Pusat Pelatihan dan Konservasi Sumber Daya (CTRC), kemitraan yang melibatkan LSM internasional, pemerintah, dan universitas di Papua. CTRC dirancang untuk menyediakan saluran bagi pengembangan kapasitas konservasi terapan yang praktis melalui metode yang canggih dalam merangkul pejabat lingkungan hidup, LSM, masyarakat madani dan kalangan akademi. Proses ini mendorong Indonesia untuk belajar mengembangkan rencana pengelolaan konservasinya sendiri.
- Pengembangan Rencana Pengelolaan Cagar Alam Bakau Teluk Bintuni, dengan kemitraan bersama UNIPA, The Nature Conservancy, Conservation International, IPB, dinas-dinas daerah dari Departemen Perikanan, badan-badan pemerintah daerah, provinsi dan pusat, berbagai organisasi konservasi lainnya, dan kelompok masyarakat madani.
 Rencana itu telah diadopsi oleh Departemen Perikanan.
- Atlas Sumber Daya Teluk Bintuni, atlas penggunaan tanah regional yang dikembangkan dengan banyak masukan yang berhubungan dengan Papua dari masyarakat, universitas dan pemerintah.
- *Ecology of Papua*, karya komprehensif yang diterbitkan sebagai bagian dari seri *Ecology of Indonesia*, yang merupakan sumbangan besar dalam hal pengumpulan data dan pelestarian keanekaragaman hayati dari ekosistem Papua yang unik.

Selain itu, BP menyelenggarakan survei terhadap flora dan fauna terestrial serta mamalia dan reptil laut. Survei ini merupakan sumbangan penting bagi penguatan kapasitas organisasi konservasi yang bekerja di Papua, khususnya di daerah Teluk Bintuni, dan menyediakan data dasar yang berharga bagi program konservasi.

Tahun lalu, Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati sempat tertunda sementara sumber daya proyek Tangguh terfokus pada transisi menuju tahap operasi. Mengingat pentingnya dukungan BP bagi mitra lingkungan hidup yang banyak jumlahnya, dan perolehan penting yang selama ini telah tercapai dapat hilang jika ada kekosongan yang berkepanjangan, kembali Panel mendesak BP agar segera mengaktifkan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati. BP menerima rekomendasi ini tahun lalu. Isu-isu lingkungan hidup tertentu dibahas di atas dalam Bagian IX

Untuk masa mendatang, BP telah mengembangkan serangkaian Prosedur Operasional Standar Lingkungan Hidup (SOP) sebagai bagian dari Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup (EMS) yang tengah dirancang bagi kesiapan operasional.⁵⁷ EMS ditargetkan untuk memperoleh sertifikasi ISO 14001 sebelum akhir 2009. Panel telah menyetujui tujuan ini.

Selain itu, pemantauan lingkungan hidup eksternal akan dilanjutkan dengan berbagai cara. Pertama, Menteri Negara Lingkungan Hidup mengadakan kunjungan tahunan ke lokasi, dan mengaudit kepatuhan BP. BP juga menyerahkan laporan kepatuhan AMDAL kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dan pihak lain di Indonesia yang berwenang setiap enam bulan. Kedua, Panel Pemberi Pinjaman, atas nama ADB dan Bank Japan untuk Kerjasama Internasional (JBIC), melakukan tinjauan secara teratur dan mengeluarkan laporan kepatuhan lingkungan hidup yang dimuat dalam situs web ADB. Tinjauan ini akan terus dibuat sepanjang masa pinjaman (15 tahun).

E. Keselamatan

Keselamatan pribadi merupakan hal penting yang harus terus diperhatikan selama proyek berjalan. Tetapi, kinerja di masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Sistem yang

lxviiilxviiilxviii—————

⁵⁷ SOP ini mengatur kegiatan berikut: 1) Pemantauan pematuhan lingkungan hidup; 2) Pemantauan lingkungan hidup; 3) Pelaporan lingkungan hidup; 4) Limbah padat tidak berbahaya; 5) Limbah berbahaya; 6) Penyimpanan dan penanganan bahan bakar dan bahan kimia; 7) Pengelolaan limbah cair; 8) Analisa dan pengambilan sampel lingkungan hidup; 9) Perlindungan flora dan fauna; dan 10) Perlindungan hewan mamalila dan reptil laut.

teruji dengan baik, kewaspadaan setiap hari, dan personel yang terlatih secara menyeluruh merupakan hal yang penting. Proyek Tangguh selama tahap konstruksi hingga akhir tahun lalu telah menunjukkan kinerja keselamatan yang nyaris tanpa cacat. Sayangnya, pada tanggal 24 Mei 2008, terjadi kecelakaan pertama yang merenggut nyawa di proyek Tangguh. Meskipun sudah ada berlapis-lapis perlindungan fisik dan komunikasi, seorang insinyur Jepang, yang tak terlindungi dengan sempurna, jatuh melalui lubang di lantai yang terbuka karena kisi-kisinya dipindahkan, terjun sejauh 28 meter dan meninggal. BP, bersama dengan KJP, melakukan investigasi penuh, memutuskan sebab kejadian ini, dan telah melaksanakan pelatihan keselamatan yang baru bagi semua personel. Meskipun tercoreng oleh kejadian ini, kinerja keselamatan Tangguh selebihnya terus berada pada tingkat teratas. Luar biasa, pada saat Panel berkunjung di bulan Desember 2008, hanya ada delapan kasus "mangkir kerja selama beberapa hari" dalam proyek yang telah berjalan selama lebih dari 83 juta jam kerja sejak Maret 2005. Dalam lingkungan kerja, kewaspadaan yang terus menerus akan prosedur dan pelatihan keselamatan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi selama proyek berjalan.

F. Pembangunan yang Berkelanjutan

Jelas dari awal bahwa proyek Tangguh tak dapat menyediakan sumber penghasilan untuk jangka panjang bagi sejumlah besar warga di wilayah ini dan bahwa usaha asli yang sebelumnya telah ada di sana harus lebih dikembangkan . LARAP mensyaratkan adanya satu pekerjaan dalam tahap konstruksi bagi setiap rumah tangga di RAV, tetapi tak ada cukup banyak pekerjaan dalam tahap operasi bagi tenaga kerja lokal yang demikian banyak. Jadi, sejak awal BP telah menerapkan Strategi Pemerataan dan Penyebaran Pertumbuhan (DGS) seperti yang disyaratkan oleh AMDAL, dirancang untuk mendorong usaha kecil dan mengembangkan pembangunan ekonomi yang beragam dan berkelanjutan. BP kemudian juga membangun balai latihan kerja di

Aranday; terlibat dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan dari perikanan, tanaman utama yang menghasilkan uang; dan yang lebih luas, membangun BHBEP untuk mengembangkan kapabilitas sektor swasta di seluruh wilayah. Program-program ini, yang kesemuanya penting, menjadi semakin penting dalam masa mendatang mengingat demobilisasi yang terjadi di antara pekerja lokal dan terbatasnya kesempatan kerja dalam tahap operasi.

Rincian program-program ini, dan mitra pelaksananya, berubah dari waktu ke waktu. Tetapi secara keseluruhan, Panel terkesan dengan kemajuan yang berhasil dicapai di tengahtengah tantangan nyata dan fleksibilitas BP untuk memodifikasi program guna mendapatkan hasil yang baik. Mitra BP pada tataran lokal saat ini, SatuNama dan IPB, telah menunjukkan kreativitas dan fleksibilitas dalam usaha mereka untuk mengembangkan program yang efektif. SatuNama membuat kemajuan dalam peningkatan di bidang pertanian dan perikanan, IPB berfokus pada pengembangan usaha mikro. Hasil yang segera didapat baru sedikit, tetapi menjanjikan. Program-program saat ini dijabarkan dengan lebih luas dalam Bagian VI di atas. Sedangkan tentang program sosial/ekonomi yang dimulai dengan dasar dari bawah, diperlukan waktu dan usaha yang fleksibel dan terus-menerus agar dapat menghasilkan hasil yang berarti, dan hal ini telah disetujui secara penuh oleh Panel.

G. Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua

Dalam hampir setiap kunjungan, pimpinan Papua menekankan peran penting yang dapat dimainkan oleh Tangguh dalam pengembangan SDM Papua. Bagi banyak orang, ini adalah prioritas mereka yang pertama. Mereka mengkaji dengan baik perkembangan dari sumber daya fisik mereka sebagai kesempatan terbaik untuk mengembangkan SDM penduduk asli. Mereka ingin melihat warga Papua tak hanya sebagai manajer di Tangguh, tetapi juga proyek-proyek minyak dan gas di seluruh dunia. Ini juga merupakan visi Panel. AMDAL mensyaratkan agar

jumlah warga Papua yang mengisi posisi-posisi di proyek Tangguh selama tahap operasi meningkat terus dan pada akhirnya akan mencapai 100% dalam posisi ketrampilan, dan sejumlah besar posisi pengawas serta manajemen lainnya, dalam kurun waktu 20 tahun. Program pelatihan teknis BP di Bontang telah menghasilkan 54 teknisi Papua, yang sekarang bekerja di proyek Tangguh, sehingga BP dapat segera mencapai target tenaga kerja trampil.

Ini adalah awal yang bagus. Tetapi dalam pertemuan Panel dengan para pemuda Papua yang cemerlang ini, jelaslah bahwa diperlukan usaha jangka panjang yang komprehensif, yang meliputi juga komitmen dari manajemen senior. Untuk membantu keberhasilan mereka, hal ini harus mencakup program pelatihan bahasa Inggris yang dapat mereka ikuti. Karena berbagai alasan, BP akan kehilangan banyak dari teknisi ini seiring dengan berlalunya waktu. Jadi, BP perlu meyakinkan bahwa akan ada lebih banyak warga Papua yang dilatih untuk menduduki posisi ini. Karena itu manajemen BP haruslah mengadakan kajian tahunan mengenai kemajuan yang ada dan menentukan tindakan tambahan apa, jika ada, yang diperlukan untuk menjamin dipenuhinya hal ini. Agar ada fokus yang tepat untuk mencapai tujuan ini, penilaian kinerja tahunan manajer BP haruslah mempertimbangkan insentif dan penalti bagi yang berhasil atau gagal memenuhi target ini.

H. Pemerintahan

Pentingnya pembangunan kapasitas pemerintahan tak dapat ditawar-tawar sejak awal.

Pemekaran Papua Barat menjadi provinsi baru dan Teluk Bintuni sebagai kabupaten baru, yang berdiri tahun 2003, membuat kebutuhan ini lebih tajam fokusnya. Kinerja daerah ini dalam hal anggaran dan keuangan dan dalam membuat program akan menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa proyek Tangguh memberikan kontribusi secara efektif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial wilayah ini. Ada banyak tantangan dalam pembangunan

kapasitas ini; di kabupaten Bintuni saja terdapat 22 unit administrasi, tetapi hanya ada sedikit infrastruktur untuk unit-unit ini, dan selalu ada mutasi pejabat. Selain itu, hanya ada sedikit kapasitas masyarakat madani untuk mendorong pemerintahan yang baik. Padahal manajemen pemerintahan yang kuat dan transparan merupakan persyaratan bagi penyampaian program yang efektif, yang diperlukan kalau Tangguh ingin sukses.

Jadi, tak peduli betapa frustrasinya pada awalnya, BP harus mempertahankan usaha jangka panjang yang berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat madani. Ini diperlukan pada tiga tingkat yang berbeda: desa, kabupaten dan provinsi. Flexibilitas akan diperlukan dan mitra yang bermutu juga sudah pasti perlu. Untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan, melalui institusionalisasi kapasitas, program ini akan diperlukan sepanjang berlangsungnya proyek. Program pemerintahan BP digambarkan dengan lebih terinci dalam Bagian VII di atas.

I. Kesehatan

Program kesehatan BP telah menunjukkan bagaimana usaha lokal yang efektif dan ditargetkan dapat membuthkan hasil yang berarti dalam waktu singkat. Panel merasa sangat positif mengenai TCHU secara keseluruhan. Turunnya prevalensi malaria sangat nyata; tetapi cakupan imunisasi yang telah ditingkatkan, gizi, sanitasi dan pasokan air bersih juga telah meningkatkan kondisi kesehatan di DAV. Tetapi, dalam setahun terakhir juga terlihat bagaimana apa yang telah dicapai menjadi melemah, dan bagaimana mudahnya kemunduran terjadi. Selama bulan September dan Okober, epidemik diare rotavirus musiman yang serius terjadi kembali di pesisir utara DAV yang tadinya telah berkurang dalam tahun-tahun sebelumnya. Meskipun jumlah kasus tidak meningkat, 13 anak meninggal, lebih buruk dalam dua dari tiga tahun terakhir. Penyebab pasti kegagalan ini tidaklah terlalu jelas.

Tahun lalu TCHU mengalihkan kegiatannya ke yayasan regional, ASP, yang dibentuk tahun lalu untuk mengembangkan program ke daerah yang lebih luas dan untuk memperluas dasar donornya. Tak jelas bagi Panel apakah peningkatan dalam kematian akibat diare antara lain disebabkan karena peralihan dari TCHU ke entitas yang baru, yang mungkin mengurangi perhatiannya atas layanan kesehatan di DAV. Tetapi apakah ini merupakan kebetulan atau tidak, munculnya kembali epidemik diare ke pesisir utara DAV menunjukkan bahwa kemajuan yang telah dicapai dapat menjadi rapuh kecuali jika ada fokus yang terus menerus terhadap pembangunan institusi yang diperlukan untuk mempertahankan kemajuan ini.

Panel mendukung pengembangan TCHU ke daerah yang lebih luas. Tetapi pembentukan yayasan dan perluasan program ini seharusnya tidak harus mengorbankan kemajuan di DAV, yang harus merupakan fokus utama BP. Mempertahankan perolehan yang telah didapat di bidang yang kritis seperti kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama selama tahap operasi. Jadi, Panel merekomandasikan bahwa BP mengkaji alasan kemunduran itu dan mengambil langkah untuk memastikan bahwa apa yang telah dicapai sebelumnya dipulihkan pada tahun 2010 dan setelah itu dipeliharan.

HIV/AIDS terus meningkat dengan drastis di Papua. Tingkat prevalensi sekarang diperkirakan mencapai 2,4%, yang merupakan tingkat ketiga tertinggi di tingkat provinsi di Indonesia. Epidemik ini dapat menjangkiti sangat banyak orang jika tidak diperiksa. BP berpartisipasi dalam IBCA, yang tengah mempertimbangkan untuk mendirikan cabang di Papua tahun ini. BP juga mendukung LSM di Papua yang menyediakan layanan kepada kelompok beresiko tinggi dan melakukan program penyadaran HIV dan pencegahannya di Tangguh. BP harus berada di depan dalam upaya mendirikan cabang Papua dan memastikan bahwa IBCA

memberikan sumber daya yang cukup ke Papua. BP harus memberikan kontribusinya terus menerus akan sumber daya itu.

J. Pendidikan

Pendidikan dasar dan menengah adalah contoh lain dari kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas untuk jangka panjang jika murid-murid Teluk Bintuni ingin maju ke tingkat yang diperlukan untuk dapat bersaing dengan mereka yang berasal dari daerah lain di Indonesia, yang harus merupakan tujuan program ini, Tetapi, seperti program lain yang merupakan kewajiban pemerintah daerah, keberhasilan tidak hanya sekedar terhambat oleh sumber daya. Ini juga tergantung dari kapasitas pemerintah daerah dan kemauan konstituantenya. Hanya ada sedikit dukungan masyarakat atau kapasitas institusional, sehingga diperlukan upaya yang terus menerus dari semua tataran. Usaha awal tak dikoordinasikan dengan baik dengan pemerintah daerah. Kemajuannya lamban tetapi cukup berarti. Ketiga mitra pelaksana lokal, YPPK (Yayasan Pendidikan Katolik), YPK (Yayasan Pendidikan Kristen), dan Muhammadiyah (organisasi Islam), telah bekerja untuk mendukung kapasitas guru dan pasokan. British Council telah memfokuskan kegiatannya pada tingkat sekolah dasar dan menengah, yang telah memberikan hasil positif. British Council telah mengadakan pelatihan guru secara ekstensif, mencakup 71% dari sekolah di Teluk Bintuni, dan membangun standar bagi guru. British Council juga telah bekerja untuk meningkatkan kapasitas kantor pendidikan di kabupaten. Bentuk dukungan ini, apakah melalui mitra pelaksana ini atau yang lain, akan diperlukan untuk jangka panjang.

Panel telah bertemu dengan pimpinan universitas Papua dalam setiap kunjungan dan merasa terkesan dengan kemampuan mereka, tetapi juga dibuat sadar akan keterbatasan dan kebutuhan mereka. Beasiswa untuk Papua dan dukungan lain untuk universitas di Papua telah menjadi prioritas Panel sejak 2002. Meskipun tidak sebegitu urgen seperti program pendidikan

lokal, program ini dapat meningkatkan banyak orang Papua yang layak mendapatkannya dan mengidentifikasi Tangguh sebagai salah satu sumber pengembangan mereka. Panel terus mendesak BP untuk meningkatkan dukungan jangka panjangnya bagi program ini. Rincian lebih terinci tentang program pendidikan terdapat di Bagian VII di atas.

K. Mengelola Ekspektasi

BP sejauh ini telah memenuhi kewajiban AMDAL-nya dan banyak melaksanakan rekomendasi Panel untuk membawa manfaat yang nyata dalam hal kesehatan, air bersih, pendidikan, ketenagakerjaan yang berkelanjutan, dan kapasitas pemerintah bagi wilayah Teluk Bintuni. Meskipun ada beberapa keluhan tentang rincian, semua program ini telah memberikan banyak kemajuan dalam masa itu. Dalam pertemuan dengan pemimpin lokal tahun ini, terdapat sedikit keluhan dan banyak rasa terima kasih mengenai kemajuan ini. Tetapi dulu ada, dan sekarang masih ada, momentum pengharapan yang membuat BP dihakimi. BP tak akan dihakimi hanya dalam hubungannya dengan pengalaman Papua sebelumnya, khususnya dalam tingkat lokal. Proses konsultasi BP yang meningkat selama periode ini telah banyak membantu dalam menjelaskan rincian dan waktu penerimaan manfaat. Tetapi, meskipun ada konsultasi yang teratur, sering kali terdapat kebingungan atau salah pengertian, dan konsultasi seperti itu sendiri kadang-kadang meningkatkan ekspektasi dan mendorong tuntutan yang lebih besar.

Sementara proyek Tangguh berjalan menuju tahap operasi, ada kebutuhan untuk mendirikan institusi yang dapat bertahan lama yang akan memastikan dialog yang berkesinambungan dan teratur antara semua unsur pemangku kepentingan yang penting, termasuk masyarakat Teluk Bintuni, kabupaten lokal dan pemerintah provinsi, dan pemerintah Indonesia. Jadi, kebutuhan untuk berkonsultasi dan menjelaskan untuk membantu mengelola harapan di semua tataran akan berlanjut. Mungkin ini bahkan akan meningkat dalam waktu dekat

setelah tahap operasi dimulai, sebagai akibat pengurangan tenaga kerja lokal dan penundaan sebelum pendapatan berbasis Tangguh yang besar itu mulai mengalir ke wilayah itu. Jadi selain dari program informasi publik, BP harus terus berkonsultasi dengan pimpinan kabupaten dan provinsi serta warga setempat mengenai isu-isu tertentu ini dan terkait dengan manfaat yang diharapkan.

L. Tenaga Kerja dan Demobilisasi

Selama beberapa tahun, Panel telah menyoroti kebutuhan untuk memenuhi target tenaga kerja dari seluruh DAV dan warga Papua atau melampauinya, dan kemudian, untuk melakukan sosialisasi dan mengurangi efek demobilisasi. BP dan kontraktornya secara konsisten telah melebihi persyaratan dalam AMDAL mengenai tenaga kerja asal Papua yang harus mencapai 20%. Selama konstruksi, sejak 2005, warga Papua yang bekerja di sana telah mencapai 30%. ⁵⁸

Demobilisasi pekerja dari pekerjaan konstruksi akan selesai tahun 2009. Pada saat Panel berkunjung, tenaga kerja telah menurun menjadi kurang dari setengah, dari jumlah yang pernah mencapai 10.000 pada puncaknya hingga 4.600. Tenaga kerja warga Papua dan DAV telah menurun lebih cepat, antara lain, karena ketrampilan yang diperlukan dalam pekerjaan sementara konstruksi hampir selesai. Pekerja Papua di konstruksi itu menurun dari puncaknya lebih dari 3.400, atau hampir 40%, menjadi 1.300, atau sekitar 31%, bulan November 2008. Jumlah pekerja DAV telah turun dari puncaknya sejumlah 725, atau 13%, di bulan Juni 2006 hingga 186, sekitar 4,6%, ketika Panel datang berkunjung. Sejauh ini tak ada masalah serius sebagai akibat dari mobilisasi, meskipun ada yang dengan keliru mengatakan bahwa proyek Tangguh sengaja melepaskan pekerja lokal dengan lebih cepat.

Terdapat kesempatan kerja yang terbatas untuk pekerja yang berasal dari DAV setelah tahap konstruksi. Sekitar 75 pekerja yang telah dimobilisasi dipekerjakan untuk pekerjaan jangka lxxvilxxvilxxvi–

76

⁵⁸ Lihat Apendiks 8.

pendek di DAV, seperti dalam prakarsa air bersih dan perumahan. Akan ada kesempatan kerja dalam program pengamanan masyarakat dan penghijauan kembali. Yang lebih penting bagi jangka panjang adalah kebutuhan untuk meningkatkan ketrampilan warga Papua dan khususnya agar memperoleh ketrampilan yang diperlukan untuk menjadi manajer dan supervisor di pabrik LNG. KJP telah menyelenggarakan sesi pelatihan ketrampilan tingkat tinggi bagi 38 dari 40 warga Papua yang lulus kualifikasi semi-trampil untuk posisi gudang logistik. Selain itu 30 pekerja dari DAV terpilih untuk bekerja dengan kontraktor Harbor & Marine. BP dan kontraktornya perlu mengikuti semua keberhasilan awal ini dalam mempekerjakan karyawan yang dimobilisasi.

AMDAL mensyaratkan BP untuk mencapai target tenaga kerja DAV dan Papua selama tahap operasi. Target ini, yang berbeda bagi setiap tingkat ketrampilan, meningkat seiring berjalannya waktu, hingga menjadi 100%, kecuali posisi trampil dan manajer, 20 tahun setelah operasi dimulai. Sejauh ini, BP dan kontraktornya telah memenuhi persyaratan target warga Papua dalam tahap operasi, dengan mempekerjakan 555 warga Papua, atau 51% of dari angkatan kerja di tahap operasi awal. Tetapi tampaknya tak mungkin untuk memenuhi persyaratan bahwa pada awalnya dipekerjakan 100% tenaga non-trampil dari DAV; hanya 50 dari 121 posisi yang tak memerlukan ketrampilan yang saat ini diisi oleh pekerja dari DAV. Kesulitan dan pentingnya memenuhi target ini menunjukkan kebutuhan akan kajian tahunan dan komitmen pada tingkat tinggi. BP telah mendirikan Komite Pengarah Komitmen Papua untuk membantu mencapai target ini. Selain memenuhi target 100% DAV pada tahun 2009, Panel kembali mendesak BP untuk menyediakan dukungan manajemen terhadap kerja komite ini dan untuk mempublikasikan laporan publik setiap tahunnya mengenai tenaga kerja Papua dalam proyek itu.

lxxviilxxviilxxvii-

⁵⁹ Lihat Laporan Kelima Panel (2007), hal. 16, dan Laporan Keenam Panel (2008), hal. 10, untuk pembahasan tentang target AMDAL.

Tantangan terbatasnya tenaga kerja dan kesempatan ekonomi lainnya bagi warga Papua selain dari proyek Tangguh tetap menjadi isu serius dalam jangka panjang. Selain memenuhi target untuk pekerjaan yang berhubungan dengan proyek, tantangan ini harus diatasi melalui dukungan berkelanjutan bagi perikanan, pelatihan ketrampilan, proyek pengembangan infrasturktur, dan prakarsa pengembangan mata pencaharian yang terkait. ⁶⁰

M. Informasi Publik

Sejak awal, Panel telah mendesak BP untuk memperluas program komunikasinya, baik secara lokal atau lebih luas. BP telah menanggapi dan ada kemajuan yang telah dibuat, khususnya di Wilayah Teluk Bintuni, di mana terdapat banyak rintangan. Radio, buletin kwartalan *Tabura*, surat kabar bulanan, *Kabar dari Teluk*, papan buletin desa, dan selebaran buku komik semuanya berguna. Tetapi media ini, khususnya radio, perlu diperluas.

Belum lama ini, BP telah membangun keterlibatan aktif dengan media Papua dan memberikan pelatihan untuk mereka, yang akan memberikan liputan utama atas proyek itu, dan keterlibatan yang lebih terbatas dengan media nasional dan internasional di Jakarta. Hal ini bermanfaat. Dirasakan perlu, khususnya karena kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi masuknya orang asing, khususnya jurnalis, ke Papua. Keterlibatan ini harus diteruskan jika BP ingin mendapatkan liputan yang akurat tentang pencapaian proyek Tangguh atau apabila ada kejadian atau kecelakaan yang terjadi; dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kesalahan.

Dengan beroperasinya proyek LNG Tangguh, BP harus mengembangkan program informasi publik yang didukung penuh dan didanai dengan cukup, memanfaatkan sepenuhnya sarana informasi cetak dan elektronik. Program ini harus mempertimbangkan tingkat khalayak yang beragam: 1) masyarakat Teluk Bintuni: pesisir utara dan pesisir selatan; 2) Kabupaten

⁶⁰ Program terkait pada peningkatan ekonomi melalui pengembangan mata pencaharian dibahas terpisah dalam Bagian VI.

lxxviiilxxviii————

Teluk Bintuni: birokrat dan dewan perwakilan; 3) Gubernur Papua Barat, birokrat tingkat provinsi, DPRD di Manokwari; 4) masyarakat yang lebih terdidik di Manokwari; dan 5) pimpinan TNI dan polisi di Papua.

Pesan yang mendasar dari semua produk informasi publik adalah bahwa proyek Tangguh BP bukan hanya perusahaan bisnis semata. Proyek ini juga merupakan faktor yang banyak berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan di Indonesia, dan Papua Barat khususnya.

Rekomendasi

Ketegangan antara penduduk desa pesisir utara dan selatan

40. BP harus bekerja aktif dengan bupati dan pemerintah Indonesia dalam usaha untuk mempercepat bantuan dari pemerintah Indonesia yang akan membantu menangani tuntutan adat dari warga desa pesisir utara.

Migrasi masuk

- 41. Untuk mencegah migrasi masuk lebih jauh, BP harus meneruskan praktiknya dalam tahap operasi dengan hanya mencari pekerja baru di pusat rekrutmen yang terletak di luar lokasi. Selain itu, BP jangan mengambil pegawai dari DAV, atau, berdasarkan kewajiban AMDAL, mencari pegawai yang memenuhi syarat dari warga DAV yang bukan merupakan orang dari keluarga yang dulu terdaftar dalam sensus DAV tahun 2002. BP juga harus mensyaratkan kontraktornya untuk memenuhi praktik ini.
- 42. Selama masa berlakunya ISP, BP harus memantau program-programnya dengan teratur untuk memastikan bahwa penggunaan dana CAP, dan prakarsa ISP lainnya terus memberikan manfaat bagi penduduk asli dan mendukung mereka secara ekonomi.

Keselamatan

43. Keselamatan haruslah tetap menjadi prioritas utama. BP harus terus menerus mempertahankan kewaspadaan akan prosedur keselamatan, pelatihan dan disiplin untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama berjalannya proyek Tangguh ini.

Pengembangan SDM Papua

44. Salah satu hal yang terpenting dari kewajiban AMDAL BP adalah bahwa proyek Tangguh harus dijalankan hampir semuanya oleh masyarakat Papua dalam waktu 20 tahun. Untuk memastikan bahwa komitmen ini dipenuhi seluruhnya, manajemen BP harus mengadakan kajian tahunan untuk menentukan tindakan tambahan apa, jika ada, yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan target ketenagakerjaan sesuai dengan AMDAL. Agar

manjemen berfokus pada pencapaian tujuan ini, penilaian kinerja tahunan dari para manajer BP harus mencakup insentif atau penalti apabila mereka berhasil atau gagal dalam memenuhi target ini.

Tenaga kerja dan demobilisasi

- 45. BP harus terus menyediakan pekerjaan sebanyak mungkin dalam tahap operasi atau melalui kontraktornya bagi pekerja yang dimobilisasi. Dukungan harus diberikan bagi para pekerja itu melalui program pengembangan mata pencaharian lainnya.
- 46. BP harus menyediakan dukungan manajemen bagi kegiatan Komite Pengarah Komitmen Papua untuk memastikan bahwa semua target tenaga kerja Papua dan tenaga kerja setempat bagi tahap operasi terpenuhi. BP harus mengeluarkan laporan publik tahunan mengenai tenaga kerja Papua dalam proyek ini.

Informasi publik

47. BP harus mengembangkan program informasi publik yang mantap yang mencakup baik media cetak maupun elektronik dan juga memperluas sarana media, khususnya radio, yang sekarang ini digunakan oleh proyek. Program ini harus ditargetkan bagi berbagai pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah di Teluk Bintuni dan Papua serta harus menekankan kontribusi proyek bagi pembangunan di wilayah Teluk Bintuni, Papua Barat dan Indonesia.

XII. TIAP 2

TIAP telah bekerja sejak Maret 2002. Panel akan mengakhiri tugasnya menyusul publikasi laporan ini dan pertemuan umum di Washington, D.C. dan London pada bulan Mei. Akan tetapi tinjauan eksternal atas proyek Tangguh akan terus berlanjut.

BP telah mengumumkan bahwa ia akan mengangkat sebuah Panel Penasehat Independen Tangguh 2 (Tangguh Independent Advisory Panel 2 atau TIAP 2) yang baru, yang akan bekerja selama lima tahun. BP telah menyatakan bahwa "fokus TIAP 2 adalah untuk menawarkan pertimbangan kepada BP mengenai perkembangan, dan penyelenggaraan proyek Tangguh, yang berhubungan dengan aspek nonkomersial dari proyek – tanpa meniru prosedur peninjauan eksternal independen yang ada."

Panel Pemberi Pinjaman, yang dibentuk oleh ADB dan JBIC, akan terus mengunjungi lokasi LNG dan Wilayah Teluk Bintuni untuk melaporkan isu-isu lingkungan hidup yang berhubungan dengan ketentuan pinjaman, dan mengenai pemukiman kembali dan isu-isu program sosial terpadu selama 2009.

Panel menghargai keputusan BP dalam memperluas pengawasan independen eksternal dan akan mengikuti kegiatan dan laporan TIAP 2 dan Panel Pemberi Pinjaman dengan penuh perhatian.

Panel juga berterimakasih kepada para staf BP, di London, Washington, dan terutama di Indonesia. Selama keberadaan Panel, mereka telah bekerja dengan tekun dan bersungguhsungguh agar kerja Panel tetap efektif, seksama, dan akurat. Banyak pertanyaan diajukan mengenai informasi dan berhubungan dengan masyarakat atau lokasi yang ingin dikunjungi oleh Panel, dan semuanya telah dijawab dengan penuh. Terlebih penting, Panel telah dijanjikan

kebebasan dan janji itu telah dipenuhi. Semua keputusan Panel dibuat oleh para anggotanya, yang bertindak dengan pertimbangan yang bebas seutuhnya.

Akhirnya, Panel ingin menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat Papua dan Teluk Bintuni, baik para pemimpinnya maupun masyarakatnya, yang menyambut Panel pada setiap kunjungan dengan keramah-tamahan dan kehangatan. Setiap anggota Panel akan selalu menyimpan kenangan yang menyenangkan terhadap penduduk asli yang mereka temui pada setiap kunjungan. Panel mengakhiri laporan ini dengan optimis bahwa proyek Tangguh akan memberikan banyak keuntungan terhadap wilayah ini dan akan lebih meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

APENDIKS

APENDIKS 1

PETA PAPUA BARAT



PETA PROVINSI PAPUA



APENDIKS 2

INDIVIDU DAN BADAN YANG MEMBERIKAN KONSULTASI

KONSULTASI DI TAHUN 2008 DITULIS DALAM HURUF TEBAL

Pejabat Pemerintahan: Indonesia

Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian

Dr. M. Lobo Balia, Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

H.E. Soemadi Brotodiningrat, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat*⁶¹

Edi Butar-Butar, Hubungan Pers, Departemen Pertahanan

N.T. Dammen, Kuasa Usaha, Kedutaan Indonesia di London*

Tedjo Edmie, Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Departemen Pertahanan

Ibnu Hadi, Konselor, Divisi Ekonomi, Kedutaan Indonesia di Washington, D.C.*

Djoko Harsono, Penasehat Eksekutif, BPMIGAS

A. Edy Hermantoro, Direktur Pengawasan Usaha Hulu Minyak dan Gas, BPMIGAS Dodi Hidayat, Wakil Operasi, BPMIGAS

R. Ir. Pos Marojahan Hutabarat, MA, Penasehat Ekonomi untuk Menteri Pertahanan

Mohamad Ikhsan, Penasehat Senior, Menteri Koordinator Perekonomian

Sri Mulyani Indrawati, Ketua Bappenas*

Gellwynn Jusuf, Penasehat Sosial Ekonomi, Departemen Kelautan dan Perikanan

Kadjatmiko, Sekretaris, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan

Manuel Kaisepo, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia*

Ahmad Kamil, Deputi Urusan Dalam Negeri, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Koordinasi Perekonomian*

Bonnie Leonard, Departemen Pertahanan

Nabiel Makarim, Menteri Negara Lingkungan Hidup*

Andi Mallarangeng, Juru Bicara Presiden Yudhoyono

Mardiasmo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan

Mardiyanto, Menteri Dalam Negeri

Albert Matondang, Deputi Urusan Kebijakan Luar Negeri, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

Mohammad Ma'ruf, Menteri Dalam Negeri*

Agung Mulyana, Direktur, Departemen Dalam Negeri

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan

Dr. Daeng Mochamad Nazier, Direktur Jenderal, Departemen Dalam Negeri

A. Sidick Nitikusuma, Penasehat Eksekutif Senior, BPMIGAS*

Freddy Numberi, Menteri Kelautan Perikanan

Progo Nurdjaman, Sekretaris Umum, Departemen Dalam Negeri

I Made Pastika, Kapolda Bali, dahulu Kapolda Papua *

R. Priyono, Ketua, BPMIGAS

Agus Purnomo, Asisten Khusus untuk Menteri Negara Lingkungan Hidup

⁶¹ * menunjukkan bahwa ia sudah tidak menjabat posisi itu lagi

Mayjen Setia Purwaka, Kepala Bagian Papua untuk Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan *

Yanuardi Rasudin, Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup

Lt. Gen. Agustadi Sasongko, Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

Maj. Gen. Romulo Simbolon, Deputi Urusan Pertahanan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

Dr. Sodjuangon Situmorang, Direktur Jenderal Administrasi Publik, Departemen Dalam Negeri

Djoko Soemaryono, Sekretaris Umum, Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan Mardiasmo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan

Dr. Heru Subiyantoro, Direktur Jenderal, Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan, Departemen Keuangan

Widodo Adi Sucipto, Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan

Dr. Ir. Sudarsono, Direktur Jenderal Dalam Negeri

H.E. Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan

Rachmat Sudibjo, Ketua, BPMIGAS*

Yoga P. Suprapto, Manajer Proyek, Pertamina*

Benny P. Suryawinata, Wakil Asisten Urusan Luar Negeri untuk Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan*

Dadi Susanto, Direktur Jenderal Strategi Keamanan, Departemen Pertahanan

Budi Susilo, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Departemen Pertahanan

Dr. I Made Suwandi, Menteri Dalam Negeri

Iin Arifin Takhyan, Direktur Umum Migas, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral* Alex Bambang Triatmojo, Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

Budi Utomo, Deputi Bidang Keamanan Nasional, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

Kardaya Warnika, Ketua, BPMIGAS*

Ir. Rachmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Hidup

General Yudhi, Wakil Ketua, LEMHANAS*

Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan*

Jenderal (purn.) Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia

Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Jenderal Nurdin Zainal, Panglima Komandan Daerah Militer, Papua*

Pejabat Pemerintahan: Papua

Abraham O. Atururi, Gubernur Papua Barat

Colonel Max D. Aer, Kepala Operasi Polda Papua*

Agus Alua, Ketua MRP dan anggota MRP

Decky Asmuruf, Sekretaris Gubernur Papua*

Frans Nikopas Awak, Camat Babo

Kol. Inf. Chairuly, Asisten PANGDAM bidang Intelejen

Irjen Pol. Drs. FX. Bagus Ekodanto, KAPOLDA Papua

Y. Berty Fernandez, Pejabat Gubernur, Provinsi Papua

Kol. Inf. Herunimus Guruh, Asisten PANGDAM bidang Operasi

Deky Kawab, Wakil Bupati Bintuni

John Ibo, Presiden, Majelis Provinsi

Ibrahim Kaatjong, Wakil Gubernur Papua Barat

Jimmy Demianus Ijjie, Ketua DPRD Irian Jaya Barat dan anggota DPRD

Pak Mandagan, Bupati Kapupaten Manokwari

Pak Mandowen, Presiden Dewan Perwakilan Manokwari

Daud Mandown, Ketua DPRD, Irian Jaya Barat

Dr. Alfons Manibui, Bupati Bintuni

Pak Paquil, Wakil Bupati Bintuni

Kolonel Molosan, Wakil Jenderal Simbolon (selama penugasan Jenderal Simbolon sebagai Komandan Regional TNI di Papua)

Mayjend. TNI A.Y. Nasution, PANGDAM

Bernard Nofuerbanana, pemimpin Adat Babo

Letkol. Yohanes Nugroho, Kepala Polisi Resor Bintuni

Let. Daniel Pakiding, Kepala Polisi Resor Babo

Kol. Heru Teguh Prayitno, Kepala Pembinaan Kemitraan, Berau

Kapten Puryomo, Komandan Distrik Militer

ML Rumadas, Wakil Sementara Gubernur Irian Jaya Barat*

Jaap Solossa, Gubernur Provinsi Papua*

Barnabas Suebu, Gubernur Provinsi Papua

Kolonel Suarno, Direktur Keamanan Polda Papua*

Brig. Gen. Pol. Dody Sumantiawan, Kapolda Papua*

Frans A. Wospakrik, M.Sc., Wakil Ketua MRP

Irjen. Tommy Yacobus, Kapolda Papua

Mayjen Zamroni, Komandan Daerah Militer

Pejabat Pemerintahan Kabupaten Bintuni

Ketua, Panitia Keamanan

Direktur Perencanaan untuk Manokwari, dan beberapa pejabat senior Manokwari lainnya

Pejabat Pemerintahan: Amerika Serikat

Hans Antlöv, Penasehat Pemerintahan, Program Dukungan Pemerintahan Daerah, Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID)

H.E. Ralph Boyce, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia*

Karen Brooks, Direktur Urusan Negara Asia, Dewan Keamanan Nasional*

Christopher Camponovo, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Tenaga Kerja

Matthew Cenzer, Sekretaris Kedua, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Michele Cenzer, Asisten Pejabat Urusan Budaya, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

Marc L. Desjardins, Konselor Urusan Politik, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

Judith Edstrom, Ketua Partai/Direktur, Program Dukungan Pemerintahan Daerah, USAID

Nadine Farouq, USAID

Faye Haselkorn, Penasehat Senior Pemerintahan Daerah, Program Dukungan Pemerintahan Daerah, USAID

William A. Heidt, Konselor Ekonomi, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta James M. Hope, Direktur, Kantor Pendidikan, USAID Indonesia

Richard Hough, Direktur Program, USAID

H.E. Cameron Hume, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia

Karin Lang, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik, Kantor Indonesia dan Timor Timur

Allan D. Langland, Wakil Direktur, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik, Kantor Indonesia dan Timor Timur

Jon D. Lindborg, Wakil Direktur, USAID

Walter North, Direktur Misi, USAID Indonesia

Kantor Urusan Kelautan Asia Tenggara (Brian McFeeters, Wakil Direktur; Donald Mattingley, Pejabat Untuk Indonesia)

Anne Patterson, USAID

Richard Pedler, Penasehat Komunikasi, Program Dukungan Pemerintahan Daerah, USAID

H.E. B. Lynn Pascoe, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia*

Maria Pica, Penasehat Senior, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Tenaga Kerja

Fred Pollock, Direktur, Program Manajemen Sumber Daya Alam, USAID

Henry ("Hank") M. Rector, Sekretaris Utama, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

Geoffrey Swenson, Penasehat Operasi Lapangan, Program Dukungan Pemerintahan Daerah, USAID

Michael Uyehara, Pejabat Energi dan Sumber Daya Mineral, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

Kurt van der Walde, Pejabat Energi dan Sumber Daya Mineral, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

Shari Villarosa, Konselor Ekonomi, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

John Wegge, Penasehat, Kantor Pemerintahan Daerah Terdesentralisasi, USAID

Holly Wise, USAID

Pejabat Pemerintahan: Inggris

H.E. Richard Gozney, Duta Besar Inggris untuk Indonesia*

H.E. Martin Hatfull, Duta Besar Inggris untuk Indonesia

H.E. Charles Humphrey, Duta Besar Inggris untuk Indonesia*

Eleanor Kiloh, Sekretaris Kedua (Politik), Kedutaan Besar Inggris di Jakarta

Theresa O'Mahony, Sekretaris Kedua (Politik), Kedutaan Besar Inggris di Jakarta

Matthew Rous, Wakil Kepala Misi, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta

Jonathan Temple, Kedutaan Besar Inggris di Washington, D.C.

Pejabat Pemerintahan: Selandia Baru

H.E. Chris Elder, Duta Besar, Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta

Pejabat Pemerintahan: Cina

Ma Jisheng, Konselor (Politik), Kedutaan Besar Cina di Jakarta

Tan Weiwen, Konselor (Ekonomi dan Komersial), Kedutaan Besar Cina di Jakarta

Xu Qiyi, Sekretaris Kedua (Ekonomi dan Komersial), Kedutaan Besar Cina di Jakarta

Penduduk Kawasan Kepala Burung di Papua

Pak Biam, Camat Aranday, dan pemimpin desa Aranday

Marselinus Nanafesi, kepala desa Tomage

Jaelani Kabes, kepala desa Otoweri

Saleh Masipa, kepala desa Tanah Merah Baru

Mathias Dorisara, kepala desa Tofoi

Abdul Kadir Nabi, kepala desa Pera-pera

Soleman Solowat, sekretaris desa Pera-pera

A. Kadir Kosepa, kepala desa Tomu

Najib Alkatiri, pemimpin masyarakat desa Ekam

Otto Siwana, kepala daerah Sumuri

Adrianus Sorowat, staf dari daerah Weriagar

Salehudin Fimbay, staf dari derah Tomu

I. Maneiri, Babo

Tamatan program pelatihan teknis LNG BP di Bontang: AB Korano Mirino, Eko

Muhammad Taher Bauw, Evert, Haris Rumbaku, Jonadap Dominggus Stepanus Sapari, Soleman Saflafo, Steffi Edithya Florence Awom

Neles Tebay, Pendeta Katolik dari Keuskupan Jayapura

Pemimpin desa Babo

Pemimpin desa Tanah Merah

Pemimpin desa Tomu/Ekam

Penduduk Aranday

Penduduk Onar Baru

Penduduk Saengga

Penduduk Tanah Merah, termasuk panitia yang mengawasi dampak proyek Tangguh

Penduduk Taroy

Penduduk Tofoi

Penduduk Tomu/Ekam

Penduduk Weriagar/Mogotira

Lembaga Swadaya Masyarakat

American Center for International Labor Solidarity (Timothy Ryan, Direktur Program, Kawasan Asia)

Amnesty International (Charles Brown; Lucia Withers)

Asia Foundation (Rudi Jueng, Asisten Direktur)

Pastur Paul P. Tan

Dr. M. Gemnafle

BPR Pt. Phidectama Jayapura (Bram Fonata, Direktur)

British Council (Wendy Lee, Penasehat Perkembangan Sosial; Toto Purwanto, Manajer Program, Manajemen Pendidikan & Pemerintahan; Peter Hagul, Bidang Pemantauan dan Evaluasi; Fajar Anugerah, Bidang Program)

Gereja Katolik (B.R. Edi)

Center for Human Rights at the RFK Memorial (Miriam Young; Abigail Abrash Walton)

Citizens International (John Wells)

CTRC (Bas van Helvoort, Direktur Eksekutif)

Conservation International (Barita Oloan Manullang, Spesialis Senior Konservasi Satwa; Jatna Supriatna, Direktur Eksekutif dan Wakil Presiden Regional untuk Indonesia; Yance de Fretes, Spesialis Satwa Papua; Iwan Wijayanto, Direktur Kemitraan)

Down to Earth (Liz Chidley)

ELSHAM (Aloysius Renwarin, Direktur; Ferry Marisan; Yery Baransano)

Earthwatch (Coralie Abbott, Manajer Program Korporasi)

Eddy Ohoirwutun, Konsultan Adat

FKIP Universitas Cenderawasih (Dr. Leo Sagisolo)

FOKKER (Yuven Ledang, Ketua Panitia Pengarah; Septer Menufandu, Sekretaris Eksekutif,

Budi Setiyauto, Sekretaris Eksekutif; Yul Chaidir, Panitia Pengarah; Robert Mondosi, Panitia Pengarah)

Human Rights Watch (Mike Jendrzejczyk)

Komisi HAM GKI (Obeth Rawar)

IBLF, The Prince of Wales International Business Leaders Forum (Lucy Amis, Manajer Program Bisnis dan Hak Asasi Manusia)

Indonesia Human Rights Network (Edmund McWilliams)

International Committee of the Red Cross (Frank Sieverts, Asisten Kepala Delegasi Regional, Amerika Utara)

International Crisis Group (Sidney Jones, Direktur Proyek Indonesia; Kathy Ward, Wakil Direktur ICG)

International Labor Organization (Tony Freeman)

International Labor Rights Fund (Dr. Bama Athreya)

Komnas HAM Perwakilan Papua (Alberth Rumbekwan, Ketua Eksekutif)

LP3BH – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (Christian Warinusi, Direktur; Andris Wabdaro)

LBH HAM Papua – Sorong (Sonratho J Marola, Direktur)

LP3AP – Jayapura (Selviana Sanggenafa, Direktur)

National Democratic Institute for International Affairs (Blair King)

Komnas HAM (Frits Ramandey, Ricky Kogoya)

The Nature Conservancy (Ian Dutton, Country Director untuk Indonesia; Titayanto Pieter, Manajer Kemitraan Konservasi, Arwandrija Rukma, Direktur Operasional)

Dewan Presidium Papua (Thom Beanal, Willy Mandowen)

Proyek Pesisir (Coastal Resources Project) (Maurice Knight, Ketua Partai, Proyek Manajemen Sumber Daya Pesisir)

Pt. PPMA Jayapura (Edison Giay, Direktur)

Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia (Suparman Marzuki, Direktur)

Pusat Studi HAM Universitas Negeri Cenderawasih (Frans Reumi, Direktur)

SKP Sekretariat untuk Keadilan dan Perdamaian (Budi Hermawan, Koordinator)

TAPOL, The Indonesia Human Rights Campaign (Danny Bates)

UK Overseas Development Institute (Michael Warner)

US-ASEAN Council (John Phipps)

West Papua Association UK (Linda Kaucher)

Wildlife Conservation Society (Dr. Nicholas W. Brickle, Manajer Program)

World Wildlife Fund (Heike Mainhardt; Benja Victor Mambai; Clive Wicks)

YPMD Yayasan Pengembangan Masyarakat (Decky Rumaropen, Direktur)

Yayasan SatuNama (Wahyu Sadewo, Manajer Program; Sigit Wahyudi, Penyelia Program)

Sektor Swasta

AGI Security & Business Intelligence (Don Greenlees, Direktur, Riset dan Analisa)

Bank Pembangunan Asia (Edgar Cua, Country Director; Indonesia Resident Mission:

Adiwarman Idris, Jean-marie Lacombe, Ayun Sundari, Noraya Soewarno)

Chemonics (Jonathan Simon, Manajer Senior)

Citigroup International (Michael Zink, Citigroup Country Officer, Indonesia)

Halliburton KBR (John G. Baguley, Manajer Proyek)

Indochina Capital (Rick Mayo-Smith, Founding Partner)

International Finance Corporation (Juanita Darmono, Manajer Program, Hubungan

Migas/Tambang*; Carl Dagenhart, Manajer Program, Hendro Hadiantono, Pejabat Pengembangan Bisnis*)

ISIS Asset Management (Robert Barrington)

JGC Corporation (Tadashi Asanabe, Direktur Proyek)

JMSB-KMSB-SIME Consortium (Ron E. Hogan, Direktur Proyek)

Kiani Kertas (Jend. TNI (Pur.) Luhut Panjaitan MPA, Komisaris Presiden)

KJP (Okinari, Manajer Proyek)

Perform Project, RTI International (Ben Witjes, Penasehat Senior Kawasan PDPP)

YIPD/CLGI (Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah) (LeRoy Hollenbeck, Direktur Pengembangan Bisnis; Alit Merthayasa, Direktur Eksekutif; Endi Rukmo)

<u>Institusi Internasional</u>

United Nations Development Programme (Bo Asplund, UNDP Resident Representative in Indonesia; Shahrokh Mohammadi, Deputy Resident Representative; Gwi-Yeop Son, Senior Deputy Resident Representative; Kishan Koday, Program Officer-Unit Lingkungan; Abdurrachman Syebubakar, Program Office-Unit Inisiatif Komunitas; Dra. Judith P.C. Simbara MSi, Manajer Proyek Nasional, Capacity 2015; Reintje Kawengian, Institutional Development Specialist, Capacity 2015)

World Bank in Indonesia (Bert Hofman, Lead Economist; Andrew Steer, Country Director, Indonesia; Scott Guggenheim, Principal Social Scientist; Wolfgang Fengler, Senior Economist; Douglas Ramage, Senior Governance Specialist)

World Bank Support Office for Eastern Indonesia (Petrarca Karetji, Koordinator; Richard Manning)

Institusi Akademis di Papua

Institut Pertanian Bogor (Syaiful Anwar, Sekretaris untuk Program Studi, Departmen Pertanian)

UNIPA (Universitas Papua, Manokwari) (Frans Wanggai, Rektor; Fenny Ismoyo, Wakil Rektor; Marlyn Lekitoo, Wakil Rektor; dan Fakultas-fakultas)

Universitas Cenderawasih (Frans A. Wospakrik, Rektor, dan Fakultas-fakultas; dan B. Kambuaya, Rektor Sekarang)

Individu

John Aglionby, Koresponden, Financial Times

Herbert Behrstock, Konsultan Pengembangan Internasional

Laksamana Dennis Blair (purn.) Angkatan Laut Amerika Serikat, Ketua Komisi Indonesia, Pusat Tindakan Pencegahan, Dewan Hubungan Luar Negeri

Dr. Jonah Blank, Anggota Staf Profesional, Komite Senat Amerika Serikat untuk Hubungan Luar Negeri

Profesor Michael M. Cernea, Penasehat BP mengenai Pemukiman Kembali Tanah Merah Hugh Dowson

Bennett Freeman, Principal, Strategi Investasi Berkelanjutan

Brigham Montrose Golden

Bara Hasibuan, Intern, Dewan Perwakilan A.S., Komite Hubungan Internasional

Ayse Kudat, Penasehat BP mengenai Pemukiman Kembali Tanah Merah

Ismira Lutfia, Reporter, Jakarta Globe

Duta Besar Edward Masters, Ketua, Perkumpulan A.S.-Indonesia

John McBeth, Penulis Senior, The Straits Times

Gabrielle K. McDonald, Penasehat Hak Asasi Manusia untuk Freeport McMoRan Octovianus Mote

Gerry Owens, Panel Pemberi Pinjaman Eksternal

David Phillips, Anggota Senior dan Wakil Direktur dari Pusat Tindakan Pencegahan, Dewan Hubungan Luar Negeri

Ed Pressman

Gare Smith, Foley Hoag

Agoeng Wijaya, Koran Tempo

Arintoko Utomo, Panel Pemberi Pinjaman Eksternal

Pendeta Socrates Yoman, Presiden Perkumpulan Gereja Baptis

APENDIKS 3

FOTOGRAFI

Sebelum...











Sesudah...









Desa Saengga







Desa Saengga







APENDIKS 4
PELANGGARAN ZONA EKSKLUSI KEAMANAN

	<u>JUN</u>	<u>JUL</u>	AUG	<u>SEP</u>	<u>OCT</u>	<u>NOV</u>
Approach SEZ	19	11	3	15	4	3
Enter SEZ	10	25	8	59	40	13
Trespass	5	5	3	3	7	5
Total	34	41	14	77	51	21

CATATAN:

Mulai awal Juni 2008, BP mengadakan patroli laut gabungan bersama dengan Polisi Laut Bintuni. Patroli ini dilakukan pada tiga tahap:

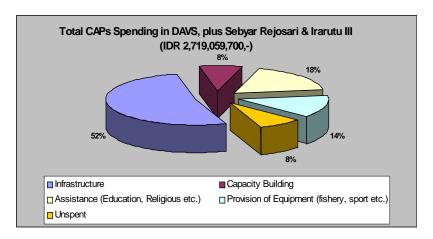
- *Tahap 1:* 18 Juni 17 Agustus 2008
- *Tahap 2:* 17 Oktober 16 Nopember 2008
- Tahap 3: 27 Nopember 2008 sekarang

Setiap tahap melibatkan enam petugas polisi yang diposisikan dalam Kapal Patroli BP. Seperti yang tampak pada grafik di atas, pelanggaran zona keselamatan menurun selama tahapan patroli gabungan.

APENDIKS 5

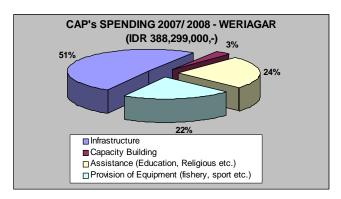
PENGGUNAAN DANA CAP UNTUK DESA

Total Pembelanjaan CAP



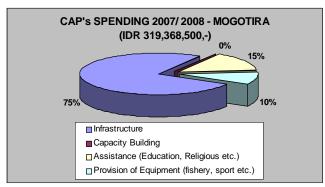
- 1. Tidak termasuk Tanah Merah dan Saengga
- 2. Alokasi Dana pada 2008: Rp 2.200.000.000
- 3. Total Pembelanjaan: Rp 2.719.059.700 (termasuk limpahan dari dana yang tidak terserap pada 2007)
- 4. Pembelanjaan untuk DAV adalah Rp 2.501.067.700 dan Non-DAV sebesar Rp 217.992.000
- 5. Limpahan dari dana yang tidak terserap pada 2007 sebesar Rp 519.059.700
- 6. Dana yang tidak dibelanjakan pada 2008 sebesar Rp 237.389.958

Pembelanjaan CAP 2008 untuk Weriagar dan Mogotira



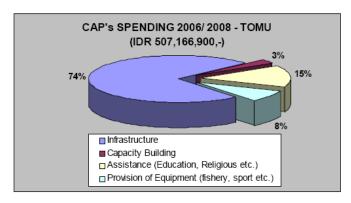
Catatan:

- Alokasi 2008: Rp 300.000.000
- Limpahan dari dana yang tidak terserap pada 2007: Rp 88.299.000
- Total Pembelanjaan Aktual 2008: Rp 388.299.000



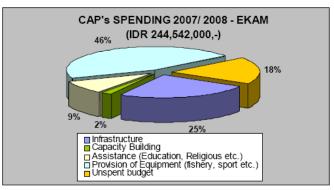
- Alokasi 2008: Rp 300.000.000
- Limpahan dana dari yang tidak terserap pada 2007: Rp 19.368.500
- Total Pembelanjaan Aktual 2008: Rp 319.368.500

Pembelanjaan CAP 2008 untuk Tomu dan Ekam



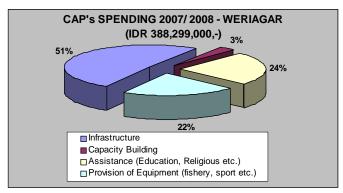
Catatan:

- Alokasi 2008: Rp 300.000.000
- Limpahan dari dana yang tidak terserap pada 2007: Rp 207.166.900
- Total Pembelanjaan Aktual 2008: Rp 507.166.900



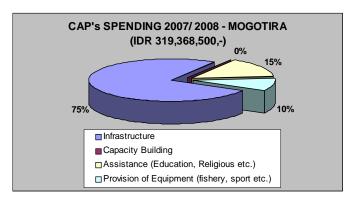
- Alokasi 2008: Rp 300.000.000
- Dana yang tidak terserap: Rp 55.458.900
- Perbaikan jalan setapak tertunda karena tidak tercapai kesepakatan masyarakat mengenai keberlanjutan dan perawatan.

Pembelanjaan CAP 2008 untuk Weriagar dan Mogotira



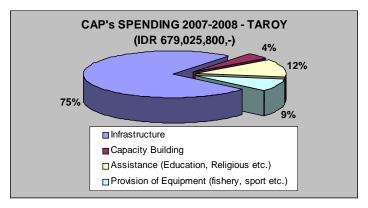
Catatan:

- Alokasi 2008: Rp 300.000.000
- Limpahan dari dana yang tidak terserap pada 2007: Rp 88.299.000
- Total Pembelanjaan Aktual 2008: Rp 388.299.000



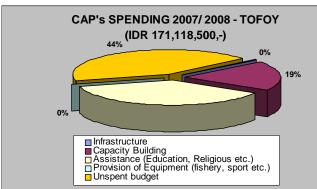
- Alokasi 2008: Rp 300.000.000
- Limpahan dari dana yang tidak terserap pada 2007: Rp 19.368.500
- Total Pembelanjaan Aktual 2008: Rp 319.368.500

Pembelanjaan CAP 2008 untuk Taroy dan Tofoy



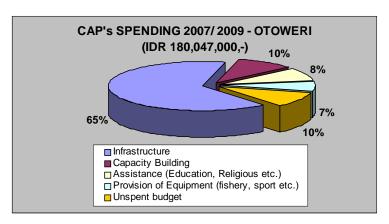
Catatan:

- Alokasi 2008: Rp 300.000.000
- Limpahan dari dana yang tidak terserap pada 2007: Rp 379.025.800
- Total Pembelanjaan Aktual 2008: Rp 679.025.800
- Selama periode 2006-2007 masyarakat Taroy terfokus pada program renovasi mesjid.



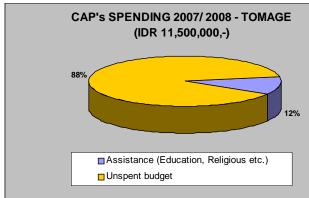
- Alokasi 2008: Rp 300.000.000
- Limpahan dari dana yang tidak terserap pada 2007: Rp 128.881.500
- Masyarakat mengajukan pinjaman untuk program kursus peternakan, akan tetapi mereka gagal bersepakat dalam hal pengembalian pinjaman. Program tersebut ditunda.

Pembelanjaan CAP 2008 untuk Otoweri dan Tomage



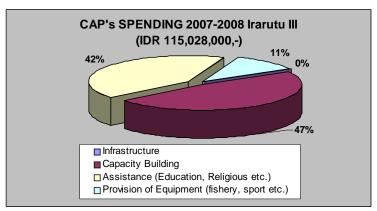
Catatan:

- Alokasi 2008: Rp 200.000.000
- Dana yang tidak terserap: Rp 19.953.000
- Masyarakat telah mengidentifikasikan program ketenagalistrikan, dan diskusi dengan PEMDA Fak Fak mengenai struktur kemitraan sedang berjalan.



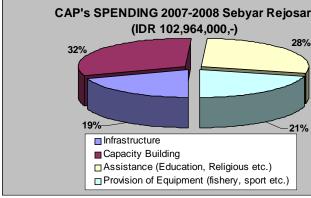
- Alokasi 2008: Rp 200.000.000
- Dana yang tidak terserap: Rp 88.500.000
- Pada periode 2007/2008 masyarakat telah mengidentifikasikan program renovasi gereja. Akan tetap program tertunda ke tahun 2009 akibat keterbatasan ang

Pembelanjaan CAP 2008 untuk non-DAV: Irarutu III dan Sebyar Rejosari



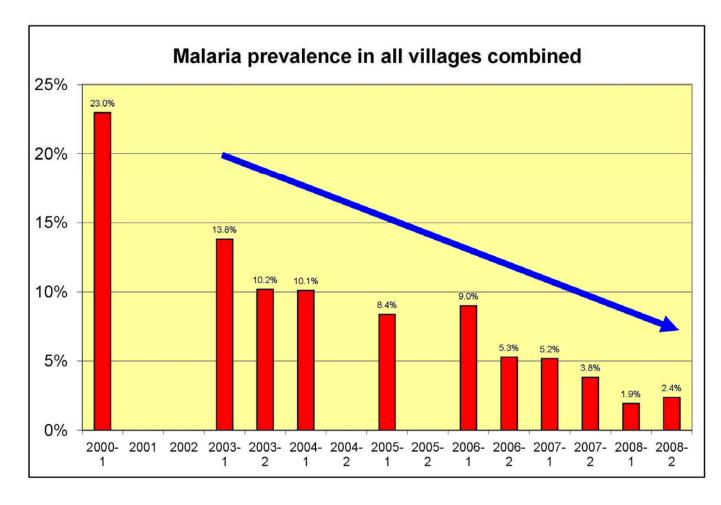


- Alokasi 2008: Rp 100.000.000
- Limpahan dari dana yang tidak terserap pada 2007: Rp 15.028.000

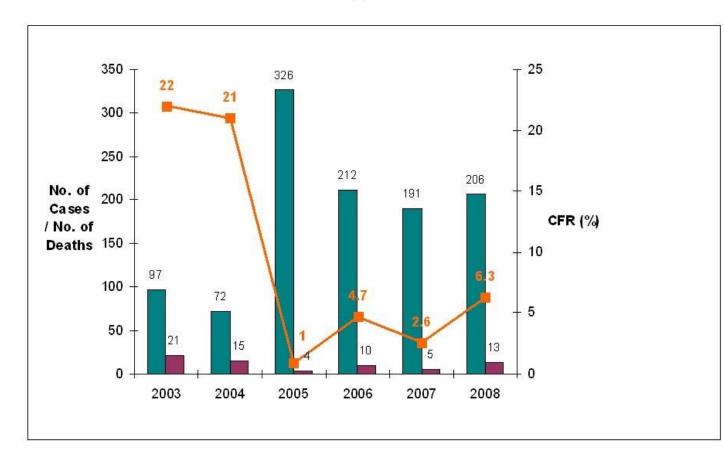


- Alokasi 2008: Rp 100.000.000
- Limpahan dari dana yang tidak terserap pada 2007: Rp 2.964.000

APENDIKS 6
STATISTIK PROGRAM KESEHATAN TCHU DI DAV



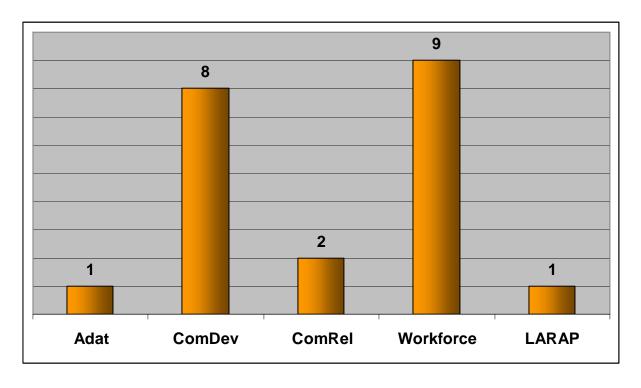
Rata-rata Kasus Balita Meninggal – Diare Akut DAV Tangguh 2003-2008



APENDIKS 7

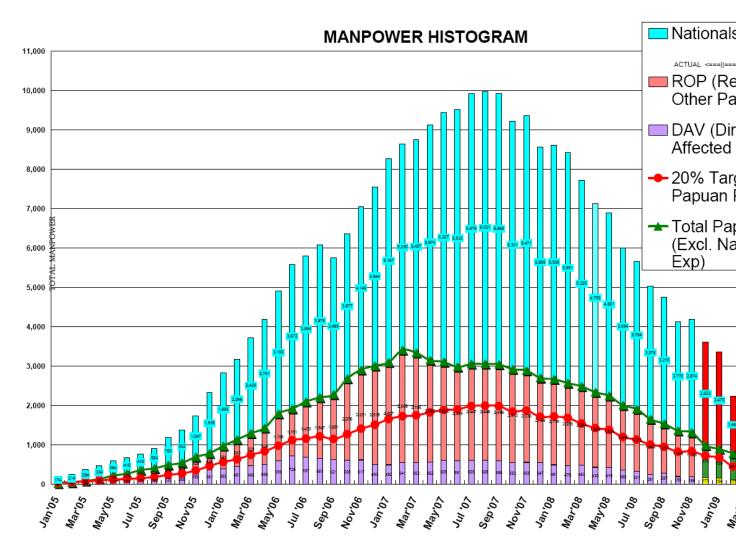
KELUHAN MASYARAKAT 2008

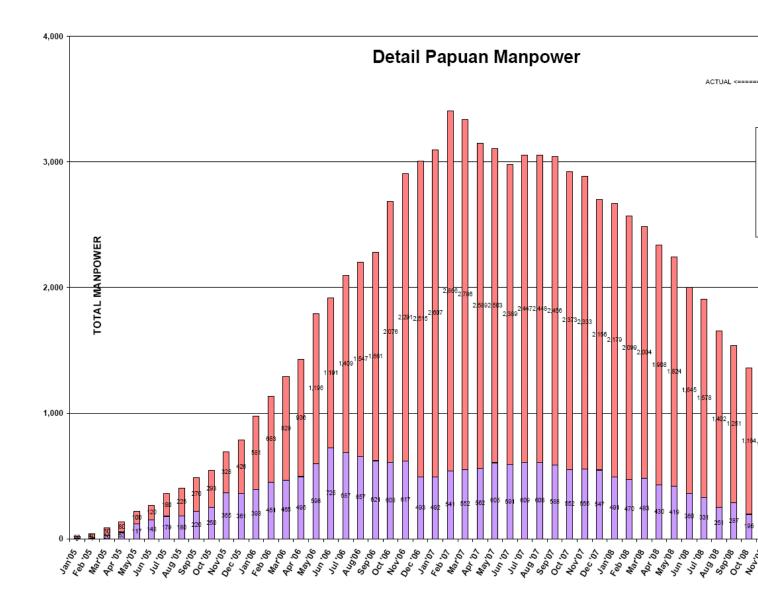
Jumlah keluhan berdasarkan waktu penyampaian Januari-Desember 2008



APENDIKS 8

TENAGA KERJA KONSTRUKSI DI LOKASI LNG
SEJARAH DAN PROYEKSI

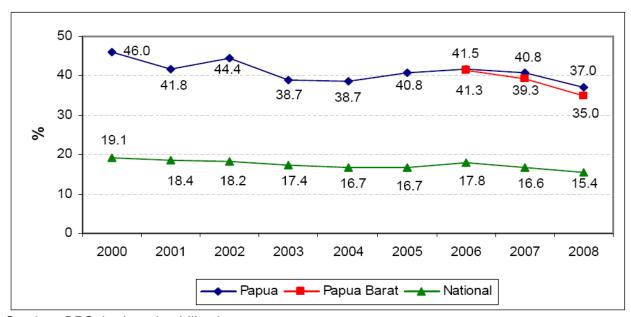




APENDIKS 9

STATISTIK TERPILIH DARI LAPORAN BANK DUNIA

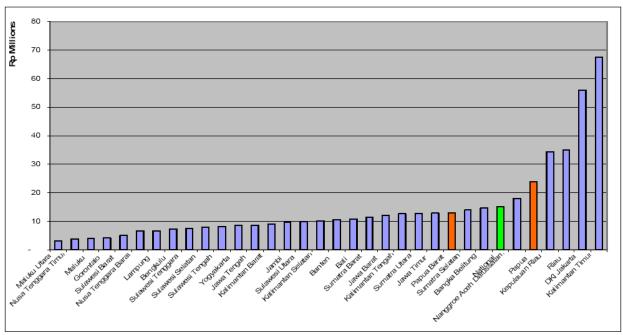
Sejak tahun 2002, tingkat kemiskinan menurun dari 46 persen ke 37 persen, akan tetapi Papua tetap merupakan daerah termiskin di Indonesia



Sumber: BPS, berbagai publikasi

•

Produk Domestik Bruto (GDP) Papua tinggi; bahkan dibandingkan dengan GDP rata-rata nasional, GDP Provinsi Papua 50 persen lebih tinggi, dengan adanya pertambangan



Sumber: BPS

Indikator-indikator sosial dan ekonomi kabupaten Teluk Bintuni masih tertinggal, kecuali untuk GDP regional dan imunisasi anak-anak.

Teluk Bintuni	Value	Rank in Papua (out of 29)	Rank in Papua Barat (out of 9)
Human Development Index (BPS) 2006	60.1	21	8
Population (BPS) 2006	50,766	20	6
Gross Regional Domestic Product per capita (BPS) 2006	10,504,400	8	3
Net Enrollment Rate for Primary % (susenas) 2007	86.7	21	8
Net Enrollment Rate for Junior % (susenas) 2007	47.2	14	5
Net Enrollment Rate for Senior % (susenas) 2007	23.8	20	7
Children<5 yrs with immunization % (MoH Survey) 2008	48.4	6	2
Household with access to safewater % (MoH Survey) 2008	20.8	19	9
Household with access to electricity % (Susenas) 2007	47.6	16	7